



BUPATI BANTUL

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 12 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 14 TAHUN 2005**

**TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2006-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,**

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025, maka dengan ini Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025, perlu dilakukan penyesuaian atau revisi disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4142);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
22. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 – 2025(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 13);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 16);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2009 Nomor 14);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
Dan

BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2006-2025.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 DEC 2010

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 DEC 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

GENDUT SUDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI D NOMOR 12 TAHUN 2010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2006-2025

I. UMUM

Bencana alam gempa bumi yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 di Kabupaten Bantul mengakibatkan banyak perubahan di berbagai sektor kehidupan. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian asumsi perencanaan, arah dan kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2006 – 2025.

Selanjutnya sebagai dokumen perencanaan makro maka RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 tersebut perlu dilakukan perbaikan mengingat adanya perubahan beberapa asumsi dasar sebagai berikut :

1. Pada tanggal 27 Mei 2006 di Kabupaten Bantul telah terjadi bencana gempa bumi yang meluluhlantakkan sendi-sendi perekonomian daerah.
2. Diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
3. Diberlakukannya perdagangan bebas Asean China Free Trade Agreement (ACFTA), sehingga diperlukan strategi pengembangan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Bantul agar dapat bersaing dengan daerah lain dan negara lain.
4. Adanya perubahan kebijakan nasional tentang percepatan penanggulangan kemiskinan (Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010) dan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025.

Perubahan RPJPD Tahun 2006-2025 dalam Peraturan Daerah ini, dimulai terhitung Tahun 2011 sampai dengan 2025, sehingga perencanaan pembangunan daerah pada Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

DAFTAR ISI

DARTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	5
1.3. Landasan Hukum.....	6
1.4. Hubungan RPJP Kabupaten Bantul dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	8
1.5. Sistematika Penulisan	9
BAB II. KONDISI, ANALISIS, DAN PREDIKSI KONDISI UMUM	11
2.1. Kondisi dan Analisis.....	11
2.1.1 Geomorfologi	11
2.1.1.1 Wilayah	11
2.1.1.2 Pembagian Wilayah berdasarkan Penggunaan Lahan.....	12
2.1.1.3 Alih fungsi lahan	13
2.1.1.4 Penetapan Kawasan Strategis.....	15
2.1.1.5 Kawasan Rawan Bencana.....	19
2.1.2 Lingkungan Hidup.....	25
2.1.2.1 Air Limbah.....	25
2.1.2.2 Persampahan	26
2.1.3 Demografi	30
2.1.3.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk..	30
2.1.3.2 Penduduk Miskin	31
2.1.3.3 Ketenagakerjaan.....	32
2.1.4 Ekonomi dan Sumber Daya Alam.....	34
2.1.4.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	34
2.1.4.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita	35
2.1.4.3 Distribusi Pendapatan.....	36
2.1.4.4 Investasi.....	36

2.1.4.5	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).....	40
2.1.4.6	Pertanian	40
2.1.4.7	Perindustrian.....	44
2.1.4.8	Pariwisata	46
2.1.4.9	Bahan Galian	49
2.1.4.10	Pencemaran udara	49
2.1.4.11	Konservasi SDA.....	50
2.1.5.	Sosial Budaya dan Politik	54
2.1.5.1	Pendidikan	54
2.1.5.2	Kesehatan.....	56
2.1.5.3	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	59
2.1.5.4	Pengarusutamaan gender	60
2.1.6.	Prasarana dan Sarana Publik	62
2.1.6.1	Prasarana dan Sarana Transportasi	62
2.1.6.2	Prasarana dan Sarana Perdagangan	67
2.1.6.3	Sarana Irigasi.....	68
2.1.6.4	Sarana Air Minum dan Air Bersih.....	71
2.1.7.	Pemerintahan	74
2.2.	Prediksi Kondisi Umum.....	76
2.2.1	Pengembangan Wilayah.....	76
2.2.1.1	Kawasan Lindung	76
2.2.1.2	Kawasan Budidaya	78
2.2.1.3	Kawasan Strategis	78
2.2.2	Pengembangan Sektoral	79

BAB III. VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH	82
3.1. Visi Kabupaten Bantul	82
3.2. Misi Kabupaten Bantul.....	84
3.3. Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Daerah.....	86
3.4. Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2025	89

BAB IV.TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2006-2025	98
4.1. RPJMD ke-1 (2006-2010).....	98
4.1.1 Arah Kebijakan	99
4.1.1.1 Pengembangan Wilayah.....	99
4.1.1.2 Pengembangan Sektoral	100
4.1.2. Strategi	101
4.1.2.1 Pengembangan Wilayah.....	101
4.1.2.2 Pengembangan Sektoral	102
4.2 RPJMD ke-2 (2011-2015).....	103
4.3 RPJMD ke-3 (2016-2020).....	110
4.4 RPJMD ke-4 (2020-2025).....	116
BAB V. PENUTUP	124
5.1 Ketentuan Umum.....	124
5.2 Kaidah Pelaksanaan.....	124

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah desa, dukuh, dan luas kecamatan di Kabupaten Bantul tahun 2009	11
Tabel 2. Jenis dan Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009	14
Tabel 3: Jenis Potensi Bencana di Kabupaten Bantul	19
Tabel 4: Sektor dan Cakupan Pelayanan Persampahan Tahun 2009	26
Tabel 5: Angka Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009	31
Tabel 6: Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bantul Tahun 2005 – 2009.....	31
Tabel 7. Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Bantul Tahun 2008 - 2009	32
Tabel 8. Pertumbuhan PDRB Tahun 2005–2009 Menurut Harga Konstan Th.2000	34
Tabel 9: Perkembangan PDRB per Kapita Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2000 di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009	35
Tabel 10. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Bantul Tahun 2004-2009	36
Tabel 11. Perkembangan Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri Serta Nilai Investasi di Kabupaten Bantul Tahun 2005 – 2009	37
Tabel 12. Investasi Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009	38
Tabel 13. Perkembangan Investasi Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2005 – 2009	38
Tabel 14. Potensi dan Peluang Investasi di Kabupaten Bantul Tahun 2005 – 2009	38
Tabel 15. Klasifikasi Koperasi di Kabupaten Bantul Tahun 2005 – 2009.....	40
Tabel 16. Jumlah Koperasi Menurut Jenis di Kabupaten Bantul Tahun 2005 – 2009.....	40
Tabel 17. Perkembangan Luas Panen, Produksi Dan Produktivitas Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung, Kacang Tanah, Kedelai di Kabupaten Bantul Tahun 2005 – 2009.....	41

Tabel 18. Produksi Benih Padi Berlabel <i>Bantul Seed Center</i> di Kabupaten Bantul Tahun 2005 – 2009	42
Tabel 19. Luas Lahan Kritis dan Rehabilitasi Hutan Rakyat di Kabupaten Bantul Tahun 2005 - 2009	43
Tabel 20. Perkembangan Ekspor di Kabupaten Bantul Tahun 2008 – 2009.....	44
Tabel 21. Perkembangan Sektor Industri Kecil, Menengah dan Besar di Kabupaten Bantul Tahun 2008 dan 2009	45
Tabel 22. Ekspor Komoditas Unggulan di Kabupaten Bantul Tahun 2009	46
Tabel 23. Lokasi Obyek Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2009....	47
Tabel 24. Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2004 – 2009.....	48
Tabel 25. Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2005 - 2009	58
Tabel 26. Jumlah Sarana Kesehatan Umum di Kabupaten Bantul Tahun 2005 - 2009	59
Tabel 27. Rekap Data PMKS Kabupaten Bantul 2010	60
Tabel 28. Jalan Nasional Tahun 2010.....	63
Tabel 29. Jalan Provinsi di Kabupaten Bantul Tahun 2009	64
Tabel 30. Kondisi Jalan Kabupaten Bantul Tahun 2009.....	65
Tabel 31. Lokasi Pasar Kabupaten Tahun 2009.....	68
Tabel 32. Kondisi Area Sawah Tadah Hujan per Kecamatan di Kabupaten Bantul Tahun 2009	70
Tabel 33. Data Perkembangan Jumlah Pelanggan PDAM di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009	72
Tabel 34. Jumlah Kerja Sama di Kabupaten Bantul Tahun 2005 - 2009	75
Tabel 35. Produk Hukum di Kabupaten Bantul Tahun 2005 – 2009.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hubungan RPJP Kabupaten Bantul dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	8
--	---

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009	55
Grafik 2. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009	55
Grafik 3. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2005-2009	56
Grafik 4. Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2005-2009.....	57
Grafik 5. Angka Harapan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2005-2008	57
Grafik 6. Kecenderungan Gizi Buruk di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menyadari akan banyaknya pelimpahan urusan yang diberikan serta menyadari akan keterbatasannya maka Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan perubahan paradigma yang dikenal dengan paradigma baru. Perubahan mendasar dari paradigma baru adalah bahwa pembangunan harus dilaksanakan oleh tiga komponen utama yaitu unsur masyarakat, swasta, dan pemerintah. Oleh karena itu hal yang mutlak harus dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Penerapan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah membawa semangat perubahan dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bantul yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan lapangan pekerjaan dan berkurangnya penduduk miskin. Menyikapi kondisi tersebut diperlukan visi bersama yang mengarah kepada tindakan yang penuh kehati-hatian dan sikap arif dari semua pihak yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam menentukan jalannya pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bantul, termasuk di dalamnya masyarakat yang diharapkan dapat lebih berperan sebagai subyek dan pelaksana pembangunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 perlu dilakukan perbaikan dikarenakan adanya perubahan beberapa asumsi dasar, yaitu:

- (1) Pada tanggal 27 Mei 2006 di Kabupaten Bantul telah terjadi bencana gempa bumi yang meluluhlantakkan sendi-sendi perekonomian daerah;
- (2) Diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

- (3) Diberlakukannya perdagangan bebas *Asean China Free Trade Agreement* (ACFTA), AFTA, APEC, WTO sehingga diperlukan strategi pengembangan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Bantul agar dapat bersaing dengan daerah dan negara lain;
- (4) Adanya perubahan kebijakan nasional tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010) dan ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 – 2025.

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 adalah dokumen induk dari perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan pendekatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata daerah, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah terutama pasca bencana gempa bumi tanggal 27 Mei 2006. Dokumen RPJPD yang berlaku selama 20 tahun juga memuat pentahapan pelaksanaan pembangunan yang merupakan *guidance* dalam mewujudkan kondisi yang diinginkan pada 20 tahun yang akan datang.

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 ini disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif jangka dua puluh tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU RI No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, dan UU RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai dokumen perencanaan skala makro dalam waktu dua puluh tahunan, RPJP ini mencakup empat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan skala meso yang memuat pentahapan pelaksanaan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, sebagai bentuk penjabaran tahunan terhadap dokumen RPJM perlu disusun dokumen perencanaan skala mikro dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sehubungan dengan itu dan dalam rangka memenuhi semua ketentuan normatif aturan perundangan mengenai perencanaan nasional dan daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul dan DPRD Kabupaten Bantul harus menyusun rangkaian dokumen perencanaan daerah sebagai berikut:

- (1) **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah)**, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politik berwawasan dua puluh tahun dan memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang, yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah setiap lima tahun sekali;
- (2) **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah)**, yang berfungsi sebagai penjabaran dari RPJP Daerah dan memuat visi, misi, gambaran umum kondisi masa kini, gambaran umum kondisi yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi, dan indikasi rencana program lima tahunan secara lintas sumber pembiayaan;
- (3) **Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)**, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah untuk setiap unit kerja daerah, yang memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh setiap satuan kerja perangkat daerah di bawah koordinasi Bappeda;

- (4) **Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD)**, yang merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun sebagai derivasi Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya, yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan dua tahun ke depan;
- (5) **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**, yang disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan dan merupakan kompilasi kritis atas Renja SKPD setiap tahun anggaran dan merupakan bahan utama pelaksanaan Musrenbang Daerah yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan propinsi.

Dalam menyusun Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 ini, acuan utama yang digunakan adalah rumusan visi, misi, dan arah kebijakan umum hasil dari kesepakatan bersama seluruh *stakeholders* Kabupaten Bantul. Di samping itu, penyusunan RPJP Daerah ini juga mengacu pada: (a) RPJP Nasional yang berisikan tentang beberapa fokus pembangunan yang ditetapkan mengacu peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai langkah diantaranya peningkatan investasi, peningkatan kesejahteraan rakyat dengan berbagai program salah satunya adalah program pro rakyat; (b) RPJP Propinsi mempunyai arah kepada terciptanya koordinasi antar daerah, efisiensi sumber daya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; serta (c) berbagai kebijakan serta prioritas program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi. Tujuan merujuk semua dokumen perencanaan dimaksud adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda.

Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga berguna sebagai dasar penilaian kinerja Bupati dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya dan menjadi tolok ukur keberhasilan Bupati dalam

laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang nantinya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur DIY dan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang nantinya diserahkan kepada DPRD Kabupaten Bantul.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah secara partisipatif melalui rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang.

1.2.2 Tujuan

- Sebagai pedoman pembangunan jangka panjang daerah bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi;
- Menyajikan gambaran kondisi umum daerah sekarang dalam konsistensi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai selama 20 (dua puluh) tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah;
- Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah maupun antara pusat dengan daerah;
- Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dituangkan ke dalam RPJM Daerah;

- Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan lima tahunan.

1.3 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 ini, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai rujukan, yaitu:

- 1) Landasan idiil Pancasila;
- 2) Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;
- 3) Landasan operasional:
 - a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - f) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
 - g) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - h) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - i) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

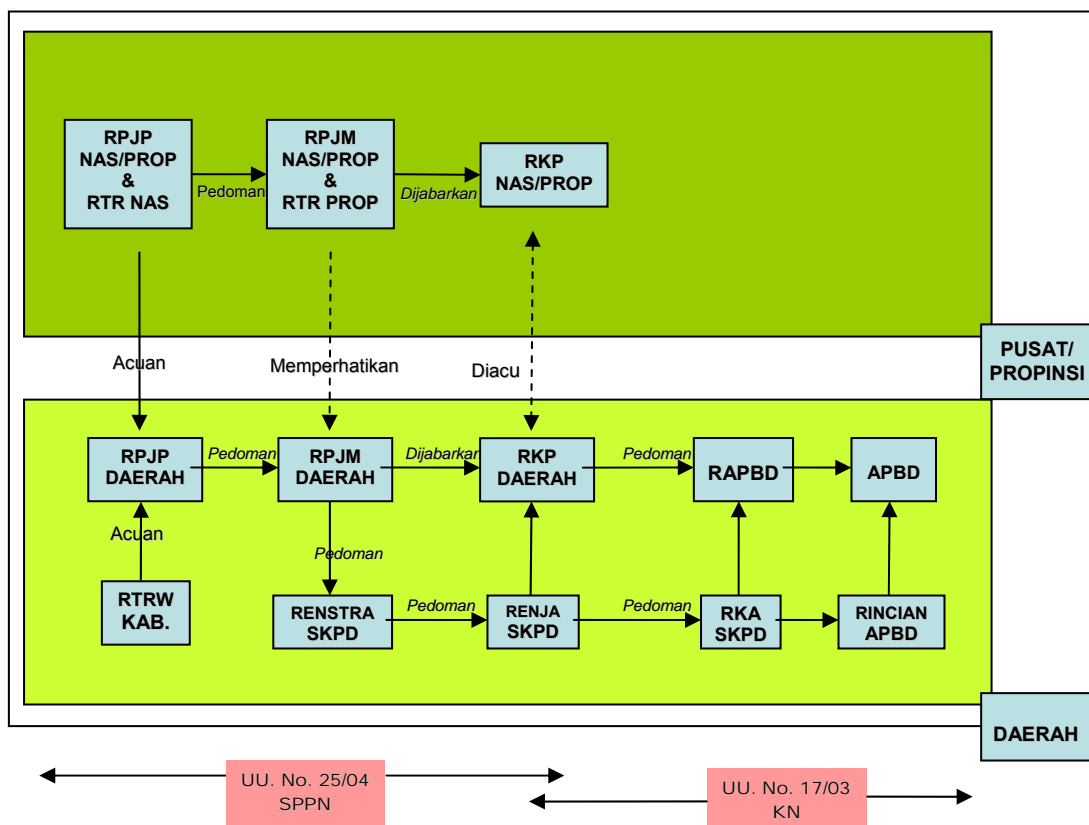
- j) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- k) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- l) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- m) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dan Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- n) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota;
- o) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- p) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN;
- q) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
- r) Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- s) Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- t) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 – 2025; dan
- u) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4 Hubungan RPJP Kabupaten Bantul dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan dokumen RPJP Kabupaten Bantul mengacu, merujuk, mempedomani, dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJP Nasional, RPJP Propinsi, Rencana Tata Ruang Nasional, Rencana Tata Ruang Propinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul. Hal ini dimaksudkan agar hasil akhir dari proses penyusunan dokumen RPJP Kabupaten Bantul dapat menghasilkan dokumen rencana yang sinergis dan terpadu baik dalam aspek kewilayahan maupun aspek sektoral dengan harapan agar dalam implementasinya diperoleh hasil yang tepat dan terarah.

Keterkaitan antara RPJP Kabupaten Bantul dengan dokumen lainnya disajikan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1: Hubungan RPJP Kabupaten Bantul dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Oleh karena dokumen RPJP Kabupaten Bantul yang memiliki jangka waktu selama 20 tahun dari tahun 2006-2025 merupakan dokumen rencana yang belum bersifat operasional, maka dokumen RPJP Kabupaten Bantul harus dijabarkan ke dalam dokumen yang lebih operasional yang disebut sebagai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bantul dengan jangka waktu lima tahun. Dokumen RPJM Kabupaten Bantul merupakan pentahapan dalam pelaksanaan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJP Kabupaten Bantul.

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJP, maksud dan tujuan penyusunan, landasan normatif penyusunan, dan sistematika penulisan.

BAB II: KONDISI, ANALISIS, DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH

Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi daerah saat ini dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan aspek kehidupan sosial ekonomi daerah dan yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan program daerah dalam jangka waktu dua puluh tahun.

Dalam tradisi penyusunan rencana pembangunan berwawasan waktu dua puluh tahun, kondisi umum daerah yang disajikan dalam Bab II ini mencakup:

2.1 Kondisi dan Analisis

2.1.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

- 2.1.2 Demografi
- 2.1.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam
- 2.1.4 Sosial Budaya dan Politik
- 2.1.5 Prasarana dan Sarana
- 2.1.6 Pemerintahan
- 2.2 Prediksi Kondisi Umum
 - 2.2.1 Pengembangan Wilayah
 - 2.2.2 Pengembangan Sektor

BAB III: VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Bab ini dimulai dengan perumusan **visi** dan kemudian diturunkan (diderivasi) menjadi **misi**. Dari misi tersebut ditetapkan arah kebijakan pembangunan untuk dua puluh tahun mendatang.

BAB IV: TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2006-2025

- 4.1 RPJMD KE-1 (2006-2010)
- 4.2 RPJMD KE-2 (2011-2015)
- 4.3 RPJMD KE-3 (2016-2020)
- 4.4 RPJMD KE-4 (2021-2025)

BAB V: PENUTUP

- 5.1 Ketentuan Umum
- 5.2 Kaidah Pelaksanaan

BAB II

KONDISI, ANALISIS, DAN PREDIKSI KONDISI UMUM

2.1 Kondisi dan Analisis

2.1.1 Geomorfologi

2.1.1.1 Wilayah

Kabupaten Bantul merupakan bagian integral dari wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi empat kabupaten dan satu kota. Kabupaten Bantul memiliki wilayah seluas 506,85 km², yang secara administratif pemerintahan terbagi dalam 17 kecamatan, 75 desa, dan 933 pedukuhan sebagaimana dapat dilihat dalam berikut:

Tabel 1: Jumlah desa, dukuh, dan luas kecamatan di Kabupaten Bantul tahun 2009

No.	Kecamatan	Desa	Dukuh	Luas (Km ²)	%
1	Srandakan	2	43	18.32	3.61
2	Sanden	4	62	23.16	4.57
3	Kretek	5	52	26.77	5.28
4	Pundong	3	49	23.68	4.67
5	Bambanglipuro	3	45	22.70	4.48
6	Pandak	4	49	24.30	4.79
7	Pajangan	3	55	33.25	6.56
8	Bantul	5	50	21.95	4.33
9	Jetis	4	64	24.47	4.83
10	Imogiri	8	72	54.49	10.75
11	Dlingo	6	58	55.87	11.02
12	Banguntapan	8	57	28.48	5.62
13	Pleret	5	47	22.97	4.53
14	Piyungan	3	60	32.54	6.42
15	Sewon	4	63	27.16	5.36
16	Kasih	4	53	32.38	6.39
17	Sedayu	4	54	34.36	6.78
	Jumlah	75	933	506.85	100.00

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul, 2010

Secara topografis, Kabupaten Bantul terbagi menjadi daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan utara, daerah perbukitan yang terletak pada bagian timur dan barat serta daerah pantai yang terletak pada

bagian selatan. Wilayah Kabupaten Bantul dilewati oleh tiga sungai utama yaitu Sungai Opak, Sungai Oya dan Sungai Progo. Ketiga sungai ini dimanfaatkan untuk pasokan irigasi, air minum serta tambang pasir dan batu.

2.1.1.2 Pembagian Wilayah berdasarkan Penggunaan Lahan

Rencana penggunaan lahan dikelompokkan menjadi 3, terdiri dari :

❖ **Kawasan lindung Kabupaten;**

Kawasan lindung merupakan wilayah yang mempunyai fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, yang meliputi kawasan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam serta cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan kawasan rawan bencana.

❖ **Kawasan Budidaya Kabupaten;**

Kawasan budidaya merupakan kawasan yang mempunyai fungsi utama untuk di budidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan manusia.

Kawasan budidaya di Kabupaten Bantul meliputi Kawasan peruntukan hutan rakyat dan perkebunan, Kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya.

❖ **Kawasan strategis Kabupaten.**

Kawasan strategis kabupaten merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting

dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Kawasan Strategis Kabupaten Bantul, meliputi Kawasan Strategis Kawasan Perkotaan Yogyakarta (Aglomerasi Perkotaan), Kawasan Strategis Bantul Kota Mandiri (BKM), Kawasan Strategis Pantai Selatan, Pengembangan Pesisir dan Pengelolaan Hasil Laut Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Kuwaru, dan Pantai Pandansimo, Kawasan Strategis Desa Wisata dan Kerajinan Gabusan – Manding – Tembi dan Kajigelem, Kawasan Strategis Industri Sedayu, Kawasan Strategis Industri Piyungan, Kawasan Strategis Agrowisata dan Agropolitan, Kawasan Strategis Gumuk Pasir Parangtritis dan Kawasan Strategis Ibukota Kabupaten Bantul (IKB).

Berdasarkan posisi geografisnya, wilayah Kabupaten Bantul merupakan salah satu wilayah terselatan di Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan jalur utama lalu lintas antar daerah terletak pada bagian Utara wilayah Kabupaten Bantul. Hal ini mengakibatkan percepatan perkembangan wilayah di bagian Utara lebih pesat dari pada bagian lain di Kabupaten Bantul.

Secara geografis dan administratif Kabupaten Bantul memiliki potensi pengembangan, hal ini berdasarkan;

- Batas wilayah yang tidak berbatas secara fisik, meski terdapat *ring road* namun perkembangan saat ini telah melewati batas tersebut;
- Topografi kawasan yang relatif datar;
- Tidak terdapat kendala terhadap kawasan resapan air;
- Banyaknya daerah wisata yang belum tergarap secara optimal untuk pengembangan sektor hotel dan restoran.

2.1.1.3 Alih fungsi lahan

Hampir setengah dari luas wilayah merupakan kawasan budidaya pertanian dengan tingkat kesuburan yang cukup tinggi dengan didukung irigasi teknis pada sebagian besar areal persawahan yang ada. Proporsi

penggunaan lahan pada tahun 2009 yang meliputi kebun campur seluas 16.602,4557 ha (32,76 %), sawah seluas 16.046,22 ha (31,66 %), tegalan seluas 6.637,39 ha (13,10 %), kampung seluas 3.810,78 ha (7,52 %), hutan seluas 1.385,00 ha (2,73 %), tanah tandus seluas 573,00 ha (1,13 %), dan lain-lain penggunaan lahan seluas 5.630,21 ha (11,11 %).

Penggunaan lahan pada tahun 2009 menunjukkan jenis lahan yang berfungsi sebagai kebun campur dan sawah menunjukkan luasan yang paling banyak yaitu masing-masing seluas 16.602,46 ha dan 16.046,22 ha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian dan perkebunan merupakan sektor yang paling banyak di jadikan sumber mata pencaharian bagi warga Kabupaten Bantul sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2: Jenis dan Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009

Penggunaan Lahan	Luas (ha)				
	2005	2006	2007	2008	2009
Perkampungan	1.634,2407	3.686,4516	3.724,3291	3.770,1308	3.810,7270
Sawah	16.220,5771	16.168,3662	16.130,4887	16.085,6390	16.046,2198
Tegal	6.638,8969	6.638,8969	6.638,8969	6.637,9449	6.637,3855
Kebun Campur	16.603,0770	16.603,0770	16.603,0770	16.603,0770	16.602,4557
Hutan	1.385,0000	1.385,0000	1.385,0000	1.385,0000	1.385,0000
Tanah Tandus	573,0000	573,0000	573,0000	573,0000	573,0000
Lain-lain	5.630,2083	5.630,2083	5.630,2083	5.630,2083	5.630,2083
JUMLAH	50.685,000	50.685,000	50.685,000	50.685,000	50.685,000

Sumber: BPN Kabupaten Bantul, tahun 2010

Data alih fungsi lahan pada tahun 2008 ke tahun 2009, penggunaan lahan pertanian ke non pertanian meningkat, terlihat lahan kampung mengalami peningkatan sebesar 40,65 ha, sedangkan luas lahan sawah dan tegalan mengalami pergeseran 40,59 ha. Perkembangan penggunaan lahan tersebut di atas tidak semuanya merupakan lahan pertanian tapi terdapat juga lahan pekarangan yang mengalami perubahan peruntukkan. Kondisi tersebut disebabkan lahan sawah dan tegalan bergeser menjadi lahan perkampungan yang digunakan sebagai tempat permukiman penduduk.

Dari perubahan penggunaan lahan/ fungsi lahan yang dominan diperuntukkan bagi:

- 1) Pembangunan permukiman baru setelah gempa bumi di beberapa wilayah di Kabupaten Bantul;
- 2) Kawasan perindustrian;
- 3) Usaha (perdagangan).

Dengan memperhatikan perubahan perkembangan alih fungsi lahan tersebut, area pertanian dari tahun ke tahun mengalami penyusutan. Hal ini dikarenakan laju pembangunan dan pengembangan wilayah yang cukup pesat. Kondisi ini perlu adanya pengendalian sehingga daya dukung lingkungan wilayah tidak terlampaui.

Hal-hal yang menjadi pemicu perubahan penggunaan lahan:

- 1) Perkembangan Kawasan Perkotaan Yogyakarta;
- 2) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan (misal: kawasan industri di Piyungan, kawasan kerajinan di Pajangan dan Kasihan);
- 3) Masuknya investor;
- 4) Aksesibilitas (jalur transportasi) dengan kondisi baik;
- 5) Di bukanya akses Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) atau jalur PANSELA (Pantai Selatan).

Pada dasarnya perubahan fungsi lahan sawah tidak hanya pada daerah sub urban. Ditinjau dari aspek pertanian, maka alih fungsi lahan sawah akan mengancam persediaan bahan pangan, berkurangnya rata-rata kepemilikan lahan sawah serta rawan timbulnya konflik pemanfaatan ruang.

2.1.1.4 Penetapan Kawasan Strategis

Pengembangan kawasan di Kabupaten Bantul secara spasial meliputi Kawasan Lindung, Kawasan Budidaya, dan Kawasan Strategis. Pengembangan kawasan secara spasial secara khusus akan diuraikan pada bagian akhir bab ini.

Kawasan strategis yang terdapat di wilayah Kabupaten Bantul terkategori sebagai kawasan yang dapat menumbuh kembangkan perekonomian maupun sosiokultural wilayah Kabupaten Bantul, kawasan tersebut meliputi:

- 1) Kawasan Strategis Kawasan Perkotaan Yogyakarta (Aglomerasi Perkotaan);
- 2) Kawasan Strategis Bantul Kota Mandiri (BKM);
- 3) Kawasan Strategis Pantai Selatan;
- 4) Kawasan Strategis Industri Sedayu dan Piyungan;
- 5) Kawasan Strategis Agrowisata Dlingo;
- 6) Kawasan Strategis Gabusan-Manding-Tembi (GMT) dan Kajigelem;
- 7) Kawasan Strategis Gumuk Pasir Parangtritis.
- 8) Kawasan Strategis Ibukota Kabupaten Bantul (IKB)

Sesuai dengan arahan pengembangan kawasan strategis tersebut di atas, maka kondisi makro kewilayahan di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1) Kawasan Strategis Kawasan Perkotaan Yogyakarta (Aglomerasi Perkotaan)

Penetapan Kawasan Perkotaan Yogyakarta di wilayah Kabupaten Bantul merupakan keputusan yang memerlukan tindak lanjut yang sungguh-sungguh, karena selain kawasan tersebut merupakan kawasan strategis juga merupakan kawasan yang termasuk ke dalam sistem perkotaan Yogyakarta dan juga sebagai kawasan yang cepat tumbuh, dengan segala kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki. Hal ini sangat penting mengingat dengan pengembangan kawasan ini Kabupaten Bantul dapat mendorong sektor jasa serta perdagangan, hotel dan restoran yang merupakan sektor-sektor penyumbang PDRB terbesar pada PDRB Provinsi DIY.

Salah satu titik strategis yaitu pembangunan *Central Business District* (CBD) baru bagi kawasan perkotaan Yogyakarta di kawasan *Jogja Expo Center* (JEC) di Kecamatan Banguntapan. Pengembangan CBD

ditujukan untuk penyediaan fasilitas konferensi skala internasional mengingat regional DIY belum memiliki fasilitas yang mampu menampung hingga 1000 orang. Pembangunan ini dapat menggunakan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) sehingga tidak menyedot APBD kabupaten terlalu besar. Diharapkan dengan pembangunan CBD ini laju perekonomian Bantul akan semakin tinggi dan mengembangkan potensi *Meeting Incentive Conference Exhibition* (MICE) di regional Provinsi DIY secara optimal.

2) Kawasan Strategis Bantul Kota Mandiri (BKM)

Penetapan kawasan BKM sebagai kawasan strategis merupakan kebijakan untuk mengantisipasi perkembangan permukiman sebagai akibat perkembangan Kota Yogyakarta dan upaya untuk mengurangi konversi lahan pertanian ke non-pertanian. Selain itu, dengan adanya BKM dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat setempat.

Lokasi kawasan strategis ini terdapat di Desa Guwosari, Sendangsari, Triwidadi, Kecamatan Pajangan, dan Desa Bangunjiwo di Kecamatan Kasihan, dengan luas areal kawasan sekitar 1.300 ha. Kawasan ini diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan sendiri yang akan menarik minat masyarakat Bantul khususnya dan masyarakat luar Bantul umumnya untuk dijadikan tempat bermukim tetap atau hanya sekedar berkunjung.

3) Kawasan Strategis Pantai Selatan

Penetapan kawasan Pantai Selatan sebagai kawasan strategis daerah dengan pengembangan pesisir dan pengelolaan hasil laut Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Kuwaru, dan Pantai Pandansimo, merupakan langkah awal dalam meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian yang mampu memberikan kontribusi PDRB cukup besar terhadap Kabupaten Bantul dan Provinsi DIY pada umumnya. Kawasan ini berpotensi untuk menarik perhatian pengunjung lokal, domestik maupun mancanegara dengan keindahan wisata pantai dan

wisata alam yang dapat dinikmati. Kawasan ini juga mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah, rata-rata pertahunnya mencapai angka dua milyar rupiah. Dan dengan adanya rencana Jalur Jalan Lintas selatan atau Pansela maka dapat lebih mendukung perkembangan kawasan strategis pantai selatan.

4) Kawasan Strategis Industri Sedayu dan Piyungan

Penetapan kawasan industri Sedayu dan Piyungan sebagai kawasan strategis di wilayah Kabupaten Bantul akan berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian (taraf hidup) baik bagi masyarakat pada kawasan tersebut (setempat) maupun bagi fisik dan perekonomian wilayah Kabupaten Bantul. Kawasan industri Sedayu mampu menampung kegiatan industri yang berskala menengah besar dengan tingkat polutan rendah, sedangkan Kawasan Industri Piyungan mampu menampung kegiatan industri yang berskala menengah besar dengan tingkat polutan cenderung tinggi. Untuk industri yang berskala kecil dengan polutan rendah tersebar di seluruh Kabupaten termasuk Kecamatan Srandakan sebagai pintu masuk lintas kabupaten.

5) Kawasan Strategis Agrowisata dan Agropolitan

Penetapan kawasan Agrowisata Dlingo sebagai kawasan strategis lingkungan hidup merupakan upaya untuk mengembangkan kawasan tersebut dan membangun kesadaran masyarakat agar peduli dan memperhatikan pelestarian lingkungan hidup. Pengembangan kawasan agrowisata ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun tetap mempertahankan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup. Selain itu akan dikembangkan agropolitan di kecamatan Sanden, Kretek, Pundong, Imogiri, dan Dlingo.

6) Kawasan Strategis Gabusan Manding Tembi (GMT) dan Kajigelem

Penetapan Kawasan GMT dan Kajigelem sebagai kawasan strategis di wilayah Kabupaten Bantul merupakan langkah awal dalam menyusun grand desain kawasan dan master plan kawasan, yang diharapkan dapat berdampak positif terhadap perekonomian, dan taraf hidup

masyarakat setempat dan sekitarnya, maupun terhadap perekonomian wilayah Kabupaten Bantul.

7) Kawasan Strategis Gumuk Pasir Parangtritis

Penetapan gumuk pasir dipesisir selatan Pulau Jawa yang terdapat di Kabupaten Bantul memiliki karakteristik unik yang merupakan laboratorium alam yang langka. Kerusakan terhadap gumuk pasir akan mengubah ekosistem secara nyata yang berakibat besarnya kerusakan ekologis dan mengganggu keseimbangan ekologi. Potensi karakteristik yang unik dapat dikembangkan selain untuk daya tarik wisata juga untuk wisata pendidikan.

8) Kawasan Strategis Ibukota Kabupaten Bantul (IKB)

Penetapan kawasan strategis ibukota Kabupaten Bantul berkaitan dengan kelengkapan sarana prasarana yang dimiliki wilayah kecamatan Bantul untuk meningkatkan dan menggerakkan perekonomian khususnya berkaitan dengan besarnya nilai tambah produk.

2.1.1.5 Kawasan Rawan Bencana

Wilayah Kabupaten Bantul merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi rawan terkena bencana alam seperti: rawan banjir, bencana tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan kekeringan. Gambaran wilayah rawan bencana di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3: Jenis Potensi Bencana di Kabupaten Bantul

No.	Jenis Bencana	Lokasi yang berpotensi
1	Tanah longsor	Piyungan, Imogiri, Dlingo, Pleret
2	Angin ribut	Hampir di seluruh Kecamatan
3	Kekeringan	Dlingo, Piyungan, Pajangan, Pleret, Imogiri, Pundong
4	Banjir	Kretek, Sanden, Srandakan, Pundong
5	Gempa bumi	Di seluruh Kecamatan
7	Tsunami	Srandakan, Kretek, Sanden
8	Kebakaran	Hampir di seluruh Kecamatan
9	Lahan Kritis	Hampir di seluruh Kecamatan

Sumber: Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Bantul, 2010

1) Kawasan Rawan Banjir

Banjir terjadi sebagai akibat ketidakmampuan kawasan maupun wilayah untuk menampung limpasan air hujan. Hal ini tidak hanya melanda di wilayah setempat tetapi dapat juga melanda sepanjang DAS (Daerah Aliran Sungai). Banjir terjadi umumnya sebagai akibat berkurangnya kawasan bervegetasi yang berfungsi sebagai daerah resapan air. Banjir yang terjadi di Kabupaten Bantul, karena meluapnya air sungai Opak dan sungai Oyo akibat dari tekanan air pada sungai tersebut yang terlalu tinggi, sehingga mengakibatkan kerusakan rumah penduduk (berat dan ringan), tanggul dan DAM di Kecamatan Banguntapan, jembatan di Kecamatan Jetis dan kerusakan kecil lainnya. Yang termasuk daerah rawan banjir adalah beberapa wilayah di Kecamatan Srandakan, Kecamatan Sewon, dan Kecamatan Kasihan.

2) Kawasan Rawan Tanah Longsor

Wilayah Kabupaten Bantul merupakan bagian selatan cekungan Yogyakarta, secara geomorfologi merupakan satuan kaki gunung api Merapi bagian bawah, satuan perbukitan melandai sampai terjal, satuan daratan, dan satuan gumuk pasir. Pada daerah kaki gunung Merapi bagian bawah, merupakan bagian endapan fluvial atau alluvial dari formasi wates dan gumuk pasir (*sand dunes*). Pola air sungai pada wilayah ini *parallel* dan bermeander, merupakan daerah *discharge*. pada satuan wilayah perbukitan, elevasi 25 – 972 meter (dpl) dan kemiringan lereng mancapai 90%. Litologi pada wilayah ini ada batu pasir napalan, konglomerat, dan batu gamping. Pada satuan daratan, elevasi 0 – 25 meter (dpl) dan kemiringan lereng kurang dari 15%. Litologi pada wilayah ini terutama kerakal, pasir, lanau dan lempung. Pada satuan wilayah gumuk pasir terdapat disepanjang pantai antara sungai opak dan sungai progo lebar 1 – 1,5 km dengan ketebalan 30 meter.

Dari uraian karakteristik fisik maka bahaya longsor berpotensi di wilayah timur daerah Bantul, yakni Kecamatan Piyungan, Pleret, Dlingo

dan Kecamatan Imogiri. Walaupun sifat fisik batuan yang keras dan kompak dari Formasi Nglanggran dan Formasi Semilir berdampak positif namun ada faktor lain yang dapat berpotensi mengakibatkan longsor yaitu:

- a) Kelas lereng yang lebih besar dari 40%
- b) Adanya patahan yang menyebabkan terjadinya rekahan dan kekar pada batuan Formasi Nglanggran dan Formasi Semilir.

Di wilayah dengan karakteristik di atas akan menjadi wilayah dengan potensi longsor yang besar. Wilayah ini terdapat di Piyungan dan Pleret. Sedangkan jenis longsor yang mungkin timbul adalah jatuhnya batu (*rock fall*) dan *debris slide*.

3) Kawasan Rawan Gempa Bumi

Untuk mengetahui kerentanan wilayah terhadap gempa diperlukan parameter karakteristik seismic tanah, ketebalan tanah, muka air tanah, penyebaran sesar dan pusat gempanya sendiri. Beberapa penyelidikan perlu dilakukan, yaitu analisa foto udara dan citra satelit pemboran dalam (pemboran geoteknik), survey mikrotremor, dan survey-survey yang lain misalnya magneto tulerik dan survey georadar.

Peta mikrozonasi ini kemudian diintegrasikan dengan peta penyebaran struktur sesar untuk menghasilkan peta bahaya gempa bumi seperti di bawah ini.

- a) Zona dengan kerentanan sangat tinggi.

Zona ini dijumpai di wilayah Bantul timur, terutama di sepanjang Sungai Opak, misalnya sebagian Kecamatan Kretek bagian timur tenggara, sebagian Kecamatan Pundong memanjang dari selatan hingga utara dan sebagian kecil Kecamatan Imogiri bagian barat-barat laut, sebagian besar Kecamatan Jetis memanjang dibagian tengah dari bagian selatan hingga timurlaut, sebagian kecil di Kecamatan Piyungan bagian barat daya dan sebagian kecil Kecamatan banguntapan bagian tenggara, serta Kecamatan Pandak bagian barat daya-barat-barat laut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi wilayah ini antara lain; jenis tanah, kehadiran zona patahan, kehadiran air bawah tanah yang dangkal, dan jarak suatu zona dari pusat gempa bumi.

b) Zona dengan kerentanan tinggi.

Zona ini di jumpai disebagian wilayah Bantul timur, terutama yang berdekatan dengan kaki perbukitan, serta di sebagian wilayah Bantul utara bagian tengah, misal meliputi wilayah; sebagian besar Kecamatan Imogiri (kecuali bagian timur), sebagian Kecamatan Pleret dari bagian tenggara hingga barat daya, sebagian kecil Kecamatan Banguntapan bagian selatan, sebagian Kecamatan Jetis memanjang dari bagian selatan hingga timur laut, sebagian kecil Kecamatan Pundong di bagian timurlaut dan di bagian barat laut, sebagian kecil di Kecamatan Bambanglipuro di bagian barat daya hingga timur laut, sebagian besar Kecamatan Sewon memanjang dari bagian barat daya hingga timur laut dan sebagian kecil Kecamatan Kasihan memanjang dari bagian tengah hingga utara.

Faktor-faktor yang mempengaruhi wilayah ini antara lain; kondisi tanah yang berupa pasir lepas, kondisi muka air tanah relative dangkal (kurang dari 5 m), dan posisi wilayah-wilayah tersebut di atas relative masih dekat dengan zona patahan juga mengontrol tingginya tingkat kerentanan.

c) Zona dengan kerentanan menengah.

Zona dengan kerentanan ini dijumpai di sebagian kecil wilayah Kecamatan Kasihan bagian barat laut dan memanjang di bagian timur dari timur laut hingga selatan, dijumpai di sebagian kecil Kecamatan Pajangan bagian timur, sebagian besar Kecamatan Bantul bagian tengah memanjang dari selatan hingga utara, sebagian besar Kecamatan Pandak bagian utara dan di bagian selatan, timur hingga utara, hampir seluruh Kecamatan Bambanglipuro, sebagian kecil Kecamatan Sanden bagian utara

dan timur laut, sebagian Kecamatan Kretek bagian timur laut, sebagian Kecamatan Pundong bagian barat, sebagian kecil Kecamatan Jetis bagian barat daya, barat, dan barat laut, sebagian kecil Kecamatan Pleret bagian tengah memanjang dari bagian barat daya hingga timur laut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi wilayah ini antara lain; endapan tanah pada zona ini merupakan pasir sungai purba yang relative lebih padat daripada endapan pasir sungai purba di zona dengan kerentanan tinggi, frekuensi patahan pada batuan dasar relative lebih rendah, dan zona kerentanan menengah ini kurang kuat dalam merespon terhadap getaran gempa apabila dibandingkan dengan zona dengan kerentanan yang lebih tinggi.

d) Zona dengan kerentanan rendah.

Zona ini dijumpai hampir seluruh Kecamatan Pajangan, sebagian kecil Kecamatan Sedayu bagian tenggara, sebagian kecil Kecamatan Pandak memanjang di bagian utara dari bagian utara hingga tengah dan di bagian selatan, sebagian kecil di Kecamatan Bantul bagian barat dan di bagian tengah, dan sebagian kecil di Kecamatan Sanden bagian utara, sebagian kecil Kecamatan Sewon bagian tenggara, dan sebagian kecil Kecamatan Pleret bagian barat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi wilayah ini antara lain; kondisi tanah pada zona ini relative kompak, kedalaman muka air tanah relative lebih dalam (sekitar 5 m atau lebih dari permukaan tanah), dan posisinya relative lebih jauh dari patahan di batuan dasar.

4) Kawasan Rawan Gelombang Pasang (Tsunami)

Bagian selatan wilayah Bantul merupakan pesisir yang berbatasan dengan Laut Indonesia. Berkaitan dengan kawasan rawan gempa bumi maka wilayah ini memiliki kerawanan terjadinya gelombang pasang atau tsunami. Dampak gempa akan tergantung kepada konfigurasi pantainya dan kondisi pantai. Kerawanan bahaya gelombang pasang

tsunami dikontrol oleh faktor besaran tsunami dan topografi pantai. Beberapa wilayah di Kabupaten Bantul yang akan terkena dampak gelombang pasang tsunami dengan ketinggian gelombang 10 meter diperkirakan sebagai berikut : sebagian wilayah Kecamatan Sanden, Kecamatan Kretek, dan Kecamatan Srandakan.

Sedangkan apabila gelombang pasang tsunami mencapai ketinggian sampai 25 meter maka wilayah yang akan terkena dampak meliputi seluruh wilayah kecamatan Sanden, Kecamatan Kretek, Kecamatan Srandakan, sebagian wilayah Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Pundong, Kecamatan Pandak, Kecamatan Bantul, dan Kecamatan Jetis.

5) Kawasan Lahan Kritis

Lahan kritis merupakan suatu lahan yang telah mengalami kerusakan, sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sampai pada batas yang telah ditentukan atau diharapkan (Anonim, 1998). Kekritisan lahan dapat ditinjau dari fungsi lahannya maupun dari segi produktivitasnya. Lahan kritis pada awalnya merupakan lahan yang produktif, tetapi karena kesalahan dalam pengelolaan maka lambat laun lahan tersebut mengalami penurunan kesuburan atau solum tanah semakin menipis sehingga tidak mampu lagi sebagai tempat tumbuh tanaman secara ekonomis. Lahan kritis umumnya merupakan indikator akan rusaknya fungsi konservasi tanah dan air.

Rusaknya fungsi konservasi tersebut mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah terjadi erosi dan berkurangnya lapisan humus. Humus berfungsi untuk menghambat laju erosi dan meningkatkan porositas tanah. Penurunan porositas tanah maka mengakibatkan volume air hujan yang meresap ke dalam tanah menjadi sedikit dan sebaliknya aliran permukaan meningkat yang berdampak terjadinya banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penilaian kekritisan lahan adalah prosentase tutupan lahan, derajat kemiringan lereng,

tingkat erosi tanah dan pengelolaan lahan. Dari faktor-faktor tersebut, faktor pengelolaan lahan menjadi faktor utama penyebab terjadinya lahan kritis, terutama pengelolaan lahan yang tidak sesuai dengan kaidah konservasi tanah dan air. Lahan kritis juga dapat disebabkan oleh makin meningkatnya tekanan penduduk terhadap lahan akibat pertambahan jumlah penduduk yang tinggi. Upaya rehabilitasi lahan kritis diantaranya dilakukan dengan kegiatan reboisasi dan atau penghijauan.

Reboisasi merupakan kegiatan pembuatan tanaman hutan dengan cara penanaman pohon-pohon yang dilaksanakan di dalam kawasan hutan (hutan negara). Sedangkan penghijauan dilakukan dalam rangka memulihkan keadaan lahan kritis di luar kawasan hutan agar dapat berfungsi sebagai media produksi dan pengatur tata air serta mempertahankan dan meningkatkan dayaguna lahan sesuai peruntukannya.

Persebaran lahan kritis di Kabupaten Bantul pada umumnya berada di wilayah bagian barat dan timur.

2.1.2 Lingkungan Hidup

2.1.2.1 Air Limbah

Penanganan air limbah di Kabupaten Bantul belum optimal. Kondisi ini dapat dilihat dari jumlah kegiatan yang potensial menghasilkan limbah cair, ternyata sebagian besar belum memiliki instalasi pengolahan limbah (*Waste Water Treatment*). Kegiatan yang berpotensi menghasilkan limbah cair di Kabupaten Bantul antara lain dari bidang industri dan bidang kesehatan, disamping itu kegiatan perumahan juga berpotensi menghasilkan limbah domestik.

Kegiatan bidang industri dan bidang kesehatan yang memiliki instalasi pengolahan limbah masih sangat kecil (kurang dari 20%), sedangkan kegiatan perumahan (komplek perumahan) belum ada yang memiliki unit

pengolahan limbah secara terpadu (*comunal system*), sebagian besar masih menggunakan sistem pengolahan dengan sumur-sumur peresapan individu yang sangat rawan mencemari air tanah. Di sisi lain di Kabupaten Bantul terdapat sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah terpusat (IPAL Sewon) yang diperuntukan untuk menangani limbah di Kota Yogyakarta, sebagian Kabupaten Sleman dan sebagian Kabupaten Bantul, namun karena faktor kemiringan lereng (*slope*) dan jumlah pipa lateral, maka sampai saat ini hanya sebagian kecil yang bisa mengakses sistem tersebut.

2.1.2.2 Persampahan

Produksi sampah/timbunan sampah di Kabupaten Bantul mencapai 614 m³/hari sedangkan volume sampah yang terkumpul mencapai 80 m³/hari atau sebesar 13%. Komposisi timbunan sampah sebagian besar adalah sampah organik sebanyak 70% (56 m³/hari) yang rentan mengalami pembusukan dan sisanya sampah non-organik sebanyak 30% (24 m³/hari). Selanjutnya berkaitan dengan kemampuan dalam pelayanan sampah dapat dilihat pada Tabel.4.

Tabel 4: Sektor dan Cakupan Pelayanan Persampahan Tahun 2009

No	Sektor Pelayanan	Total Area (Ha)	Area Terlayani(Ha)	Tingkat Pelayanan (%)
1.	Banguntapan	777	120	15,4
2.	Kasih	1321	400	30
3.	Sewon	744	100	13,4
4.	Piyungan	18	9	50
5.	Pleret	190	40	21
	Total	3.050	669	21,19

Sumber: DPU Kabupaten Bantul, 2010

Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dilakukan mulai dari pengumpulan/pengangkutan sampah perumahan, pasar, dan sumber-sumber sampah lainnya. Untuk pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir sampah TPA Piyungan, dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah Bantul dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Kerjasama ini dalam bentuk *sharing* pembiayaan operasional pengolahan sampah di TPA Piyungan.

Sesuai dengan perencanaan maka usia pakai TPA Piyungan hanya akan mampu menampung sampah sampai tahun 2012, oleh sebab itu perlu dilakukan upaya untuk memperpanjang umur TPA atau pembangunan TPA baru sehingga perlu kajian lebih lanjut tentang lokasi pengolahan yang tepat. Dari sisi manajemen pengelolaan, TPA Piyungan dikelola secara bergiliran antar pemerintah kabupaten/kota, sedangkan biaya pengelolaan ditanggung bersama pemerintah kabupaten/kota yang besarnya proporsional sesuai dengan jumlah sampah yang dibuang ke TPA.

Dari aspek lingkungan, operasional TPA Piyungan memberikan dampak, baik dampak positif maupun negatif. Dampak positif antara lain dengan berkembangnya kegiatan pemanfaatan sampah (*recycle, reduce dan reuse*) oleh pemulung yang mencapai lebih dari 200 orang. Dampak negatif yang timbul dan belum tertangani secara optimal antara lain adalah kerusakan jalan Ponegaran dengan Desa Ngablak yang selalu dilewati truk pengangkut sampah, pencemaran air lindi (*leachate*) ke badan air, pencemaran udara/bau, gangguan transportasi dan kesulitan mendapatkan tanah urug untuk penutup (*land fill*). Dalam jangka panjang permasalahan-permasalahan tersebut cenderung akan meningkat dan diperlukan penanganan yang optimal.

ANALISIS

- 1) Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian meningkat, luas lahan sawah dan tegalan mengalami pergeseran. Alih fungsi lahan yang dominan diperuntukkan bagi pembangunan permukiman baru setelah gempa bumi di beberapa wilayah di Kabupaten Bantul, Kawasan perindustrian, dan usaha (perdagangan). Perubahan fungsi lahan secara berlebihan dan tidak adanya kontrol lingkungan mengakibatkan kerusakan lingkungan dan berkurangnya lahan-lahan produktif di wilayah pengembangan pertanian.

- 2) Pembagian kawasan strategis di Kabupaten Bantul meliputi; Kawasan Strategis Kawasan Perkotaan Yogyakarta (Aglomerasi Perkotaan), Kawasan Strategis Bantul Kota Mandiri (BKM), Kawasan Strategis Pantai Selatan, Kawasan Strategis Industri Sedayu dan Piyungan sebagai kawasan industri skala besar, sedangkan untuk industri yang berskala kecil dengan polutan rendah tersebar di seluruh Kabupaten termasuk Kecamatan Srandakan sebagai pintu masuk lintas kabupaten, Kawasan Strategis Agrowisata dan agropolitan, dan Kawasan Strategis Gabusan-Manding-Tembi (GMT) dan Kajigelem, Kawasan Strategis Gumuk Pasir Parangtritis serta Kawasan Ibukota Kabupaten Bantul (IKB).
- 3) Ancaman berupa bencana gempa bumi, tanah longsor, tsunami, kekeringan, dan banjir masih menjadi perhatian yang serius karena jumlah korban kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh bencana, diperkirakan akan semakin tinggi apabila tidak ada upaya untuk melakukan berbagai kegiatan pengurangan risiko bencana (mitigasi). Sebagai penerjemahan dari pergeseran paradigma kearah perlindungan sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar rakyat, pengurangan risiko bencana harus mempunyai karakteristik sebagai berikut :
 - a) Menghargai hak untuk hidup dan kehidupan yang bermartabat dan pemerintah bertanggung jawab memastikan perlindungan dari risiko bencana yang sejatinya terhindarkan.
 - b) Bertujuan mengurangi faktor-faktor penyebab risiko bencana dari proses-proses pembangunan yang tidak berkelanjutan dan yang diperburuk oleh perubahan iklim
 - c) Akuntabel kepada masyarakat berisiko dan atau terkena bencana serta didorong untuk meningkatkan partisipasi, ekuiti dan keadilan serta dilaksanakan dengan perspektif jender.
- 4) Kegiatan bidang industri dan bidang kesehatan yang memiliki instalasi pengolahan limbah masih sangat kecil (kurang dari 20%), sedangkan kegiatan perumahan (komplek perumahan) belum ada yang memiliki unit pengolahan limbah secara terpadu (*communal system*), sebagian

besar masih menggunakan sistem pengolahan dengan sumur-sumur peresapan individu yang sangat rawan mencemari air tanah, apabila kondisi tersebut tidak dilakukan pengendalian akan merusak dan menimbulkan pencemaran air bersih. Disisi lain meningkatnya jumlah sampah akan menyebabkan perubahan lingkungan secara berkelanjutan, sehingga kerusakan lingkungan dapat terjadi apabila tidak dilakukan pengendalian dan pengolahan sampah, walaupun sudah ada TPA di Kecamatan Piyungan, namun dalam jangka panjang permasalahan-permasalahan tersebut cenderung akan meningkat dan diperlukan penanganan yang optimal.

OUTPUT

- 1) Alih fungsi lahan di Kabupaten Bantul dari lahan produktif berupa lahan persawahan dan tegalan menjadi kawasan permukiman dan industri semakin berkembang, sehingga kondisi tersebut perlu adanya kegiatan pembatasan alih fungsi lahan produktif menjadi kawasan-kawasan non produktif. Pengelolaan lahan-lahan marginal menjadi lahan produktif maupun menjadi kawasan industri dan permukiman merupakan suatu langkah yang dapat mengurangi alih fungsi lahan tersebut.
- 2) Untuk mengantisipasi kawasan strategis/ kawasan tumbuh cepat, maka dilakukan pembangunan sarana parasarana sesuai dengan prioritas pengembangan kawasan.
- 3) Ancaman berupa bencana gempa bumi, angin ribut, tanah longsor, tsunami, kekeringan serta bencana-bencana lain walau tidak dapat diprediksi kejadiannya masih menjadi tantangan dimasa mendatang, sehingga upaya-upaya penanggulangan bencana dan penyadaran masyarakat bahwa daerah Kabupaten Bantul merupakan daerah yang rawan bencana harus terus dilakukan. Perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsif menjadi pengurangan risiko bencana.
- 4) Dalam jangka panjang permasalahan sampah dan ketersediaan air bersih akan menjadi permasalahan yang kompleks, sehingga perlu

dilakukan pengolahan sampah dengan baik dan pengelolaan air bersih di lokasi permukiman penduduk maupun kawasan industri berskala kelompok kecil maupun menengah. Kerjasama seluruh pemangku kepentingan (pemerintah daerah, masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan swasta) dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan sangat diperlukan, sehingga ke depan kelestarian alam dapat terjaga. Pemberian penghargaan, perlindungan dan pelestarian kearifan lokal yang berkembang di masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan akan memberikan motivasi untuk peduli terhadap lingkungan sekitar.

- 5) Penanganan limbah secara optimal dalam jangka panjang sangat diperlukan untuk mengantisipasi penurunan kualitas lingkungan dengan demikian perlu diterbitkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan limbah.

2.1.3 Demografi

INPUT

2.1.3.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Sampai dengan tahun 2009, penduduk Kabupaten Bantul berjumlah 922.566 jiwa yang tersebar di 17 kecamatan. Dari Tabel 5 diketahui bahwa pertumbuhan penduduk Kabupaten Bantul untuk kurun waktu tahun 2005 – 2009 menunjukkan pola penambahan yang linier. Angka pertumbuhan penduduk menurun dari 2,19% pada tahun 2005 dan pada tahun 2009 sebesar 1,41% maka kondisi ini menunjukkan keberhasilan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh adanya migrasi ke luar daerah yang lebih tinggi dibandingkan dengan penambahan penduduk alamiahnya. Kondisi ini dijumpai terutama pada wilayah tengah Kabupaten Bantul. Hal seperti ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat tidak dapat lagi menggantungkan hidupnya di daerahnya sendiri. Dengan bertambahnya

tekanan penduduk akan berimplikasi terhadap meningkatnya kebutuhan dan pelayanan yang harus disiapkan.

Tabel 5: Angka Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009

NO	TH	JUMLAH PENDUDUK BERDASAR KELOMPOK UMUR								JUMLAH	Pertumb (%)
		0 -9 TH		10 -19 TH		20 - 39 TH		> 40 TH			
		L	P	L	P	L	P	L	P		
1	2005	64.746	63.083	66.377	68.502	148.884	148.059	144.284	167.268	871.203	2,19
2	2006	64.359	64.240	71.752	68.913	142.848	144.528	152.721	174.725	884.086	1,48
3	2007	63.922	65.407	77.275	69.315	136.520	140.871	161.367	182.317	896.994	1,46
4	2008	64.835	66.341	78.379	70.305	138.471	142.884	163.674	184.923	909.812	1,43
5	2009	65.338	68.134	69.168	67.955	143.063	142.134	178.025	188.749	922.566	1,41

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, tahun 2010

Selain itu, perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Bantul juga dipengaruhi oleh pertumbuhan alami (lahir dan mati), penduduk datang dan penduduk keluar (migrasi).

2.1.3.2 Penduduk Miskin

Tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Tabel 6: Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bantul Tahun 2005 – 2009

No	Indikator	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Jumlah Jiwa Miskin	166,220	288,035	221,757	186,418	149,159
2.	Persentase	19,76	32,58	24,72	20,49	16,17
	Perubahan		64,88%	-24,13%	-17,11%	-21,08%

Sumber: BKK PP KB Kabupaten Bantul, 2010

Perubahan penduduk miskin pada tahun 2005 mencapai 166,220 jiwa atau sekitar 20,90% dari jumlah penduduk di Kabupaten Bantul, kondisi tersebut mengalami peningkatan sebesar 64,88% di tahun 2006, kenaikan tersebut disebabkan adanya gempa bumi yang menyebabkan kehilangan

sebagian mata pencahariannya. Akan tetapi, pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 cenderung menurun. Hal ini disebabkan oleh efektivitas program-program yang telah dilakukan.

2.1.3.3 Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan berhubungan dengan tingkat angkatan kerja pada suatu wilayah tertentu, jumlah angkatan kerja terdiri dari jumlah penduduk yang bekerja dengan perbandingan penduduk yang belum mendapatkan kesempatan bekerja.

Tabel 7: Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Bantul Tahun 2008 - 2009

No.	Kecamatan	Angkatan Kerja 2008		Angkatan Kerja 2009	
		Bekerja	Menganggur	Bekerja	Menganggur
1	Srandakan	16,404	1,147	17,106	879
2	Sanden	16,748	1,864	18,959	1,667
3	Kretek	17,727	2,018	19,270	1,839
4	Pundong	14,244	1,422	15,396	1,270
5	Bambanglipuro	24,646	1,826	25,820	2,692
6	Pandak	27,280	2,295	28,952	1,823
7	Bantul	30,896	2,816	33,846	1,797
8	Jetis	27,429	1,957	29,404	2,199
9	Imogiri	33,476	2,080	36,825	3,855
10	Dlingo	21,374	1,590	23,046	2,137
11	Pleret	17,026	2,398	19,267	2,094
12	Piyungan	17,135	1,522	18,743	942
13	Banguntapan	44,802	3,707	45,126	2,796
14	Sewon	51,179	1,262	49,288	934
15	Kasih	37,163	2,639	43,586	1,843
16	Pajangan	20,349	1,394	22,253	864
17	Sedayu	18,102	3,429	21,321	1,222
	Jumlah	435,980	35,366	468,208	30,853

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Bantul, 2010

Jumlah angkatan kerja tahun 2008 tercatat bekerja sebanyak 435,980 jiwa dan yang belum mendapat kesempatan bekerja sebanyak 35,366 jiwa. Sedangkan pada tahun 2009 tercatat bekerja sebanyak 468,208 jiwa dan yang belum mendapat kesempatan bekerja sebanyak 30,853 jiwa. Hal ini menunjukkan angkatan kerja mengalami peningkatan, sedangkan untuk

angkatan kerja yang belum mendapatkan kesempatan bekerja mengalami penurunan.

Secara kewilayahan pengangguran banyak dijumpai di wilayah sub-urban dan wilayah tengah Kabupaten Bantul. Dilihat dari komposisi penguasaan keterampilan penganggur terlihat bahwa sebagian terbesar penganggur belum memiliki ketrampilan spesifik yang siap untuk membuka usaha atau mencari kerja.

ANALISIS

- 1) Persebaran penduduk Kabupaten Bantul sebagian besar bermukim di wilayah perdesaan yang mencapai sekitar 63,61% dan sisanya 36,39% tinggal di kawasan perkotaan (Kecamatan Bantul, Kasihan, Sewon, dan Banguntapan). Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap kebijakan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Jika di asumsikan pertumbuhan dalam jangka panjang rata-rata sebesar 1% per tahun, maka jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2030 diperkirakan akan mencapai kurang lebih 1.158.774 jiwa (hasil analisis).
- 2) Penduduk miskin di Kabupaten Bantul mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2007 sampai dengan akhir tahun 2009.
- 3) Secara kewilayahan pengangguran banyak dijumpai di wilayah sub-urban dan wilayah tengah Kabupaten Bantul. Dilihat dari komposisi penguasaan keterampilan penganggur terlihat bahwa sebagian terbesar penganggur belum memiliki ketrampilan spesifik yang siap untuk membuka usaha atau mencari kerja.

OUTPUT

- 1) Ketimpangan penyebaran penduduk di satu sisi wilayah perkotaan semakin mengalami peningkatan kepadatan penduduk, sedangkan di wilayah-wilayah perdesaan mengalami perpindahan penduduk menuju kota khususnya kelompok usia muda, produktif, dan lebih terdidik.

Disisi lain wilayah perdesaan mengalami kekurangan tenaga kerja dan sumberdaya manusia yang potensial untuk pembangunan wilayah, sehingga ke depan peningkatan sumberdaya manusia mutlak dilakukan di wilayah-wilayah perdesaan.

- 2) Pemenuhan hak-hak dasar bagi penduduk miskin melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, budaya, ekonomi, infrastruktur dan birokrasi yang memadai.
- 3) Peningkatkan kesempatan kerja melalui persiapan tenaga kerja berkualitas serta mendorong tenaga kerja mandiri untuk berpartisipasi di berbagai sektor ke depan perlu dilakukan dengan program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, program peningkatan kesempatan kerja, dan program perlindungan pengembangan lembaga ketengakerjaan.

2.1.4 Ekonomi dan Sumber Daya Alam

2.1.4.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan perekonomian daerah secara umum dapat dilihat melalui indikator perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB per kapita. Pertumbuhan PDRB selama lima tahun terakhir (tahun 2005 sampai dengan 2009), berdasarkan harga berlaku dan harga konstan tahun 2000, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 8: Pertumbuhan PDRB Tahun 2005–2009 Menurut Harga Konstan Th.2000

No	Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan	
		Nilai (Juta Rp)	Δ Pertumbuhan	Nilai (Juta Rp)	Δ Pertumbuhan
1	2005	4.903.668	15.69 %	3.234.172	4,99 %
2	2006	5.722.466	16.69 %	3.299.646	2,02 %
3	2007	6.409.648	12.00%	3.448.949	4,52%
4	2008	7.417.980	15.73%	3.618.060	4.90%
5	2009	7.993.176	7.75 %	3.785.567	4.63%

Sumber data: BPS Kabupaten Bantul, tahun 2010

Dengan melihat data perkembangan PDRB tersebut maka dapat diartikan kondisi makro ekonomi Kabupaten Bantul berdasarkan harga konstan, PDRB Kabupaten Bantul pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul mengalami perlambatan dibandingkan pada tahun 2008. Perlambatan ini terjadi karena sektor penggalian dan sektor pembangunan/konstruksi mengalami kontraksi yang cukup signifikan akibat telah selesainya program rekonstruksi dan rehabilitasi pasca gempa bumi di Kabupaten Bantul. Namun demikian sektor-sektor lainnya mampu tumbuh cepat.

2.1.4.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Pada lima tahun terakhir pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Bantul berdasarkan harga konstan mengalami pertumbuhan dari 2,74% pada tahun 2005 menjadi 3,18% pada tahun 2009. PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku pada tahun 2005 adalah sebesar Rp5.628.617,-, meningkat menjadi Rp 8.664.070,- pada tahun 2009. Sementara PDRB per kapita berdasarkan harga konstan pada tahun 2005 adalah sebesar Rp 3.712.307,-, meningkat menjadi Rp 4.103.303,- pada tahun 2009. Perkembangan PDRB per kapita selama lima tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:

Tabel 9: Perkembangan PDRB per Kapita Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2000 di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009

No	Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan	
		Nilai (Juta Rp)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Juta Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2005	5,628,617	13.20	3,712,307	2.74
2	2006	6,472,748	15.00	3,732,268	0.54
3	2007	7,145,697	10.40	3,845,008	3.02
4	2008	8,153,311	14.10	3,976,712	3.43
5	2009	8,664,070	6.26	4,103,303	3.18

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, tahun 2010

2.1.4.3 Distribusi Pendapatan

Koefisien Gini Ratio merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Bantul. Koefisien Gini Ratio dapat digunakan sebagai bahan untuk mengevaluasi dan menganalisa pembangunan di bidang ekonomi, apakah pembangunan yang telah dilaksanakan dinikmati oleh kelompok penduduk berpenghasilan tinggi, berpenghasilan menengah, atau kelompok penduduk berpenghasilan rendah. Besarnya angka Gini Ratio pada tahun 2008 adalah 0,2536. Selanjutnya koefisien Gini Kabupaten Bantul pada tahun 2009 adalah 0,2473, yang jika dibandingkan dengan tahun 2005 menunjukkan penurunan pemerataan pendapatan.

Tabel 10: Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Bantul Tahun 2004-2009

NO	TAHUN	GINI RATIO	% Δ
1	2005	0.2261	4.77
2	2006	0.2569	13.62
3	2007	0.2474	-3.7
4	2008	0.2536	2.51
5	2009	0.2473	-2.48

Sumber: BPS Kabupaten Bantul , tahun 2010

2.1.4.4 Investasi

Investasi memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan, karena menentukan dinamika pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik, maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien. Kondisi ini telah dirasakan oleh investor, terbukti dengan masuknya investor dalam negeri maupun asing.

Perkembangan investasi di Kabupaten Bantul menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Kondisi ini tercermin dari nilai rata-rata investasi yang meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini

merupakan hasil dari upaya pemerintah dalam menciptakan iklim yang kondusif, misalnya penyederhanaan prosedur birokrasi, perbaikan /pengembangan infrastruktur pasca gempa, sistem informasi serta promosi investasi daerah yang lebih intentif serta membuat pelayanan perijinan satu pintu.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2005-2009) telah masuk beberapa investor yang menanamkan modalnya. Investor ini bergerak dalam berbagai bidang usaha. Perkembangan jumlah investor dan nilai investasi terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 11: Perkembangan Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri Serta Nilai Investasi di Kabupaten Bantul Tahun 2005 – 2009

No	Tahun	Jenis Investasi	Jumlah Investor	Nilai Investasi
1	2005	PMA (\$)	40	21.455,598
		PMDN (Rp.juta)	13	174.591,865
2	2006	PMA (\$)	41	21.855,598
		PMDN (Rp.juta)	13	174.591,865
3	2007	PMA (\$)	48	25.585,598
		PMDN (Rp.juta)	14	178.591,865
4	2008	PMA (\$)	53	27.635,598
		PMDN (Rp.juta)	14	178.591,865
5	2009	PMA (\$)	54	28.935,598
		PMDN (Rp. juta)	14	178.591,865

Sumber: Disperindagkop Kabupaten Bantul, tahun 2010

Berdasarkan tabel tersebut di atas, terlihat bahwa sejak tahun 2005 hingga 2009 terjadi kenaikan jumlah investor dan nilai investasi yang masuk.

Investasi swasta, terdiri atas penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Investasi pemerintah, berupa investasi pembangunan yang berasal melalui pos pengeluaran pembangunan dalam APBD. Pemerintah Kabupaten Bantul juga menginvestasikan dananya melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pembangunan seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 12: Investasi Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009

No	Tahun	Investasi Pemerintah
1	2005	417.798.070.033,78
2	2006	545.132.135.933,38
3	2007	676.835.481.623,06
4	2008	1.045.423.303.527,78
5	2009	903.767.000.429,01
Jumlah		2.912.120.509.923,95

Sumber: Dinas PKAD Kabupaten Bantul, tahun 2010

Secara swadaya masyarakat telah ikut serta dalam membangun daerahnya masing-masing yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian daerah melalui investasi masyarakat. Secara garis besar investasi masyarakat ditanamkan dalam kegiatan pembangunan infrastruktur seperti jalan, saluran irigasi, sarana perdagangan. Data perkembangan investasi masyarakat terlihat pada Tabel berikut :

Tabel 13: Perkembangan Investasi Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2005 – 2009

No	Tahun	Investasi masyarakat
1	2005	44.655.700.000
2	2006	40.754.500.000
3	2007	63.062.300.000
4	2008	76.635.400.000
5	2009	79.045.700.000
Jumlah		304.153.600.000

Sumber: Bagian AP Setda Kabupaten Bantul, tahun 2010

Berikut merupakan beberapa potensi dan peluang investasi yang ada di Kabupaten Bantul tahun 2005 – 2009.

Tabel 14: Potensi dan Peluang Investasi di Kabupaten Bantul Tahun 2005 – 2009

NO.	BIDANG	PELUANG INVESTASI	LOKASI
1	Pariwisata	<p>a. Pengelolaan obyek, Penginapan, Rumah makan, Wisata Buatan, Wisata minat khusus outbound/trekking/jelajah wisata</p> <p>b. Pengembangan Kawasan Gabusan Manding Tembi (GMT) dan Kajigelem dan Kajigelem, Desa Wisata berbasis masyarakat (kerajinan, budaya, pertanian, kuliner), Pasar Seni</p>	<p>ODTW Pantai Parangtritis, Pandansimo, Samas, Goa Cerme, Goa Slarong</p> <p>Gabusan Manding Tembi (Kec. Bantul & Sewon)</p>

NO.	BIDANG	PELUANG INVESTASI	LOKASI
		<p>Gabusan, Museum Gempa, Watterboom</p> <p>c. Kebun Buah Mangunan</p> <p>d. Pengembangan Desa Wisata berbasis masyarakat (pertanian, pedesaan, budaya, kerajinan, budaya, kuliner dll)</p>	<p>Kecamatan Dlingo</p> <p>Kasongan, Pundong, Karangtengah, Kebonagung, Tembi, Trimulyo, Canden, Wukirsari</p>
2	Industri	<p>a. Pengembangan kawasan industri dengan sisa lahan yang tersedia seluas 97,45 Ha. Pemanfaatan lahan (tanah kas desa) dengan sistim sewa (izin Gubernur DIY)</p> <p>b. Pabrik pakan ikan</p> <p>c. Pengolahan daging sapi / kambing</p> <p>d. Pabrik Pupuk Petroganik</p> <p>e. Pengolahan Cabe Merah Menjadi Saos Sambal</p> <p>f. Pengolahan Biji Jarak Pagar</p>	<p>Kawasan Industri Piyungan (Desa Srimulyo dan Sitimulyo)</p> <p>Kec. Banguntapan</p> <p>Kec. Banguntapan</p> <p>Kec. Sanden</p> <p>Kabupaten Bantul</p> <p>Kabupaten Bantul</p>
3	Pendidikan	<p>a. Pengembangan <i>Boarding School</i></p> <p>b. <i>Business Center</i></p> <p>c. Pengembangan Hotel Training</p> <p>d. Taman Wisata Pendidikan Energi dan Sumberdaya Mineral (termasuk wisata minat khusus):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Museum Energi dan Sumberdaya Mineral - Pusat Informasi Geowisata - Theater (cinema) atau Ruang Audio Visual - Wisata Lapangan, Auditorium, Gallery - Ruang Kreatif Anak-anak dan Taman Bermain Anak <p>e. Museum Gempa</p>	<p>Seluruh SMK</p> <p>Seluruh SMK</p> <p>SMKN I Sewon</p> <p>Bukit Kayangan Kecamatan Kretek</p> <p>Kecamatan Sewon</p>
4	Bidang Umum	<p>a. Inti Kawasan Bantul Kota Mandiri (BKM) peruntukannya : Perdagangan & Jasa, Perumahan & Permukiman, Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga, Industri Menengah & Ringan, Area Hijau (<i>Green Area</i>) untuk kegiatan lapangan golf, fasilitas kota, ruang publik, taman, perumahan super eksklusif</p> <p>b. <i>In Land Port</i></p>	<p>Kecamatan Pajangan, Kasihan, dan Bantul</p> <p>Kec. Sedayu</p>

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, tahun 2010 (diolah)

2.1.4.5 Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Tabel 15: Klasifikasi Koperasi di Kabupaten Bantul Tahun 2005 – 2009

No	Uraian	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Koperasi Aktif	274	242	246	278	322
2	Koperasi tidak Aktif	77	60	103	100	85
	Jumlah Koperasi	351	302	349	378	407

Sumber: Disperindagkop Kabupaten Bantul, tahun 2010

Turunnya jumlah koperasi aktif pada tahun 2006 disebabkan terjadinya gempa bumi. Mulai tahun 2007 jumlah koperasi aktif terjadi peningkatan, sedangkan jumlah koperasi tidak aktif terjadi penurunan, kondisi ini disebabkan karena berubahnya koperasi tidak aktif menjadi koperasi yang aktif. Hal ini merupakan dampak dari intervensi pemerintah dalam peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan pemberian atau pinjaman akses permodalan bagi koperasi.

Tabel 16: Jumlah Koperasi Menurut Jenis di Kabupaten Bantul Tahun 2005 – 2009

No	Uraian	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Induk Koperasi	3	3	3	3	3
2	Koperasi Primer	348	300	346	375	404
3	KUD	17	17	17	17	17

Sumber: Disperindagkop Kabupaten Bantul, tahun 2010

Jumlah induk koperasi sejak tahun 2005 sampai 2009 tidak mengalami perubahan, demikian juga dengan koperasi unit desa. Sejak tahun 2007 jumlah koperasi primer mengalami peningkatan.

2.1.4.6 Pertanian

Urusan pertanian yang dilaksanakan meliputi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Adapun Sasaran pembangunan pertanian adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian dengan mengutamakan penerapan teknologi tepat guna.

Sejak tahun 2007 – 2009 terjadi peningkatan produktivitas padi yang cukup signifikan (lihat Tabel 17) hal ini disebabkan oleh intervensi pemerintah untuk optimasi sarana dan prasarana pertanian.

Tabel 17: Perkembangan Luas Panen, Produksi Dan Produktivitas Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung, Kacang Tanah, Kedelai di Kabupaten Bantul Tahun 2005 – 2009

KOMODITAS		2005	2006	2007	2008	2009	KET.
Padi Sawah							
1	Luas Panen	25.081	24.655	25.681	25.089	28.258	ha
2	Produktivitas rata-rata (GKG)	58.67	59.08	62.22	66.46	65.27	ku/ha
3	Produksi (GKG)	147.139	145.654	159.787.2	166.737	184.439.97	ton
4	Produksi beras	92.911,85	92.053,33	100.687,28	105.377,78	116.566,06	ton
Padi Ladang							
1	Luas Panen	211	189	201	164	424	ha
2	Produktivitas rata-rata (GKG)	30.28	28.84	28.51	27.62	28.44	ton
3	Produksi (GKG)	639	545	573	453	1206	ton/ha
4	Produksi beras	402.57	434.35	360.99	285.39	759	
Jagung							
1	Luas Panen	5155	4976	5526	5739	6290	ha
2	Produksi (pipilan kering)	23057	17867	26865	30117	37620.49	ton
3	Produktivitas	4.47	3.59	4.86	5.25	5.981	Ku/ha
Kacang tanah							
1	Luas Panen	5709	5194	4680	3701	3677	ha
2	Produksi (wose kering)	5605	4903	4912	4568	4043	ton
3	Produktivitas	0.98	0.94	1.05	1.23	1.1	ton/ha
Kedelai							
1	Luas Panen	4177	3874	4197	5290	4380	ha
2	Produksi (wose kering)	5444	5127	5801	6150	7309	ton
3	Produktivitas	1.3	1.32	1.38	1.16	1.67	ton/ha

Sumber: Dispertahut Kabupaten Bantul, tahun 2010

Peningkatan produksi tidak lepas dari tersedianya sarana dan prasarana pertanian, antara lain penggunaan benih berlabel, pemupukan berimbang, pengelolaan hama terpadu serta tersedianya sarana irigasi yang memadai. Sejak tahun 2005 di Kabupaten Bantul telah dirintis produksi benih oleh Pemerintah sebagai embrio terbentuknya *Bantul Seed Center*. Adapun produksi benih padi secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18: Produksi Benih Padi Berlabel Bantul Seed Center di Kabupaten Bantul Tahun 2005 – 2009

NO	Benih Berlabel	Tahun					Ket
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	FS	17,50	462,92	1.720,50	720,00	12.498	kg
2	SS	28,92	20,66	406,19	12.233,99	241.723	kg
3	ES	-	-		2,96	-	kg
	Jumlah	46,42	483,58	2.126,69	12.956,95	254.221	kg

Sumber: Dispertahut Kabupaten Bantul, tahun 2010

Produksi benih padi berlabel di *Bantul Seed Center* menunjukkan peningkatan selama kurun waktu lima tahun terakhir. Benih yang diproduksi terdiri dari benih dasar/ *Foundation Seed* (FS), benih stok/ *Stock Seed* (SS) dan benih sebar/ *Extention Seed* (ES). Kebutuhan calon benih selain dicukupi oleh Balai Benih Pertanian juga dari kelompok-kelompok penangkar benih yang tersebar di Kabupaten Bantul terdapat 20 kelompok penangkar benih padi.

Kegiatan perbenihan merupakan suatu mata rantai kegiatan yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan terpadu mulai dari benih penjenis, benih dasar, benih pokok, sampai pada benih sebar. Oleh karena itu perlu dukungan dari lembaga-lembaga serta seluruh *stakeholders* lainnya yang bergerak dibidang perbenihan, agar secara terintegrasi membangun sistem perbenihan di Kabupaten Bantul sejak mulai sub sistem penelitian dan pengembangan benih, sub sistem produksi dan distribusi benih sub sistem pengawasan mutu benih hingga sub sistem penunjang lainnya (permodalan, SDM, sarana prasarana) sehingga menjadi kian mantap guna mengatasi permasalahan yang ada.

Selain itu, untuk tetap menjaga kelestarian alam lingkungan dan rehabilitasi lahan kritis maka digalakan program reboisasi dan penghijauan. Kegiatan tersebut dilakukan kegiatan berupa pembuatan tanaman hutan dengan cara penanaman pohon-pohon yang dilaksanakan di dalam kawasan hutan (hutan negara), sedangkan kegiatan penghijauan dilakukan upaya memulihkan atau memperbaiki kembali keadaan lahan kritis di luar kawasan hutan agar dapat berfungsi sebagai media produksi

dan pengatur tata air yang baik serta mempertahankan dan meningkatkan daya guna lahan sesuai dengan peruntukannya.

Kegiatan reboisasi dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi DIY, sedangkan kegiatan penghijauan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Bantul. Kegiatan reboisasi dilaksanakan di dalam kawasan hutan (hutan negara), sedangkan kegiatan penghijauan dilakukan di luar areal kawasan hutan (hutan negara) atau di lahan milik masyarakat/petani (hutan rakyat).

Tabel 19: Luas Lahan Kritis dan Rehabilitasi Hutan Rakyat di Kabupaten Bantul Tahun 2005 - 2009

Jenis Kegiatan	Tahun				
	2005	2006	2007	2008	2009
Luas Lahan Kritis (ha)	1.284,41	1.167,41	986	877	431,5
Rehabilitasi Hutan Rakyat (ha)	7.984	8.007	8.252	8.656	8.545

Sumber: Dispertahut Kabupaten Bantul, tahun 2010

Secara keseluruhan jumlah lahan kritis di Kabupaten Bantul dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 mengalami penurunan yang cukup signifikan, terlihat luas lahan kritis pada tahun 2005 sebesar 1.284,41 ha berkurang menjadi 431,5 ha. Ini membuktikan bahwa penanganan lahan kritis di Kabupaten Bantul menunjukkan adanya keseriusan dalam rehabilitasi hutan rakyat, terlihat bahwa kegiatan rehabilitasi hutan rakyat di Kabupaten Bantul juga mengalami peningkatan. Tahun 2005 rehabilitasi hutan rakyat dilakukan seluas 7.984 ha dan terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, sampai pada tahun 2009 sudah mencapai seluas 8.545 ha. Perubahan penggunaan lahan kritis tersebut dilakukan dengan merubah kondisi lahan kritis menjadi lahan pertanian dengan menggunakan berbagai macam kegiatan pertanian dan perkebunan, salah satunya dengan melakukan penanaman tanaman keras dan tanaman buah-buahan, seperti yang dilakukan di wilayah Kecamatan Dlingo. Kecamatan Dlingo yang dulunya wilayah perbukitan sekarang sudah

menjadi kebun buah yang sudah menghasilkan dan menjadi salah satu objek wisata tanaman buah di Kabupaten Bantul, dan. Selain itu wilayah lereng-lereng pegunungan mulai dilakukan budidaya pertanian lahan kering dan mengandalkan sistem irigasi tadah hujan. Di Kecamatan Dlingo juga akan dikembangkan Sistem Pertanian Terpadu (*Integrated Farming*) yaitu sistem usaha mengelola tanaman (pangan, hortikultura, perkebunan), ternak, ikan dalam satu unit lahan/wilayah/kawasan secara efisiensi dan hemat energi.

2.1.4.7 Perindustrian

Lokasi dan jenis industri yang tersebar di Kabupaten Bantul cukup bervariasi. Jenis industri yang ada meliputi industri logam mesin, industri kimia, aneka industri, industri hasil pertanian, dan kehutanan. Secara umum industri yang terdapat di Kabupaten Bantul merupakan industri kecil, sedangkan untuk industri besar jumlahnya tidak banyak.

Tabel 20: Perkembangan Ekspor di Kabupaten Bantul Tahun 2008 – 2009

No	Uraian	2008 (000)	2009 (000)
1	Volume Ekspor (kg)	7.027,12	6.295,71
2	Nilai Ekspor (US \$)	20.548,23	24.041,48
3	Jumlah Negara Tujuan	48	50
4	Macam Komoditi	29	49

Sumber: Disperindagkop Kabupaten Bantul, tahun 2010

Secara keseluruhan volume ekspor dari tahun 2008 ke tahun 2009 di Kabupaten Bantul mengalami penurunan 731,41 kg, namun demikian nilai ekspornya justru mengalami kenaikan US \$ 3.493,25. Ini menunjukkan bahwa volume ekspor yang sedikit belum tentu memberikan nilai ekspor yang rendah. Sedangkan untuk jumlah negara tujuan terjadi penambahan 2 negara, namun untuk macam atau jenis komoditi terjadi peningkatan dari 29 menjadi 49 macam unit komoditi, hal ini naik lebih dari 90%. Peningkatan macam komoditi ini menunjukkan bahwa di Kabupaten

Bantul dalam kurun waktu satu tahun perkembangan komoditi mengalami diversifikasi yang besar.

Tabel 21: Perkembangan Sektor Industri Kecil, Menengah dan Besar di Kabupaten Bantul Tahun 2008 dan 2009

No	Sektor Industri	TAHUN	
		2008	2009
1	Industri Kecil		
	Unit Usaha (UU)	17,937	18.014
	Tenaga Kerja (Orang)	80,468	80.968
	Nilai Produksi (Rp.000)	358.501.270	365.087.700
	Nilai Tambah (Rp.000)	721.321.400	783.503.680
	Nilai Investasi (Rp.000)	450.130.730	494.735.020
2	Industri Menengah		
	Unit Usaha (UU)	10	82
	Tenaga Kerja (Orang)	102	183
	Nilai Produksi (Rp.000)	1.083.561	3.212.000
	Nilai Tambah (Rp.000)	3.058.849	6.071.860
	Nilai Investasi (Rp.000)	1.276.423	2.836.460
3	Industri Besar		
	Unit usaha	8	6
	Tenaga Kerja (Orang)	978	301
	Nilai Produksi (Rp.000)	2.546.221	49.407.200
	Nilai Tambah (Rp.000)	11.674.520	31.217.880
	Nilai Investasi (Rp.000)	5.365.616	13.866.200

Sumber: Disperindagkop Kabupaten Bantul, 2010

Komoditas terpilih industri kecil diklasifikasikan menjadi tiga golongan yaitu komoditas unggulan, komoditas andalan, dan komoditas yang diunggulkan. Penentuan komoditas industri terpilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- 1) **Komoditas unggulan:** pemakaian bahan baku lokal $\geq 70\%$, menyerap tenaga kerja (padat karya), nilai ekspor \geq US\$ 1 juta, tujuan ekspor ≥ 3 negara, pertumbuhan ekspor $> 10\%$ selama lima tahun terakhir;
- 2) **Komoditas andalan:** pemakaian bahan baku lokal 60-69%, menyerap tenaga kerja (padat karya), nilai ekspor $>$ US\$ 0.5-1 juta, tujuan ekspor = dua negara, pertumbuhan ekspor 5-10% selama 5 tahun terakhir;

- 3) **Komoditas yang diunggulkan:** pemakaian bahan baku lokal 50-59%, menyerap tenaga kerja (padat karya), nilai ekspor < US\$ 0.5 juta, tujuan ekspor < 1 negara, pertumbuhan ekspor < 5 selama lima tahun terakhir.

Beberapa hal yang perlu dicatat dalam sektor industri adalah kurangnya daya saing hasil industri pada pasar internasional, sementara pasar domestik kurang berkembang akibat kondisi perekonomian domestik yang kurang stabil. Peningkatan daya saing dapat diintervensi melalui penyediaan sarana penunjang produksi (bahan, modal, teknologi), kemampuan inovasi desain, *finishing dan packing* serta perluasan jaringan pemasaran.

Tabel 22: Ekspor Komoditas Unggulan di Kabupaten Bantul Tahun 2009

Kel Ind.	KLUI	Lokasi Kec	Bhn baku lokal (%)	Tenaga kerja (orang)	Ekspor				
					Nilai (US\$ jt)	% total ekspor (2009)	Growth (%)	Negara tujuan	Trend
Unggulan Mebel kayu	33211	Sewon Bambanglipuro Dlingo Srandakan Pleret Kasih Piyungan	100	1.772	1,4	39	187	Australia, USA, Belanda, Belgia	naik
Keramik	36190	Kasih Undong Sedayu	90	4157	1,2	60	387	Australia, Selandia Baru, Belanda, Belgia	naik
Andalan Kerajinan kayu	39140	Pajangan Sewon	100	498	0,5	30	19	Australia, Selandia Baru, Belanda	naik
Tatah sungging	39060	Sewon Imogiri Kasih	90	679	0,5	40	20	Australia Kanada USA	naik
Diunggulkan Bambu	33131	Dlingo	100	1.307	0,15	30	12	Belanda Perancis	Naik
Emping mlinjo	31252	Bantul Banguntapan	100	732	0,3	10	12	Belanda	Naik

Sumber: Disperindagkop Kabupaten Bantul, tahun 2010

2.1.4.8 Pariwisata

Potensi ekonomi yang sangat menonjol dalam memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sektor pariwisata, meliputi; obyek wisata alam, religius, dan budaya. Kawasan pantai selatan yang

dikelompokkan menjadi tiga zona dikembangkan sesuai dengan peruntukannya yaitu sebagai kawasan wisata alam pantai, wisata budaya/religius, dan wisata rekreasi, wisata hutan pantai, dan pengembangan perikanan. Sektor pariwisata perlu dikembangkan menjadi sektor pariwisata terpadu, berbasis pedesaan. Sektor dimaksud meliputi: pertanian, industri kecil, dan jasa sehingga terdapat saling keterkaitan antar sektor.

Tabel 23: Lokasi Obyek Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2009

No.	Kecamatan	Lokasi Obyek Wisata	Nama Obyek Wisata
1	Kretek	Desa Parangtritis	- Pantai Parangtritis
			- Pantai Parangkusumo
			- Pantai Depok
			- Cepuri Parangkusumo
			- Gumuk Pasir
			- Lab. Geospasial
			- Makam Syeh Bela Belu
			- Makam Syeh Maulana Maghribi
2	Sanden	Desa Sri Gading	- Pantai Samas
			- Pantai Patehan
3	Srandakan	Desa Poncosari	- Pantai Pandansimo - Pantai Kwaru
4	Pajangan	Desa Guwosari	- Goa Selarong
		Ds. Sendangsari	- Desa Wisata Kreet
5	Imogiri	Ds. Selopamiro	- Goa Cerme
		Desa Girirejo	- Kerajinan Keris
			- Makam Pangeran Pekik
		Desa Wukirsari	- Makam Seniman Girisapto
			- Kerajinan Batik
			- Tatah Sungging
		Ds. Kebonagung	- Makam Raja-Raja Mataram - Kerajinan Tatah Sungging - Desa Wisata Kebonagung
6	Bantul	Desa Trirenggo	- KR Tirtatamansari
		Desa Sabdodadi	- Desa Wisata Manding
7	Pundong	Desa Seloharjo	- Goa Jepang
			- Kerajinan Keramik
8	Dlingo	Desa Mangunan	- Goa Gajah
			- Kebun Buah Mangunan
9	Sewon	Desa Timbulharjo	- Pasar Seni Gabusan
			- Desa Wisata Tembi

10	Kasih	Desa Bangunjiwo	- Desa Wisata Kasongan
			- Kerajinan Tatah Batu Lemahdadi
			- Kerajinan Tatah Sungging
11	Pandak	Desa Wijirejo	- Kerajinan Batik
12	Banguntapan	Desa Baturetno	- Taman Rekreasi Air Balong
			- Museum Wayang Kekayon

Sumber : Disbudpar Kabupaten Bantul, tahun 2010

Dari jenis obyek wisata yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Bantul terdiri dari jenis obyek wisata alam, wisata pantai, wisata religi, wisata budaya, wisata kuliner, desa wisata, dan wisata-wisata lainnya. Dari jenis obyek wisata tersebut di beberapa wilayah keberadaannya sudah terdapat fasilitas pendukung wisata. Untuk menunjang keberadaan obyek wisata diperlukan fasilitas pendukung lainnya sehingga kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung lebih terjamin.

Tabel 24: Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2004 – 2009

Jumlah	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Domestik	1.506.605	1.405.552	1.054.180	1.007.838	1.284.789	1.407.535
Asing	30.747	50.050	20.000	41.556	26.220	28.725
Jumlah	1.537.352	1.455.602	1.074.180	1.049.394	1.311.009	1.436.260
Pertumbuhan		-5,32	-26,20	-2,31	24,93	9,55

Sumber: Disbudpar Kabupaten Bantul, tahun 2010

Pertumbuhan kunjungan wisata di Kabupaten Bantul dari tahun 2005 sebesar -5,32 di tahun 2006 menjadi -26,20, hal ini disebabkan karena bencana gempa bumi yang melanda Kabupaten Bantul menjadikan banyak wisatawan membatalkan untuk mengunjungi wilayah Bantul. Namun pada tahun 2007 pertumbuhannya menurun menjadi -2,31 ini menunjukkan peningkatan kunjungan wisata ke Bantul setelah pasca gempa bumi, lebih-lebih pada tahun 2008 pertumbuhan meningkat sangat signifikan sebesar 24,93 dan di akhir tahun juga meningkat sebesar 9,55. Ini secara umum di tahun-tahun ke depan pertumbuhan kunjungan wisata akan diprediksi meningkat terus.

2.1.4.9 Bahan Galian

Kabupaten Bantul memiliki beberapa sumber bahan galian Golongan C antara lain; batu, pasir, lempung, dan tanah. Saat ini Kabupaten Bantul dijadikan wilayah tujuan oleh beberapa pengusaha yang bergerak dalam kegiatan eksploitasi Golongan C, khususnya tanah urug. Kondisi ini disebabkan semakin sulitnya untuk mendapatkan ijin eksploitasi tanah urug di daerah lain. Sampai saat ini permasalahan penambangan di Kabupaten Bantul belum bisa tertangani secara baik, karena beberapa faktor antara lain; belum adanya perda penambangan, pemahaman masyarakat terhadap fungsi kawasan lindung masih kurang, dan kepedulian pengusaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan sangat rendah. Selain eksploitasi tanah urug, permasalahan penambangan juga terjadi pada kegiatan penambangan pasir di badan atau bantaran sungai dan pantai, misalnya di sepanjang Sungai Progo, Sungai Opak, Pantai Samas dan Pantai Pandansimo.

2.1.4.10 Pencemaran udara

Kualitas udara di Kabupaten Bantul secara umum masih cukup baik. Hal ini terbukti dari hasil pemantauan kualitas udara yang dilakukan oleh BLH Kabupaten Bantul yang menunjukkan bahwa beberapa parameter pencemaran udara seperti SO₂, partikel debu, dan kebisingan masih berada di bawah nilai ambang batas yang ditentukan. Namun demikian khusus di wilayah perbatasan seperti di perempatan sepanjang Ring Road Selatan, Jalan Parangtritis, Jalan Imogiri, dan Jalan Gedong Kuning serta Jalan Bantul menunjukkan beberapa parameter sudah di atas nilai ambang batas, khususnya HC, CO, NO₂, dan Pb. Kondisi ini cenderung selalu meningkat dari waktu ke waktu sejalan dengan peningkatan volume lalu lintas dan kecenderungan hilangnya jalur hijau serta berubahnya fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi pemukiman, industri dan kegiatan lainnya.

2.1.4.11 Konservasi SDA

- 1) **Sumberdaya lahan:** untuk wilayah yang memiliki topografi berbukit, maka kecenderungan degradasi lahan yang berkembang adalah munculnya lahan kritis yang disertai ancaman bencana longsor dan kekeringan. Sedangkan pada daerah pantai pengaruh abrasi masih relatif kecil;
- 2) **Sumberdaya air:** untuk air permukaan, debit rata-rata air di muara DAS Progo sebesar 150 m³/detik, sedangkan DAS Opak memiliki debit rata-rata sebesar 50 m³/detik. Kecenderungan terjadi penurunan kualitas maupun kuantitas air permukaan disebabkan oleh penurunan debit mata air, sedangkan penurunan kualitas banyak dipengaruhi oleh aktivitas pembuangan sampah. Untuk air tanah, terkait dengan laju penutupan daerah tangkapan air akibat alih fungsi lahan dan peningkatan lahan kritis, menyebabkan kuantitas air tanah semakin menurun. Sedangkan dari sisi kualitas air tanah terdapat kecenderungan adanya penurunan kualitas akibat pencemaran limbah yang berasal dari industri maupun aktivitas domestik.
- 3) **Flora dan Fauna:** akibat adanya pemanfaatan kayu yang tidak diimbangi dengan penanaman, berakibat pada penurunan keanekaragaman jenis flora. Penurunan populasi satwa liar semakin terasa menurun (seperti jenis burung, ular, penyu) akibat desakan pertumbuhan penduduk dan pengembangan wilayah.

ANALISIS

- 1) PDRB Kabupaten Bantul pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul mengalami perlambatan dibandingkan pada tahun 2008. Perlambatan ini terjadi karena sektor penggalian dan sektor bangunan/konstruksi mengalami kontraksi yang cukup signifikan akibat telah selesainya program rekonstruksi dan rehabilitasi paska gempa bumi di Kabupaten Bantul.

- 2) Pada lima tahun terakhir pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Bantul berdasarkan harga konstan mengalami pertumbuhan dari 2,74% pada tahun 2005 menjadi 3,18% pada tahun 2009.
- 3) Distribusi pendapatan di Kabupaten Bantul pada tahun 2009 cenderung rendah jika dibandingkan dengan tahun 2005.
- 4) Perkembang investasi yang meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, hal ini merupakan hasil dari upaya pemerintah dalam menciptakan iklim yang kondusif, misalnya penyederhanaan prosedur birokrasi, perbaikan/pengembangan infrastruktur pasca gempa, sistem informasi serta promosi investasi daerah yang lebih intensif serta membuat pelayanan perijinan satu pintu.
- 5) Produktivitas usaha koperasi dan UMKM, di Kabupaten Bantul meningkat, serta diikuti dengan meningkatnya sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi UMKM/IKM, meningkatnya kualitas dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan UKM salah satunya disebabkan akses permodalan.
- 6) Produksi benih padi berlabel di *Bantul Seed Center* (BSC) menunjukkan peningkatan selama kurun waktu lima tahun terakhir. Benih yang diproduksi terdiri dari benih dasar, benih stok dan benih sebar, kondisi tersebut karena kebutuhan calon benih selain dicukupi oleh Balai Benih Pertanian juga dari kelompok-kelompok penangkar benih yang tersebar di Kabupaten Bantul.
- 7) Jumlah lahan kritis dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 mengalami penurunan yang cukup signifikan, terlihat luas lahan kritis pada tahun 2005 sebesar 1.284,41 ha berkurang menjadi 431,5 ha. Ini membuktikan bahwa penanganan lahan kritis menunjukkan adanya keseriusan dalam rehabilitasi hutan rakyat, terlihat bahwa kegiatan rehabilitasi hutan rakyat juga mengalami peningkatan.
- 8) Volume ekspor dari tahun 2008 ke tahun 2009 mengalami penurunan 731,41 kg, namun demikian nilai ekspornya justru mengalami kenaikan US \$ 3.493,25.
- 9) Jenis obyek wisata alam, wisata pantai, wisata religi, wisata budaya, wisata kuliner dan wisata-wisata lainnya tersebar di wilayah Kabupaten

Bantul, dari jenis obyek wisata tersebut di beberapa wilayah keberadaannya sudah terdapat fasilitas pendukung wisata.

Pengembangan obyek wisata lain yang berpotensi diantaranya Pantai Gua Cemara (Sanden), Pantai Pandansimo Baru (Srandakan), Kebun Durian Rakyat, Agrowisata Argorejo (Sedayu), Petilasan Ki Ageng Mangir (Pajangan), Makam Sewu, Watu Gilang (Pandak), Candi Maria (Bambanglipuro), Kuliner, Museum Purbakala (Pleret), Arena Bermain Shoot Gun (Banguntapan), Bukit Hargodumilah, Jolosutro, Kid Fun (Piyungan) dll.

- 10) Sumber bahan galian Golongan C antara lain; batu, pasir, lempung, dan tanah. Saat ini Kabupaten Bantul dijadikan wilayah tujuan oleh beberapa pengusaha yang bergerak dalam kegiatan eksploitasi Golongan C, khususnya tanah urug. Kondisi ini disebabkan semakin sulitnya untuk mendapatkan ijin eksploitasi tanah urug di daerah lain.
- 11) Kualitas udara secara umum masih cukup baik, namun di wilayah perbatasan seperti di perempatan sepanjang Ring Road Selatan, Jalan Parangtritis, Jalan Imogiri, dan Jalan Gedong Kuning serta Jalan Bantul menunjukkan beberapa parameter sudah di atas nilai ambang batas.
- 12) Konservasi SDA untuk wilayah yang memiliki topografi berbukit, maka kecenderungan degradasi lahan adalah munculnya lahan kritis yang disertai ancaman bencana longsor dan kekeringan, sedangkan pada daerah pantai pengaruh abrasi masih relatif kecil. Terkait dengan penutupan daerah tangkapan air akibat alih fungsi lahan dan peningkatan lahan kritis menyebabkan kuantitas air tanah semakin menurun. Penurunan populasi satwa liar (seperti jenis burung, ular, dan penyu) semakin terasa akibat desakan pertumbuhan penduduk dan pengembangan wilayah.

OUTPUT

- 1) Setelah selesainya program rekonstruksi dan rehabilitasi pasca gempa bumi, diprediksikan sektor-sektor lapangan usaha mampu tumbuh cepat, seperti pertanian, perdagangan dan jasa.
- 2) Peningkatan PDRB telah meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat, namun secara keseluruhan perlu adanya upaya yang dapat mensejahterakan masyarakat.
- 3) Peningkatan distribusi pendapatan di Kabupaten Bantul ke depan diharapkan mampu meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah.
- 4) Jenis usaha jasa perdagangan, mebel, keramik, tekstil, bambu, rotan, jasa wisata, kerajinan dan kulit diprediksikan untuk usaha 20 – 25 tahun ke depan masih memiliki potensi investasi yang menjanjikan, hal ini dikarenakan Kabupaten Bantul memiliki produk yang menjadi unggulan untuk dapat di ekspor baik domestik maupun manca negara.
- 5) Perkembangan Koperasi dan UMKM ke depan diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan UKM sehingga nantinya dapat tercipta masyarakat yang berjiwa wirausaha (*entrepreneur*) tinggi dan mampu mengembangkan potensi serta sumber daya yang ada.
- 6) *Bantul Seed Center* yang telah bekerjasama dengan beberapa kelompok tani penangkar benih, ke depan diharapkan produksi benih padi dapat diatur sesuai kebutuhan serta jaringan distribusi benih padi lebih terfokus dan tidak terlalu panjang, sedangkan kegiatan penghijauan harus terus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Bantul serta kegiatan reboisasi dilaksanakan di dalam kawasan hutan (hutan negara), sedangkan kegiatan penghijauan dilakukan di luar areal kawasan hutan (hutan negara) atau di lahan milik masyarakat/petani (hutan rakyat).
- 7) Jenis industri yang ada meliputi industri logam mesin, industri kimia, aneka industri, industri hasil pertanian, dan kehutanan. Secara umum industri merupakan industri kecil yang di harapkan dapat lebih eksis,

sedangkan untuk industri besar jumlahnya tidak banyak, sehingga perlu dikembangkan di masa yang akan datang.

- 8) Penambahan fasilitas obyek yang telah dilakukan pada sebuah kawasan wisata belum dapat memenuhi kebutuhan/fasilitas umum. Kurang berimbangannya antara kontribusi PAD pada sebuah kawasan wisata dibandingkan dengan investasi menjadi salah satu penyebab lambatnya perkembangan kawasan wisata. Oleh karena itu peran serta dunia usaha dan masyarakat perlu ditingkatkan.
- 9) Sebagian besar kegiatan penambangan yang dilakukan belum memperhatikan aspek lingkungan dan bahkan merusak lingkungan karena melakukan penggalian di daerah/kawasan lindung bawahan. Dalam jangka panjang akan merusak ekosistem dan sistem hidrologis air tanah, sehingga perlu adanya penyusunan perda penambangan, pemahaman masyarakat terhadap fungsi kawasan lindung, dan penegakan hukum serta kepedulian pengusaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan.
- 10) Peningkatan volume lalu lintas perlu diimbangi dengan pembuatan jalur hijau sepanjang jalan-jalan utama. Untuk menghindari pencemaran udara pelaksanaan uji emisi bagi kendaraan sangat diperlukan.
- 11) Konservasi Sumber Daya Alam dilakukan melalui penghijauan dan penanaman kembali daerah-daerah yang di daerah rawan longsor dan penanaman jenis tanaman yang dapat menahan abrasi di pantai. Untuk mempertahankan populasi satwa liar diperlukan daerah perlindungan dan pengembangbiakan satwa liar.

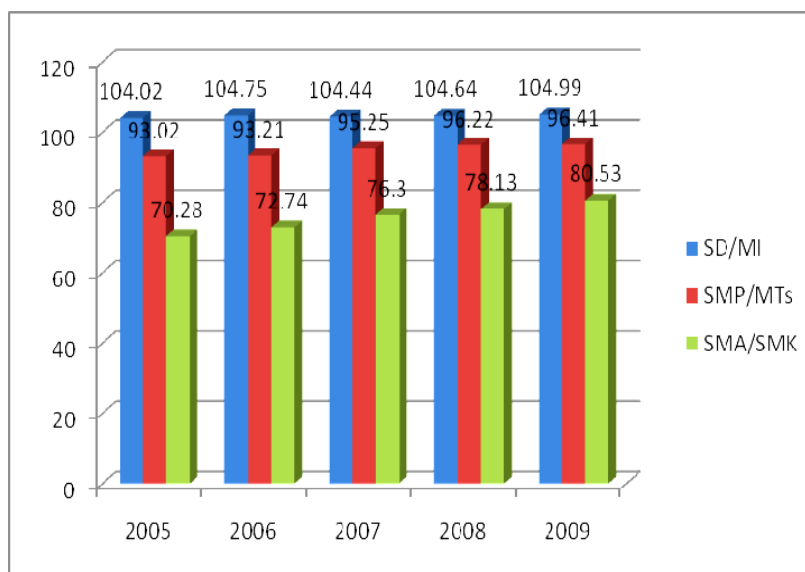
2.1.5 Sosial Budaya dan Politik

INPUT

2.1.5.1 Pendidikan

Keberhasilan pembangunan pendidikan dapat diketahui dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) seperti terlihat pada grafik berikut:

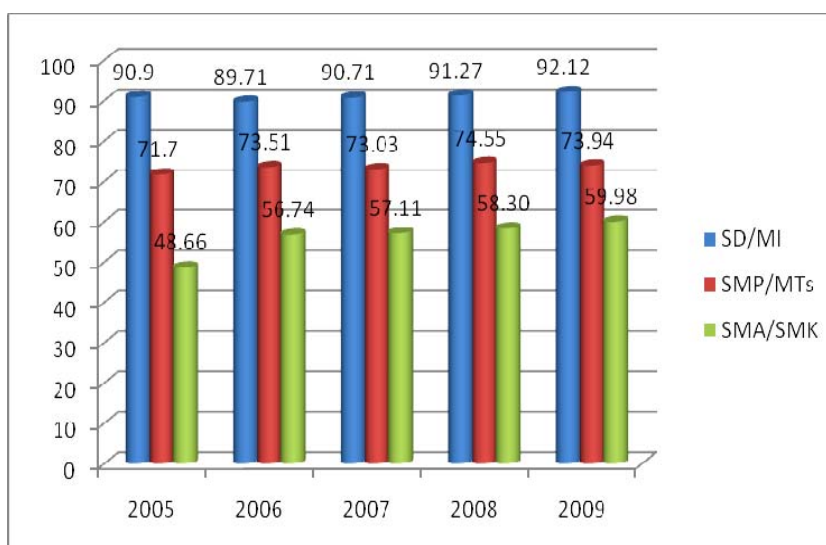
Grafik 1: Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009



Sumber : Dikdas dan Dikmenof Kabupaten Bantul, tahun 2010

Angka Partisipasi kasar (APK) menunjukkan perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah penduduk pada usia sekolah. Realisasi APK SD/MI dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 melebihi angka 100%, ini menggambarkan bahwa ada anak usia di bawah umur 7 tahun dan di atas 12 tahun yang belajar di SD/MI, atau ada juga siswa SD/MI yang berasal dari luar Kabupaten Bantul. APK SMP/MTs dan SMA/SMK dari tahun ke tahun kecenderungannya semakin naik, hal tersebut menggambarkan pendidikan pada jenjang tersebut semakin lama semakin baik.

Grafik 2: Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009



Sumber : Dikdas dan Dikmenof Kabupaten Bantul, tahun 2010

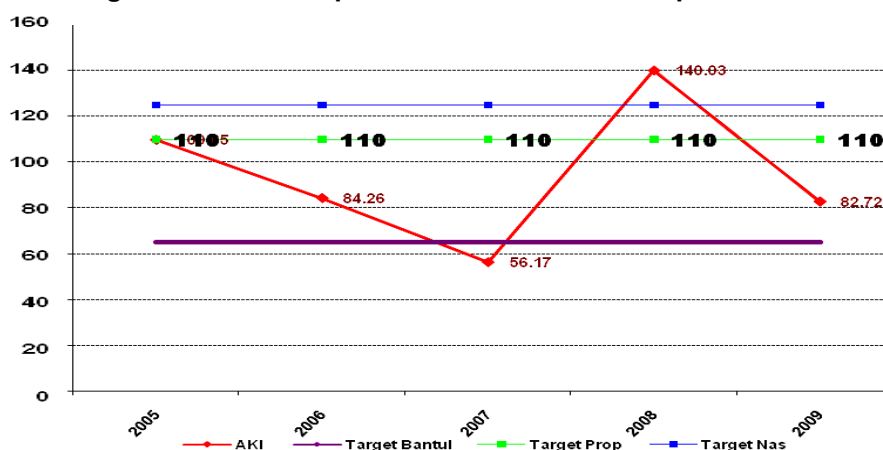
Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan perbandingan antara jumlah siswa yang berasal dari Kabupaten Bantul dengan jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada usia sekolah. APK SD/MI tahun 2009 sebesar 92,12%, ini bukan berarti bahwa anak usia 7-12 tahun sebanyak 7,88% tidak bersekolah, akan tetapi jumlah tersebut bersekolah tapi di luar Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan urusan pendidikan lebih diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, yaitu dengan sasaran utama menuntaskan wajib belajar 9 tahun dan memantapkan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun serta peningkatan kualitas guru baik tingkat dasar dan menengah.

2.1.5.2 Kesehatan

Tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bantul adalah untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Derajat kesehatan masyarakat yang optimal, sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Sistem Kesehatan Nasional (SKN) mencakup kesehatan: jasmani, psikologis, sosial dan spiritual. Keberhasilan pembangunan kesehatan dapat dilihat pada grafik capaian indikator sebagai berikut :

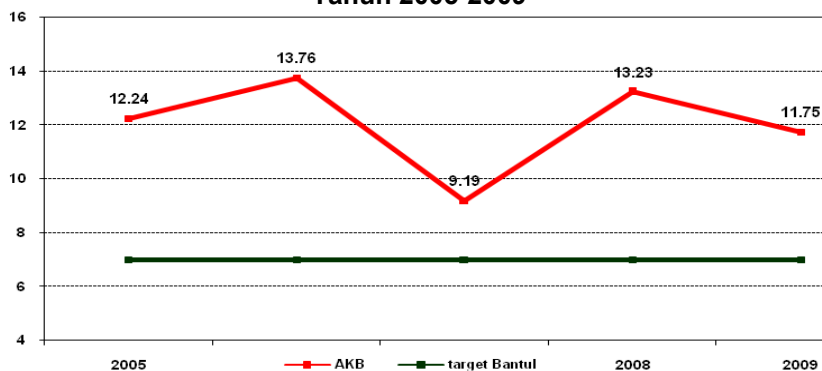
Grafik 3: Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2005-2009



Sumber : Dinkes Kabupaten Bantul, tahun 2010

Dari grafik di atas terlihat bahwa terjadi penurunan AKI dari tahun 2005-2007 dan 2008-2009

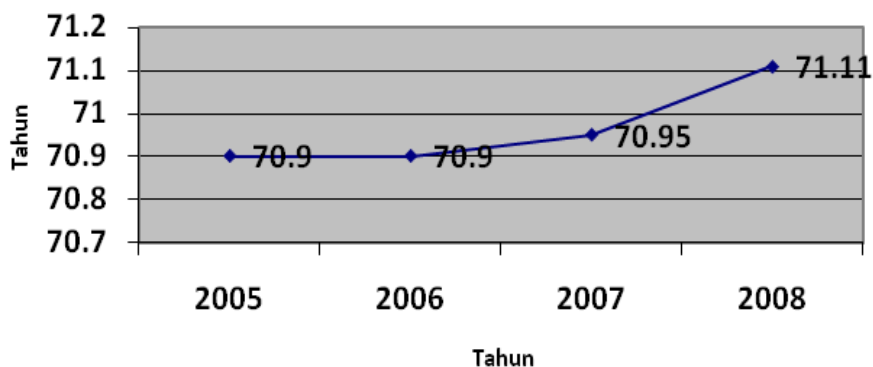
Grafik 4: Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2005-2009



Sumber : Dinkes Kabupaten Bantul, tahun 2010

Grafik di atas memberikan gambaran bahwa capaian AKB berfluktuasi dari tahun ke tahun, namun cenderung mengalami penurunan.

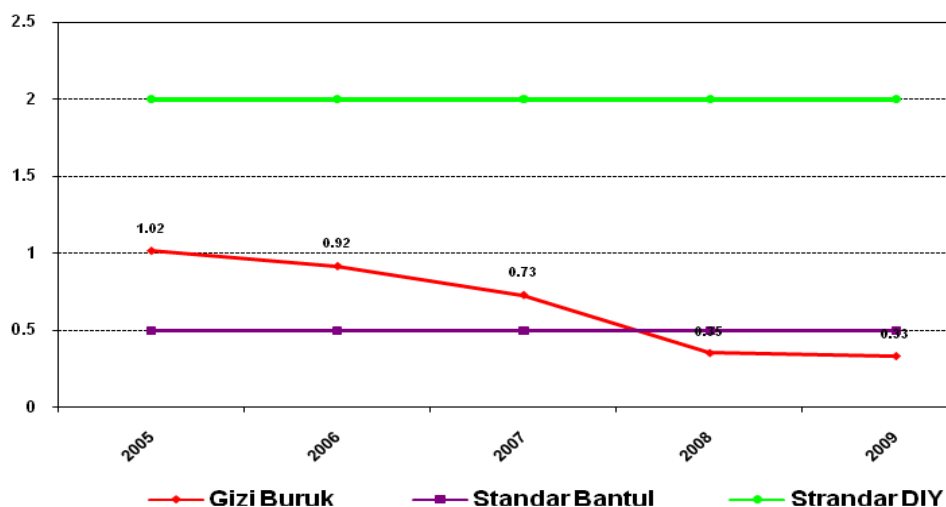
Grafik 5: Angka Harapan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2005-2008



Sumber : Dinkes Kabupaten Bantul, tahun 2010

Grafik di atas menunjukkan terdapat kecenderungan peningkatan umur harapan hidup dari tahun ke tahun.

Grafik 6: Kecenderungan Gizi Buruk di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009



Sumber : Dinkes Kabupaten Bantul, tahun 2010

Status gizi buruk selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan keberhasilan program perbaikan gizi. Kondisi sumber daya manusia di bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 25: Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2005 - 2009

No	Jenis	2005	2006	2007	2008	2009
1	Dokter Spesialis	15	23	20	21	49
2	Dokter Umum	37	105	92	94	89
3	Dokter Gigi	42	53	60	61	47
4	Bidan dan Perawat	533	453	636	575	671
5	Tenaga ungsional lain (Apoteker, Farmasi, Gizi, Teknis Medis, Sanitasi, Kesmas)	219	213	237	246	256

Sumber: Dinkes dan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, 2010 (diolah)

Secara umum jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Bantul dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 mengalami peningkatan yang signifikan, kondisi ini tentunya perlu diimbangi dengan peningkatan sarana dan

prasarana penunjang lainnya agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat lebih meningkat.

Tabel 26: Jumlah Sarana Kesehatan Umum di Kabupaten Bantul Tahun 2005 - 2009

No	Sarana Kesehatan Umum	2005 (Unit)	2006 (Unit)	2007 (Unit)	2008 (Unit)	2009 (Unit)
1	Rumah Sakit Umum	4	4	4	5	8
2	Rumah Sakit Bersalin	1	1	2	3	1
3	Rumah Sakit Khusus	2	3	3	2	2
4	Balai Pengobatan	21	21	60	66	66
5	Rumah Bersalin	15	15	25	27	27
6	Apotek	54	56	66	72	70
7	Industri Peracik Batra	7	9	9	9	9
8	Posyandu	1,092	1,095	1,101	1,113	1,123
9	Puskesmas Induk	26	26	26	27	27
10	Puskesmas Pembantu	67	67	67	67	67
11	Puskesmas Keliling	26	26	26	27	27

Sumber: Dinkes Kabupaten Bantul, tahun 2010

Sarana kesehatan milik Pemerintah di Kabupaten Bantul meliputi Puskesmas sebanyak 27 Puskesmas, yang terdiri dari 16 Puskesmas dengan Tempat Tidur dan 11 Puskesmas Non Tempat Tidur, Puskesmas Pembantu ada 67 buah, dan Puskesmas Keliling 27 unit. Rumah Sakit Pemerintah ada satu, yaitu Rumah Sakit Umum Panembahan Senopati Bantul dan BP4 sebanyak satu buah, serta Gudang Farmasi satu buah.

2.1.5.3 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Setiap upaya pembangunan pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang paling dominan adalah keluarga fakir miskin, anak terlantar, penyandang cacat, dan lanjut usia terlantar. Konsentrasi terbesar untuk anak terlantar terdapat di wilayah kecamatan Imogiri dan Srandakan,

penyandang cacat di wilayah kecamatan Srandakan, Pandak dan Sewon, dan lanjut usia terlantar di wilayah kecamatan Kasihan, Imogiri, Dlingo, dan Jetis.

Tabel 27: Rekapitulasi Data PMKS Kabupaten Bantul

No	Kecamatan	Anak Terlantar	Penyandang cacat	Lanjut usia terlantar
		1	2	3
	update data tahun	2006	2009	2006
1	KRETEK	71	395	79
2	PAJANGAN	89	478	282
3	JETIS	88	549	363
4	BANTUL	27	407	102
5	BANGUNTAPAN	11	453	233
6	BAMBANGLIPURO	41	509	40
7	DLINGO	97	414	375
8	PIYUNGAN	15	364	244
9	PLERET	5	342	312
10	IMOGIRI	141	545	387
11	KASIHAN	41	552	557
12	SEWON	5	555	85
13	SRANDAKAN	103	588	205
14	PANDAK	27	557	198
15	SANDEN	65	412	159
16	SEDAYU	20	383	67
17	PUNDONG	11	438	175
	J U M L A H	857	7,941	3,863

Sumber : Dinas Sosial, 2010

2.1.5.4 Pengarusutamaan gender

Permasalahan kesenjangan gender tidak jauh berbeda dengan karakteristik permasalahan yang terjadi daerah lain di Indonesia. Sumber utama permasalahan sebagian besar berakar pada budaya paternalistik dan primordial yang cenderung mendistorsi terhadap kesetaraan gender di berbagai aspek kehidupan (sosial, ekonomi, pemerintahan, politik, budaya, hankam, dan lain-lain).

Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dapat dilihat dari meningkatnya peran perempuan di sektor publik;

- 1) Perbandingan anggota legislatif perempuan tahun 2009 – 2014 dibandingkan dengan tahun 2005 – 2008 telah mengalami peningkatan dari 5 orang menjadi 6 orang, atau mengalami peningkatan dari 8,9% menjadi 10,38%. (sumber data Setwan Kab Bantul),
- 2) Jumlah pejabat eselon 2 ada 2 orang, eselon 2I ada 32, eselon IV ada 157 orang (data 2009),
- 3) Jumlah Camat Perempuan Th 2005 belum ada, TH 2006 ada 2 orang, Th 2007s/d 2009 ada 3 orang dari 17 orang,
- 4) Jumlah Kepala Desa Perempuan Th 2005 ada 2 orang th 2007 s/d 2009 ada 3 orang dari 75 Lurah,
- 5) Perempuan di lembaga Yudikatif Th 2005 s/d 2007 ada 21,7%, tahun 2008 ada 24,4%, tahun 2009 ada 21,6% (sumber data Kejaksaan Negeri se Provinsi DIY dan Kejaksaan Tinggi Yogyakarta).

ANALISIS

- 1) Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK dari tahun ke tahun kecenderungannya semakin naik, hal tersebut menggambarkan pendidikan pada jenjang tersebut semakin lama semakin baik.
- 2) Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menurunkan AKI, AKB, dan meningkatkan UHH serta menurunkan kasus gizi buruk mampu mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
- 3) Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial lebih banyak terkait dalam meringankan beban dan pemberdayaan masyarakat miskin, sehingga di waktu yang akan datang permasalahan tersebut lebih diperhatikan sebagai upaya penurunan PMKS.
- 4) Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dapat dilihat dari meningkatnya peran perempuan di sektor publik seperti: anggota legislatif, pejabat eselon, jabatan camat, jabatan lurah dan anggota yudikatif.

OUTPUT

- 1) Pembangunan pendidikan lebih diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, yaitu dengan sasaran utama menuntaskan wajib belajar 9 tahun dan memantapkan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, peningkatan kualitas tenaga pengajar dengan melakukan sertifikasi serta peningkatan jumlah siswa masuk ke SMK dan sekolah kejuruan lainnya sehingga memberikan kelulusan siswa siap kerja.
- 2) Sarana kesehatan yang telah dimiliki meliputi puskesmas, rumah sakit, balai pengobatan, klinik, rumah bersalin dan sarana yang lainnya. Untuk optimalisasi pelayanan maka sarana prasarana tersebut perlu ditingkatkan.
- 3) Sumber utama permasalahan gender sebagian besar berakar pada budaya paternalistik dan primordial yang cenderung mendistorsi terhadap kesetaraan gender di berbagai aspek kehidupan. Permasalahan tersebut pada waktu yang akan datang harus dihilangkan sehingga peran perempuan menjadi lebih nyata.
- 4) Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang paling dominan adalah keluarga fakir miskin, anak terlantar, penyandang cacat, dan lanjut usia terlantar, sehingga di waktu yang akan datang permasalahan tersebut lebih diperhatikan.

2.1.6 Prasarana dan Sarana Publik

2.1.6.1 Prasarana dan Sarana Transportasi

Pembangunan sektor transportasi diarahkan pada peningkatan ketersediaan dan kualitas pelayanan agar tercapai suatu sistem transportasi antar moda yang erat kaitannya dengan kondisi fisik dan geografi wilayah, mampu meningkatkan efektivitas transportasi antar daerah dan kawasan pertumbuhan, serta mampu memberikan pelayanan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat luas.

Tabel 27: Jalan Nasional Tahun 2010

No.	Nama ruas jalan	Panjang (km)
1	Yogyakarta - Batas Kulon Progo	11,660
2	Yogyakarta – Piyungan	8,300
3	Piyungan - Batas Gunung Kidul	4,130
4	Jl. Arteri Selatan (Yogyakarta)	8,150
5	Yogyakarta – Bantul	6,286
6	Jl. Katamso (Bantul)	1,800
7	Jl. Sugiyono (Bantul)	1,500
8	Jl. Pemuda (Bantul)	1,820
Jumlah		53,646

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Bantul, tahun 2010

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jalan nasional yang terdapat di Kabupaten Bantul terdiri dari 8 ruas jalan dengan total panjang keseluruhan mencapai 53,646 km. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem transportasi sudah berkembang pesat, sehingga selanjutnya diharapkan dapat mempermudah akses perekonomian penduduk maupun akses dari luar masuk di wilayah Bantul.

Ruas jalan provinsi di wilayah Kabupaten Bantul sebanyak 11 ruas jalan dengan panjang keseluruhan 130,506 km, ruas jalan provinsi yang terpanjang berada di jalan Yogyakarta menuju Parangtritis. Jalan Yogyakarta – Parangtritis merupakan jalan sentral pariwisata sebagai akses dari luar terutama dari wilayah utara (Yogyakarta) yang masuk ke wilayah Kabupaten Bantul. Secara keseluruhan akses jalan provinsi diharapkan dapat meningkatkan sistem transportasi yang nantinya berimbas pada peningkatan perekonomian di wilayah Kabupaten Bantul. Pengembangan jalan strategis diharapkan dapat dibangun perlengkapan jalan yang dapat menunjang fungsi jalan secara umum.

Tabel 28: Jalan Provinsi di Kabupaten Bantul Tahun 2009

No.	Nama Ruas jalan	Panjang (Km)
1	Bantul – Srandakan	8,770
2	Yogyakarta – Parangtritis	23,575
3	Yogyakarta - Bibal (Yogyakarta - Panggang)	19,710
4	Diwung - Makam Imogiri	1,850
5	Sedayu – Pandak	15,050
6	Srandakan – Kretek	18,920
7	Parangtritis - Batas Kab. Gunung Kidul	0,150
8	Palbapang – Barongan	6,700
9	Sampakan – Singosaren	11,970
10	Imogiri – Dodokan	14.400
11	Palbapang – Samas	13,500
Jumlah		130.506

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Bantul, tahun 2010

Kondisi jalan beraspal pada akhir tahun 2005 dengan status mantap (baik dan sedang) adalah sepanjang 488,03 km, kemudian di tahun 2009 meningkat menjadi 566,73 km. Dilihat dari kondisi tersebut kondisi jalan mantap beraspal meningkat sebesar 78,7 km. Hal ini menunjukkan peningkatan pelayanan infrastruktur terutama sistim transportasi. Namun demikian pada tahun 2009 masih terdapat ruas-ruas jalan kabupaten beraspal tidak mantap sepanjang 44,45 km, sehingga masih perlu penanganan atau pemeliharaan untuk ruas jalan tersebut. Di samping itu perlu peningkatan akses jalan menuju pusat-pusat perekonomian, industri, wisata, dan pusat pengembangan wilayah.

Tabel 29: Kondisi Jalan Kabupaten Bantul Tahun 2009

No	Item	Jenis Permukaan			Jumlah
		Aspal	Batu/kerikil	Tanah	
1	Kondisi mantap				
	Baik (Km)	314,21	1,70	6,70	
	Sedang (Km)	252,52	28,65	30,10	
3	Kondisi tidak mantap				
	Rusak (Km)	25,85	41,80	150,30	
	Rusak berat (Km)	18,60	16,10	13,30	
Total Panjang Jalan (km)		611,18	88,25	200,40	899,83

Sumber: DPU Kabupaten Bantul, tahun 2010

Dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan dari tahun ke tahun perlu adanya uji kelayakan jalan dari kendaraan-kendaraan tersebut khususnya untuk kendaraan angkutan penumpang maupun barang. Hingga saat ini Kabupaten Bantul belum memiliki sendiri alat ujinya, yang selama ini dilakukan adalah dengan menyewa alat uji milik Pemerintah Propinsi DIY. Alat uji tersebut umur ekonomisnya sudah habis sehingga biaya pemeliharannya menjadi sangat tinggi.

Kebijakan pengembangan jaringan jalan diarahkan pada:

- 1) Meningkatkan aksesibilitas ke seluruh wilayah daerah dan menembus keterisolasian.
- 2) Menciptakan keterpaduan yang maksimal antar berbagai moda transportasi wilayah dan kota di daerah.
- 3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi jaringan jalan.

Strategi pengembangan jaringan jalan ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas sistem jaringan jalan.
- 2) Meningkatkan kualitas jalan beserta bangunan pelengkap jalan sesuai fungsinya termasuk.
- 3) Pembangunan jalur pantai selatan (PANSELA).
- 4) Meningkatkan kelengkapan jalan.
- 5) Mengembangkan sistem perparkiran yang efektif dan efisien.
- 6) Mengurangi jumlah perlintasan sebidang dengan jalan kereta api.
- 7) Membangun jaringan jalan baru.

Berdasarkan pada fungsi jalan, jalan di Kabupaten Bantul terdiri dari jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder, dan jalan lingkungan.

a) Jalan Arteri Primer

Jalan arteri primer berfungsi menghubungkan secara berdayaguna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Jaringan jalan arteri primer meliputi antara lain sebagian ruas jalan lingkar (ring road) selatan, jalan Batas Kota – Pelem Gurih (Gamping-Yogyakarta), dan jalan Yogyakarta – Batas Kulon Progo.

b) Jalan Kolektor Primer

Jalan kolektor primer berfungsi menghubungkan secara berdaya guna antara Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), antar Pusat Kegiatan Wilayah(PKW), dan antara PKW dengan PKL. Jaringan jalan kolektor primer meliputi antara lain jalan Prambanan – Piyungan, jalan Yogyakarta – Piyungan, jalan Sedayu – Pandak, jalan Palbapang – Barongan, jalan Sampakan – Singosaren, jalan Palbapang – Samas, jalan Srandakan – Kretek, jalan Klangon – Tempel, jalan Pemuda - jalan Kolonel Sugiyono - jalan Brigjen Katamso - jalan Panembahan Senopati, jalan Jodog – Srandakan, jalan Sedayu – Pandak, jalan Bantul – Klodran – Gaten – Manding - Bakulan, jalan Bakulan - Kretek, jalan Kota Yogyakarta – Bakulan, jalan Kretek - Parangtritis, jalan Yogyakarta – Bibal jalan Imogiri – Dodogan, dan Ruas Jalan Pantai Selatan (JJLS).

c) Jalan Kolektor Sekunder

Jalan kolektor sekunder berfungsi menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. Jaringan jalan kolektor sekunder meliputi jalan Dawung – Makam Imogiri, dan jalan Rejowinangun - Ring Road Selatan.

d) Jalan Lokal Sekunder

Jalan lokal sekunder berfungsi menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke perumahan. Jaringan jalan lokal sekunder meliputi antara lain jalan Ganjuran – Paker, Panggang – Paker, Ngrowo – Samas, Ganjuran – Patalan, Bantul – Bejen, Sumberagung – Potrobayan, Pundong – Paker, Simpang Pundong – Potrobayan, Kretek – Depok, Jetis – Karang Semut.

e) Jalan Lingkungan

Jaringan jalan lingkungan berfungsi menghubungkan antar kawasan dan/atau permukiman di dalam desa/IKK.

Bentuk arahan pengembangan pada sistim jaringan jalan primer adalah penetapan terminal penumpang di Kabupaten Bantul ditetapkan berupa terminal tipe B di wilayah Palbapang dan Imogiri, terminal C di Timbulharjo Sewon, terminal tipe A direncanakan di wilayah Sanden, sedangkan terminal barang di Argosari Sedayu dan Srimulyo Piyungan

2.1.6.2 Prasarana dan Sarana Perdagangan

Sarana perdagangan yang dimaksud di sini adalah terdiri dari pasar kabupaten, pasar seni, pasar desa, pasar hewan, toko, dan kios. Sarana perdagangan sangat menunjang kegiatan perekonomian, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta menambah tingkat kesejahteraan masyarakat. Kelengkapan sarana perdagangan diharapkan juga dapat membantu menyediakan lapangan pekerjaan.

Sarana perdagangan terdiri dari pasar kabupaten sebanyak 29 unit, pasar seni 1 unit, pasar desa sebanyak 27 unit, pasar hewan sebanyak 6 unit, toko sebanyak 367 unit, dan kios sebanyak 370 unit.

Tabel 30: Lokasi Pasar Kabupaten Tahun 2009

No.	Kecamatan	Lokasi Pasar
1	Srandakan	- Mangiran
		- Jragan
		- Koripan
2	Sanden	- Sorobayan
		- Celep
3	Kretek	- Sangkeh
		- Angkruksari
4	Pundong	Pundong
5	Bambanglipuro	- Turi
		- Gatak
		- Grogol
6	Pandak	- Pijenan
		- Pandak
		- Jodog
		- Gumulan
7	Bantul	Bantul
8	Jetis	- Barongan
		- Bendosari
9	Imogiri	- Imogiri
		- Pasar hewan
10	Dlingo	Dlingo
11	Banguntapan	Ngipik
12	Pleret	- Jejeran
		- Pleret
13	Piyungan	- Piyungan
		- Panasan
14	Kasih	Niten
15	Sedayu	- Semampir
		- Sungapan

Sumber: Kantor Pengelolaan Pasar Kab Bantul, tahun 2010

2.1.6.3 Sarana Irigasi

Pengembangan dan pengelolaan irigasi mempunyai peranan penting dalam menunjang pembangunan pertanian, mendukung program ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan petani. Pengembangan dan pengelolaan irigasi menghadapi berbagai permasalahan, tantangan dan peluang, baik berkaitan dengan kondisi fisik

dan geografis maupun akibat perubahan tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hal ini antara lain diindikasikan oleh: (1) terjadinya degradasi kualitas lingkungan hidup; (2) menurunnya debit air di musim kemarau dan meningkatnya debit air di musim hujan; (3) semakin beragamnya pemanfaatan air; (4) kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang membawa perubahan kewenangan lingkup pemerintahan; serta (5) meningkatnya tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang prima atas penyediaan air.

Ditinjau dari aspek strata keluasaan daerah irigasi (DI), status daerah irigasi yang ada di wilayah Kabupaten Bantul termasuk dalam kategori DI kecil dengan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah kabupaten dan DI sedang dengan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah propinsi.

Selanjutnya dari kondisi jaringan irigasi teknis dan setengah teknis yang telah dibangun diperkirakan hampir 24% dalam kondisi belum berfungsi secara optimal sehingga banyak petak-petak sawah yang terletak pada bagian hilir sering menghadapi kendala dalam memenuhi kebutuhan air irigasi. Kondisi kurang optimal ini disebabkan antara lain:

- 1) Belum lengkapnya sistem jaringan;
- 2) Masih terjadinya pelanggaran hukum terkait dengan pemanfaatan jaringan irigasi;
- 3) Pembangunan yang tidak memperhatikan fungsi jaringan irigasi;
- 4) Penurunan debit air dan muka air sungai;
- 5) Rendahnya kualitas operasi dan pemeliharaan jaringan;
- 6) Terjadinya penurunan kapasitas infrastruktur penampung air seperti bendungan sebagai akibat meningkatnya sedimentasi.

Sebagai salah satu unsur penting yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan dan pengelolaan irigasi adalah unsur kelembagaan yang kuat dan koordinatif. Secara umum kelembagaan dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi terdiri dari lembaga pengelola dan lembaga koordinasi. Lembaga pengelola meliputi

dinas/lembaga teknis pemerintah yang terkait serta kelembagaan pada tingkat petani pengguna air seperti P3A/GP3A/IP3A, sedangkan lembaga koordinasi antara lain komisi irigasi kabupaten Bantul dan Forum Komunikasi P3A (FKP3A) Kabupaten Bantul. Adapun jumlah lembaga pada tingkat petani pemakai air adalah sebagai berikut: (1) P3A sebanyak 300 unit; (2) GP3A sebanyak 31 unit; (3) IP3A sebanyak tiga unit; dan (4) FKP3A sebanyak satu unit.

Tabel 31: Kondisi Area Sawah Tadah Hujan per Kecamatan di Kabupaten Bantul Tahun 2009

NO	LOKASI	DITANGANI S.D. 2009 (ha)			SISA S.D. 2009 (ha)		
		MURNI	KASUS	JML	MURNI	KASUS	JML
1	DLINGO	60.00	-	60.00	260.60		260.60
2	PUNDONG	-	40.00	40.00	15.67	67.10	82.77
3	PAJANGAN	36.02	77.00	113.02	94.59	11.02	105.61
4	JETIS	15.49	-	15.49	-	-	-
5	PANDAK	-	-	-	-	-	-
6	IMOGIRI	169.00	-	169.00	267.62	-	267.62
7	KRETEK	96.79	-	96.79	71.00	175.21	246.21
8	KASIHAN	13.08	50.27	63.35	0.00	0.00	0.00
9	BBANGLIPURO	2.00	24.10	26.10	0.00	0.00	0.00
10	PIYUNGAN	80.00	-	80.00	361.47	-	361.47
11	SEDAYU	35.51	12.00	47.51	0.00	-	0.00
12	SANDEN	-	-	-	11.50	-	11.50
13	PLERET	67.00	5.00	72.00	164.76	35.00	199.75
14	SEWON	12.00	-	12.00	2.07	-	2.07
15	BANGUNTAPAN	-	141.00	141.00	-	20.00	20.00
16	BANTUL	-	-	-	-	-	-
17	SRANDAKAN	60.00	-	60.00	0.70	-	0.70
	TOTAL	646,89	349,37	996,26	1.249,98	308,33	1.558,3

Sumber: Dinas SDA Kabupaten Bantul, tahun 2010

Pengelolaan sarana dan prasarana irigasi dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dan melibatkan peran Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Sebagian besar kegiatan pengelolaan irigasi merupakan rehabilitasi jaringan irigasi dan operasional irigasi. Mengingat sebagian besar jaringan irigasi merupakan bangunan lama, pembangunan jaringan irigasi baru hanya di beberapa tempat yaitu di Daerah Irigasi (DI) Maladan Kecamatan

Dlingo, DI Sono Kecamatan Kretek, dan DI Mandean Kecamatan Pajangan. Pembangunan jaringan irigasi baru ini dilaksanakan dalam upaya memenuhi kebutuhan irigasi dan mengurangi lahan tadah hujan.

Lahan pertanian yang ada masih terdapat sawah tadah hujan. Untuk penanganan sawah tadah hujan yang sudah ditangani hingga Tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel 31. Dari tabel tersebut dapat di lihat kondisi sawah tadah hujan pada tahun 2009 telah dapat ditangani seluas 996,26 ha, terdiri dari sawah tadah hujan murni seluas 646,89 ha ditangani dengan pemasangan pompa, dan sawah tadah hujan kasus seluas 349,37 ha diatasi dengan perbaikan/ rehabilitasi saluran irigasi yang telah ada.

2.1.6.4 Sarana Air Minum dan Air Bersih

Sumber air minum sebagian besar berasal dari air tanah, baik air tanah dangkal yang berupa sumur gali (*dug well*) maupun sumur dalam (*deep well*). Sebagian besar penduduk menggunakan sumur gali, mencapai lebih dari 80% dan hanya sebagian kecil menggunakan air dari PDAM yang bersumber dari sumur dalam (lebih kurang 17%). Ditinjau dari sisi kualitas, air minum tersebut kurang memenuhi syarat, dimana air yang bersumber dari sumur gali sebagian besar mengandung bakteri coli, Mn dan Fe, sedangkan yang bersumber dari sumur dalam mengandung Fe dan Mn. Kandungan bakteri coli mengindikasikan bahwa air tersebut sudah tercemar limbah, baik limbah rumah tangga (*domestic waste water*) maupun limbah industri (*industrial waste water*) sedangkan kandungan Mn dan Fe disebabkan oleh faktor alam yaitu kondisi batuan. Ditinjau dari sisi kuantitas, terdapat kecenderungan penurunan dari tahun ke tahun kondisi ini disebabkan antara lain berkurangnya daerah tangkapan air (*catchmen area*) karena adanya perubahan fungsi lahan dan kecenderungan eksploitasi air tanah yang berlebihan. Ditinjau dari kemudahan untuk mendapatkan air, maka sumur gali merupakan sarana yang paling mudah untuk mendapatkan air karena muka air tanah relatif dangkal, sedangkan sumber air dari PDAM membutuhkan unit pengolah dengan energi listrik

cukup besar, sehingga berdampak pada harga satuan air yang relatif mahal.

Penyediaan Pengelolaan Air Bersih dilaksanakan Dinas PU bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Bantul. Penanganan di lokasi rawan kekeringan dan belum terjangkau jaringan PDAM, selama lima tahun terakhir telah dibangun Hidran Umum (HU), pembangunan Sistem Instalasi Perpipaan Air Sederhana (SIPAS). Selain itu, untuk mendukung kawasan siap bangun/lingkungan siap bangun (Kasiba/Lisiba) Bantul Kota Mandiri dibangun sistem pengolahan air minum (SPAM) di IKK Pajangan.

Dari kegiatan pengadaan air bersih ini banyak wilayah yang sudah terlayani air bersih. Adapun tabel perkembangan jumlah pelanggan PDAM Kabupaten Bantul dari tahun 2005-2009 sebagai berikut:

Tabel 32: Data Perkembangan Jumlah Pelanggan PDAM di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009

TAHUN	JUMLAH PELANGGAN (Rumah)	PENDUDUK TERLAYANI (Jiwa)	CAKUPAN PELAYANAN (%)
2005	10.632	63.792	7,83
2006	10.859	70.171	10,27
2007	11.539	96.228	11,57
2008	11.757	129.420	15,37
2009	12.797	145.220	17,08

Sumber : PDAM Kabupaten Bantul, tahun 2010.

ANALISIS

- 1) Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan diperlukan untuk mendukung pusat-pusat perekonomian, industri, wisata, dan pusat pengembangan wilayah. Sehubungan akan direalisasikannya pembangunan JJLS, maka perlu didukung perencanaan yang lebih rinci sehingga terbentuk sistem yang terpadu.

- 2) Sarana perdagangan yang berupa pasar dan sarana perdagangan lainnya, sangat menunjang kegiatan perekonomian, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan penyediaan lapangan pekerjaan.
- 3) Pembangunan, peningkatan dan pengelolaan irigasi, menghadapi berbagai permasalahan, baik berkaitan dengan kondisi fisik, regulasi, maupun pengelolaan kelembagaan dimasyarakat.
- 4) Sumber air minum sebagian besar berasal dari air tanah, baik air tanah dangkal yang berupa sumur gali (*dug well*) maupun sumur dalam (*deep well*). Mengingat cakupan layanan air dari PDAM masih relatif rendah (17%), maka diperlukan pembangunan dan peningkatan sarana prasarana air bersih, serta memperluas cakupan layanan.

OUTPUT

- 1) Kebijakan pengembangan jaringan jalan, diarahkan pada pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan ruas jalan serta fasilitas pendukung lainnya. Selain itu perlu dilakukan peningkatan aksesibilitas ke seluruh wilayah dan menembus keterisolasian pelosok perdesaan. Pembangunan JJLS diharapkan memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian di daerah Bantul Selatan.
- 2) Peningkatan sarana perdagangan berupa pasar dan sarana yang lain diharapkan dapat lebih banyak tumbuh di wilayah perdesaan, sehingga akan memudahkan akses masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhannya.
- 3) Keberhasilan pengembangan dan pengelolaan irigasi diharapkan lebih melibatkan unsur kelembagaan di masyarakat dan pemerintah. Lembaga pengelolaan meliputi dinas/ lembaga teknis pemerintah yang terkait, serta kelembagaan pada tingkat petani pengguna air seperti P3A/GP3A/IP3A. Sedangkan lembaga koordinasi antara lain komisi irigasi, dan Forum Komunikasi P3A (FKP3A) Kabupaten Bantul.

- 4) Untuk mencukupi kebutuhan air bersih perlu dilakukan eksploitasi sumberdaya air, untuk memenuhi target 80% penduduk sebagaimana tercantum dalam Permendagri No. 690/477/SJ.

2.1.7 Pemerintahan

Salah satu tujuan reformasi adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan *clean government* yang selanjutnya berkembang ke arah tata kelola pemerintahan yang empatik (*emphatic governance*). Dalam kerangka tujuan tersebut berbagai hal telah diupayakan dalam rangka perubahan tata pemerintahan. Dari beberapa unsur yang harus ada dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang empatik, maka secara teoritis pemerintahan yang empatik mengandung makna pengelolaan pemerintahan didasarkan pada aturan-aturan yang berlaku, pengambilan kebijaksanaan secara transparan, adanya pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pelayanan publik, serta mengedepankan semangat gotong royong dengan memanfaatkan sebesar-besarnya modal sosial yang ada di daerah.

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diarahkan pada peningkatan kinerja sebagai pengejawantahan perubahan paradigma pengelolaan pemerintahan menjadi sistem penyelenggaraan pemerintahan yang empatik (*emphatic governance*). Perubahan paradigma tersebut terlihat dari keinginan besar pemerintah daerah untuk lebih peduli kepada keinginan dan kebutuhan rakyat.

Perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang empatik telah dilakukan peningkatan kerja sama diantaranya adalah kerjasama dengan swasta, BUMN, perguruan tinggi dan LSM. Kerja sama dengan LSM paling menonjol pada tahun 2006, hal ini disebabkan dengan banyaknya partisipasi lembaga akibat terjadinya gempa bumi. Adapun jumlah kerja sama tahun 2005-2009 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 33: Jumlah Kerja Sama di Kabupaten Bantul Tahun 2005 - 2009

No.	Jenis Kerjasama	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Pemerintah	12	6	4	10	2
2	Swasta	5	16	8	5	7
3	BUMN	1	1	1	6	1
4	Perguruan Tinggi	2	-	2	5	2
5	LSM/ Ormas	2	21	8	6	-

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Bantul, tahun 2010

Berdasarkan data di atas, bahwa rata-rata peningkatan kerja sama dengan perguruan tinggi semakin membaik, sedangkan kerja sama dengan BUMN relatif masih kecil. Kerja sama yang dilaksanakan dalam bentuk sharing program, sharing dana maupun kerja sama pertukaran sumber daya manusia.

Selain program-program di atas, guna memperoleh kepastian dalam melaksanakan pemerintahan yang baik, maka diperlukan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan agar tercapai sinergitas pembangunan daerah yang melibatkan banyak pemangku kepentingan.

Pada tahun 2005 sampai dengan 2009 telah dihasilkan beberapa produk hukum yang meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Surat keputusan Bupati yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 34: Produk Hukum Di Kabupaten Bantul Tahun 2005 – 2009

No	Produk Hukum	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Peraturan Bupati	21	42	79	108	71
2	Peraturan Daerah	15	7	22	33	20
3	Surat Keputusan Bupati	427	378	311	319	404
4	Instruksi	1	0	1	1	4
5	M O U	22	47	23	16	12
Jumlah		486	474	436	477	511

Sumber : Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul, tahun 2010 (diolah)

ANALISIS

Upaya perbaikan tata kelola pemerintahan meliputi peningkatan pelayanan kepada masyarakat, upaya peningkatan transparansi, dan upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Selain itu pencapaian pembuatan produk-produk hukum di tingkat pemerintahan daerah menunjukkan sinergitas pembangunan daerah yang melibatkan banyak pemangku kepentingan.

OUTPUT

Pemerintah Kabupaten Bantul telah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan *clean government* yang selanjutnya diharapkan dapat berkembang ke arah tata kelola pemerintahan yang empatik (*emphatic governance*), sehingga perubahan paradigma menjadi lebih peduli kepada keinginan dan kebutuhan rakyat.

2.2 Prediksi Kondisi Umum

2.2.1 Pengembangan Wilayah

Berdasarkan kondisi eksisting dan sesuai dengan arahan pengembangan kawasan, maka secara spasial di Kabupaten Bantul akan dikembangkan menjadi:

2.2.1.1 Kawasan Lindung

Kawasan lindung terdiri dari lima pengelompokan kawasan yang masing-masing memiliki fungsi dan kegunaan agar dalam memanfaatkannya dapat menjadi acuan sebagai keseimbangan ruang dan lingkungan. Sedangkan Kawasan Lindung di Kabupaten Bantul dikelompokkan dalam empat kawasan meliputi:

- 1) Kawasan yang memberikan perlindungan di bawahnya, meliputi:
 - a) Kawasan hutan lindung terdapat di Kecamatan Dlingo, Imogiri, Sanden, Srandakan, dan Kretek.
 - b) Kawasan konservasi dan resapan air di sebagian Kecamatan Kretek, Kecamatan Sedayu, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Pundong, dan hampir di seluruh Kecamatan Imogiri, Kecamatan Pleret, Kecamatan Piyungan, dan di seluruh Kecamatan Dlingo.
- 2) Kawasan Perlindungan setempat:
 - a) Kawasan sempadan sungai,
 - b) Kawasan sempadan pantai,
 - c) Kawasan sekitar mata air,
 - d) Kawasan Terbuka Hijau (RTH)
- 3) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi:
 - a) Kawasan suaka alam: terdapat di Kecamatan Sanden berupa konservasi Penyu
 - b) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan:
 - Kecamatan Banguntapan berupa Masjid Agung Kotagede dan Museum Wayang Kekayon,
 - Kecamatan Imogiri berupa Kompleks Makam Raja-raja,
 - Kecamatan Pajangan berupa Petilasan/Ziarah Mangir dan Gua Selarong,
 - Kecamatan Pleret berupa Petilasan Kraton Mataram,
 - Kecamatan Sewon berupa Cagar Budaya, dan
 - Kecamatan Pandak berupa Makam Sewu.
- 4) Kawasan Rawan Bencana
 - a) Kawasan rawan banjir,
 - b) Kawasan rawan tanah longsor,
 - c) Kawasan rawan gempa bumi,
 - d) Kawasan rawan gelombang pasang (tsunami),
 - e) Kawasan rawan kekeringan.

2.2.1.2 Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya terdiri dari empat kelompok yang terdiri dari:

- 1) Kawasan pertanian
 - a) Kawasan pertanian lahan basah, penyebarannya hampir di seluruh wilayah kecamatan kecuali Kecamatan Kasihan hanya di sebagian kecil wilayah,
 - b) Kawasan pertanian lahan kering: Kecamatan Dlingo, Piyungan, Pleret, Imogiri, dan beberapa di Kecamatan Pundong dan Kretek.
 - c) Kawasan tanaman tahunan/perkebunan: di Kecamatan Piyungan, Pleret, Dlingo, Imogiri, Pajangan, Jetis, Pundong, Kretek, Bambanglipuro, Srandakan, Pandak, dan Sanden,
 - d) Kawasan peternakan: di seluruh kecamatan,
 - e) Kawasan perikanan: di Kecamatan Srandakan, Sanden, dan Kretek untuk jenis perikanan laut. Untuk jenis perikanan darat dikembangkan minapolitan.
- 2) Kawasan usaha pertambangan, khusus untuk bahan galian C sebagian wilayah kecamatan di Kabupaten Bantul kecuali Kecamatan Bantul.
- 3) Kawasan peruntukan industri, dalam kategori industri sedang dan besar di Kecamatan Sedayu dan Piyungan.
- 4) Kawasan pariwisata, terdiri dari pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata minat khusus
- 5) Kawasan permukiman, terdiri dari permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan.

2.2.1.3 Kawasan Strategis

Kawasan Strategis terdiri dari tujuh kelompok yang terdiri dari:

- 1) Kawasan Strategis Kawasan Perkotaan Yogyakarta
- 2) Kawasan Strategis Bantul Kota Mandiri (BKM)
- 3) Kawasan Strategis Pantai Selatan
- 4) Kawasan Strategis Industri Sedayu dan Piyungan

- 5) Kawasan Strategis Agrowisata dan Agropolitan
- 6) Kawasan Strategis Gabusan-Manding-Tembi (GMT) dan Kajigelem
- 7) Kawasan Strategis Gumuk Pasir Parangtritis
- 8) Kawasan Strategis Ibukota Kabupaten Bantul

2.2.2 Pengembangan Sektoral

Berdasarkan kondisi eksisting dan analisis kemungkinan pengembangannya serta melihat potensi dan permasalahan pembangunan yang dihadapi di masa yang akan datang, maka Kabupaten Bantul secara sektoral akan dikembangkan menuju kondisi sebagai berikut:

- 1) **Kependudukan:** laju pertumbuhan penduduk tahun 2002 – 2008 menunjukkan pola pertumbuhan yang linier. Hal ini mengkondisikan bahwa pertumbuhan penduduk lebih banyak dipengaruhi oleh pertumbuhan alami. Jika di asumsikan pertumbuhan dalam jangka panjang rata-rata sebesar kurang lebih 1% per tahun, maka jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2030 diperkirakan akan mencapai kurang lebih 1.158.774 jiwa.
- 2) **Daya dukung lahan:** luas sawah pada kisaran 13.323 Ha (26% dari luas wilayah), Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik pada kisaran seluas 12.397 ha (24,5% dari luas wilayah).
- 3) **Daya dukung lingkungan:** kasus dan potensi pencemar dapat ditangani, kualitas polutan dibawah ambang batas, seluruh limbah dan sampah dapat dikelola dengan memasukkan teknologi pengolahan mutakhir. Eksploitasi bahan galian dapat direklamasi sesuai karakter lahan dan topografinya, sumberdaya alam dalam terjaga kelestariannya.
- 4) **Kawasan bencana:** ancaman berupa bencana gempa bumi, tanah longsor, tsunami, banjir dan kekeringan masih menjadi perhatian yang serius dengan upaya melakukan berbagai kegiatan pengurangan risiko bencana (mitigasi) sehingga perubahan paradigma penanggulangan

bencana dari responsif menjadi pengurangan risiko bencana oleh seluruh komponen masyarakat.

- 5) **Pendidikan:** diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, yaitu dengan sasaran utama menuntaskan wajib belajar 9 tahun dan memantapkan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Peningkatan jumlah siswa masuk ke SMK dan sekolah kejuruan lainnya sehingga memberikan kelulusan siswa siap kerja.
- 6) **Kesehatan:** keberhasilan kesehatan secara umum meliputi; penurunan AKI, AKB, Gizi Buruk, Angka kematian penyakit DBD, meningkatnya UHH dan Angka kesembuhan pengobatan TBC.
- 7) **PMKS dan gender:** Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang paling dominan adalah keluarga fakir miskin, anak terlantar, penyandang cacat, dan lanjut usia terlantar, sehingga di waktu yang akan datang permasalahan tersebut lebih diperhatikan. Sedangkan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dapat dilihat dari meningkatnya peran perempuan di sektor publik seperti; anggota legeslatif, pejabat eselon, jabatan camat, jabatan lurah dan anggota yudikatif, ke depan keterlibatan kaum perempuan lebih dapat di tingkatkan dalam pembangunan dengan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan strategis lainnya, tanpa menghilangkan kodratnya sebagai kaum perempuan.
- 8) **Perekonomian daerah:** PDRB Kabupaten Bantul tahun 2005 hingga 2009 mengalami peningkatan, tetapi tidak dibarengi dengan peningkatan pemerataan pembangunan. Tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul mengalami perlambatan dibandingkan pada tahun 2008. Perlambatan ini terjadi karena sektor penggalian dan sektor pembangunan/konstruksi mengalami kontraksi yang cukup signifikan akibat telah selesainya program rekonstruksi dan rehabilitasi pasca gempa bumi.
- 9) **Pertanian:** Adanya *Bantul Seed Center* yang telah bekerjasama dengan beberapa kelompok tani penangkar benih, menjadikan

produksi benih padi dan benih ikan dapat diatur sesuai kebutuhan serta jaringan distribusi benih.

- 10) **Industri dan Pengolahan Hasil Pertanian:** pembangunan sektor ini direncanakan untuk dapat menambah jumlah komoditas unggulan dengan mengubah komoditas andalan dan komoditas yang diunggulkan mejadi komoditas unggulan, termasuk pengembangan agroindustri. Meningkatkan nilai ekspor sebesar 17% dari produk unggulan dengan sentuhan teknologi bersih dan ramah lingkungan pada setiap proses produksinya, serta diharapkan terbentuk jaringan pemasaran (regional, nasional, global) yang kuat dan luas.
- 11) **Pariwisata:** pembangunan sektor ini direncanakan dalam rangka melengkapi sarana prasarana seluruh obyek sesuai dengan standar pelayanan wisata, peningkatan pelayanan dan promosi wisata yang ditandai dengan semakin peningkatan rata-rata jumlah pengunjung per tahun sebesar 5%.
- 12) **Penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana publik:** direncanakan untuk menyediakan akses transportasi yang memadai; penambahan luas oncoran pada areal yang dapat dikembangkan; pembangunan pusat bisnis; perbaikan pasar tradisional; dan penyediaan cakupan pelayanan air bersih sampai ke seluruh pusat aktivitas ekonomi. Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) jika tidak ditangani secara profesional, maka akan berdampak negatif.
- 13) **Pemerintahan:** upaya perbaikan tata pemerintahan yang meliputi upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, upaya peningkatan transparansi, dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah, guna mewujudkan pola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan *clean government* yang selanjutnya ke depan mempunyai harapan dapat berkembang ke arah tata kelola pemerintahan yang empatik (*emphatic government*).

BAB III

VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

3.1 Visi Kabupaten Bantul

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bantul telah ditetapkan visi bersama, yaitu: “**Bantul Proiotamansari Sejahtera, Demokratis, dan Agamis**”. Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kabupaten Bantul yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang adalah Bantul yang produktif-profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri, sejahtera, dan demokratis, yang semuanya itu akan diwujudkan melalui misi.

Produktif dalam arti bahwa semua potensi daerah baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusianya dapat berproduksi sehingga mampu memberikan andil terhadap pembangunan daerah.

Profesional dalam arti penekanan kepada setiap warganya dari berbagai profesi, agar mereka betul-betul matang dan ahli di bidangnya masing-masing. Tolok ukur profesionalisme ini dapat dilihat dari kualitas hasil kerja dihadapkan kepada efisiensi penggunaan dana, sarana, tenaga, serta waktu yang diperlukan.

Ijo Royo-royo dalam arti tidak ada sejengkal tanahpun yang diterlantarkan sehingga baik di musim hujan maupun di musim kemarau di manapun akan tampak suasana yang rindang. Dalam hal ini perlu diingatkan kepada masyarakat Bantul bahwa bagaimanapun Kabupaten Bantul tumbuh terlebih dahulu sebagai kawasan agronomi yang tangguh dalam rangka mendukung tumbuh berkembangnya sektor industri yang kuat di masa mendatang.

Tertib dalam arti bahwa setiap warga negara secara sadar menggunakan hak dan menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sehingga terwujud kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan yang tertib

semuanya secara pasti, berpedoman pada sistem ketentuan hukum/perundang-undangan yang esensial untuk terciptanya disiplin bersama.

Aman dalam arti bahwa terwujudnya tertib pemerintahan dan tertib kemasyarakatan akan sangat membantu terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat. Kondisi aman ini perlu ditunjang demi terpeliharanya stabilitas daerah.

Sehat dalam arti bahwa tertibnya lingkungan hidup yang akan dapat menjamin kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat/manusia yang menghuninya.

Asri dalam arti bahwa upaya pengaturan tata ruang di desa dan di kota dapat serasi, selaras, dan seimbang dengan kegiatan-kegiatan manusia yang menghuninya sehingga akan menumbuhkan perasaan kerasan, asri tidak mewah tetapi lebih cenderung memanfaatkan potensi lingkungan yang bersandar pada kreativitas manusiawi.

Sejahtera dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Bantul telah terpenuhi secara lahir dan batin. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman, juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demokratis dalam arti bahwa adanya kebebasan berpendapat, berbeda pendapat, dan menerima pendapat orang lain. Akan tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus dilaksanakan bersama-sama dengan penuh rasa tanggung jawab.

Agamis dalam arti bahwa pemerintahan dan kehidupan masyarakat Bantul senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai agama dan budi pekerti yang luhur. Pentingnya aspek agama tidak diartikan sebagai bentuk primordialisme untuk suatu agama tertentu, tetapi harus diartikan secara

umum bahwa nilai-nilai luhur yang dianut oleh semua agama semestinya dapat diterapkan dalam interaksi sosial sehari-hari.

3.2 Misi Kabupaten Bantul

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional organisasi (pemerintah) yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan, sehingga dapat mengikuti irama perubahan zaman bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada masa mendatang. Sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan di atas, pernyataan misi mencerminkan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk pencapaian visi tersebut. Dengan adanya pernyataan misi organisasi, maka akan dapat dijelaskan mengapa organisasi eksis dan apa maknanya pada masa yang akan datang.

Bila dilihat maka di dalam visi Kabupaten Bantul terdapat empat frase kata yang saling berkaitan. Frase pertama (Projotamansari) merupakan ethos kerja yang melandasi pola sikap, pola tindak, dan pola pikir seluruh masyarakat Kabupaten Bantul beserta aparatur Pemerintah Daerah. Sementara frase kedua, ketiga, dan keempat (Sejahtera, Demokratis, dan Agamis) merupakan keadaan yang ingin dicapai dan definisinya telah dijelaskan di atas. Khusus untuk frase keempat, tidak berdiri sendiri tetapi berkaitan dengan dan menjiwai tiga frase lainnya atau dengan kata lain di dalam frase-frase lainnya tersebut terdapat nilai-nilai agama yang harus dipegang teguh dan dilaksanakan. Dua pernyataan misi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin dengan memanfaatkan sumber daya lokal, berwawasan lingkungan, dan menitikberatkan pada pengurangan risiko bencana, serta berdasarkan pada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”**

Misi tersebut bermakna makin kuatnya karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila, yang dicirikan dengan watak dan

perilaku yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dan dinamis. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia, meningkatnya pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, meningkatnya perluasan pelayanan kesehatan, makin mantapnya kearifan lokal. Meningkatnya dan menguatnya sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang; membaiknya struktur perekonomian yang semakin kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif berbasis ekonomi lokal sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing global, menjadi motor penggerak perekonomian; terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan mekankan pada pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta pada pengurangan risiko bencana.

2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang empatik dan bertanggung jawab.

Misi ini bermakna semakin meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik di didukung dengan peningkatan profesionalisme aparatur daerah, peningkatan kepedulian terhadap kebutuhan dan keinginan rakyat, peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat, pengembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik, peningkatan kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah, penguatan kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah, dan peningkatan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Rencana pembangunan jangka panjang ini terdiri atas empat tahapan pembangunan jangka menengah. Tiap-tiap tahapan rencana pembangunan jangka menengah memiliki penekanan-penekanan khusus yang ingin dilakukan dan dicapai. Dengan demikian, penekanan misi untuk setiap tahapan rencana pembangunan jangka menengah akan berbeda.

Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Bantul tahun 2006-2025 adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat lahir dan batin, sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

3.3 Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Sebagai ukuran terwujudnya Kabupaten Bantul yang sejahtera dan lestari, pembangunan daerah dalam 20 tahun kedepan diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin dengan memanfaatkan sumber daya lokal, berwawasan lingkungan, dan menitik beratkan pada pengurangan risiko bencana, serta didasarkan pada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ditandai oleh hal-hal berikut :**
 - a) Meningkatnya kualitas pendidikan, aksesibilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, serta pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu;
 - b) Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan, aksesibilitas, dan partisipasi masyarakat dalam kesehatan, serta meningkatnya kuantitas pelayanan kesehatan;
 - c) Meningkatnya dan menguatnya SDM dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- d) Meningkatnya perluasan kesempatan kerja, kualitas tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja, dan transmigrasi;
- e) Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan kabupaten maju di Indonesia;
- f) Terbangunnya struktur perekonomian lokal yang semakin kokoh, berlandaskan keunggulan kompetitif, berdaya saing tinggi, yang dikelola secara efektif dan efisien, sehingga menghasilkan komoditas berkualitas, berdaya saing global dan menjadi motor penggerak perekonomian.
- g) Berkembangnya perindustrian, perdagangan, pariwisata berbasis masyarakat, agribisnis dan industrialisasi perdesaan serta sektor usaha lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
- h) Terwujudnya jaringan infrastruktur yang handal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.
- i) Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
- j) Terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan;
- k) Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang tercermin oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi dan seimbang.
- l) Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta mengurangi dampak risiko bencana alam.

- m) Berkurangnya penyandang masalah kesejahteraan sosial, tercapainya penduduk tumbuh seimbang, serta peningkatan peran perempuan dalam pembangunan.
- n) Mantapnya karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleransi, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dan dinamis.
- o) Pengurangan risiko bencana melalui penataan pemukiman dan merelokasi penduduk dari wilayah rawan bencana.

2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang empatik dan bertanggung jawab, ditandai oleh hal-hal berikut :

- a) Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- b) Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.
- c) Berkembangnya sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, serta masyarakat yang mandiri.
- d) Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah.
- e) Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah.
- f) Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

- g) Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- h) Mantapnya situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

3.4 Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2025

Untuk mencapai tingkat kesejahteraan, kemajuan, dan kelestarian yang diinginkan, arah pembangunan daerah jangka panjang daerah selama kurun waktu 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1) Mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin, dengan memanfaatkan sumber daya lokal, berwawasan lingkungan, dan menitik beratkan pengurangan risiko bencana, serta didasarkan pada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- a) Pembangunan pendidikan diarahkan pada peningkatan, pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan terjangkau di semua jenis jalur dan jenjang pendidikan, serta peningkatan relevansi daya saing dan peningkatan pencitraan tata kelola pendidikan.
- b) Pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, pencegahan dan penanggulangan berbagai penyakit menular, serta kasus kekurangan energi dan protein, peningkatan mutu kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan perbaikan manajemen kesehatan;
- c) Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan pada perluasan lapangan kerja termasuk transmigrasi, peningkatan kualitas tenaga kerja, kesejahteraan dan perlindungan serta kemandirian tenaga kerja yang berwawasan wirausaha sehingga mampu bersaing di era global dan pengembangan ketrampilan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing lokal, dilakukan melalui pendidikan dan ketrampilan teknis sesuai dengan tuntutan pasar

kerja, serta pengembangan dan pemerataan balai latihan kerja daerah.

- d) Perekonomian daerah dikembangkan ke arah perekonomian kreatif dan berdaya saing global dengan memanfaatkan sebesar-besarnya potensi lokal yang memperhatikan sumber daya alam secara berkelanjutan, membangun keterkaitan sistem produksi dan distribusi yang kokoh. PBB telah mencanangkan komitmen global *Milenium Development Goals* sebagai langkah menuju upaya penghapusan kemiskinan, dengan target pengurangan setengah kemiskinan pada tahun 2015. Pembangunan ekonomi daerah diarahkan pada penanganan kemiskinan, dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara mengurangi beban, meningkatkan produktifitas masyarakat miskin, dan meningkatkan pendapatan.
- e) Kelembagaan ekonomi dibangun dan dikembangkan guna menciptakan regulasi dan perizinan yang efisien, efektif dan non-diskriminatif, menjaga, mengembangkan dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat serta melindungi konsumen; mendorong pengembangan standarisasi produk dan jasa untuk meningkatkan daya saing lokal; meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah (UKM) di daerah, sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi dan memperkuat basis ekonomi daerah. Sesuai dengan amanat undang-undang dasar, maka kelembagaan ekonomi yang dikembangkan adalah koperasi.
- f) Pembangunan UKM diarahkan untuk menciptakan ekonomi lokal yang berdaya saing, mandiri serta mampu menembus pasar global dengan mengembangkan kerjasama yang strategis dan sinergis antar pelaku usaha, mengembangkan rumpun industri, mempercepat alih teknologi, dan meningkatkan kualitas SDM.
- g) Perdagangan daerah diarahkan pada pengembangan dan peningkatan transaksi perdagangan produk-produk pertanian dan industri, menjaga distribusi dan ketersediaan barang-barang

kebutuhan pokok di seluruh wilayah pedesaan, dengan harga yang terjangkau, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

- h) Pembangunan sektor industri diarahkan untuk memperkuat basis industri yang mempunyai daya saing, baik dipasar lokal maupun internasional, meningkatkan peran industri unggulan daerah sebagai modal penggerak perekonomian daerah, serta meningkatkan peran sektor industri kecil dan menengah terhadap struktur industri, sehingga terjadi kesinambungan peran antara industri besar dengan industri kecil dan menengah.
- i) Usaha peningkatan investasi di daerah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk pencapaian kemakmuran bagi rakyat. Pengembangan investasi dilakukan dengan mengembangkan iklim usaha yang kondusif, menjamin kepastian berusaha dan peningkatan kualitas sistem pelayanan investasi, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung investasi.
- j) Pengembangan dan beragamnya lembaga keuangan di daerah akan memberikan alternatif pendanaan lebih banyak bagi investasi di daerah. Setiap jenis investasi akan memperoleh sumber pendanaan yang sesuai dengan karakteristik jasa keuangan.
- k) Pengembangan sektor-sektor strategis didayagunakan untuk memperkuat perekonomian lokal.
- l) Koperasi didorong untuk berkembang luas melalui peningkatan kapasitas usaha dan ketrampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan, pembinaan usaha dan akses modal.
- m) Pembangunan pertanian diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan daerah dengan mengembangkan produktivitas pertanian, yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, maupun harga yang terjangkau. Sistem agribisnis dan agroindustri diperkuat sebagai penggerak yang didukung oleh kegiatan

pertanian yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.

- n) Pembangunan di bidang kelautan dan perikanan diarahkan untuk peningkatan produksi perikanan yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani ikan dan nelayan, dengan optimalisasi produksi perikanan laut dan budidaya darat, menjaga pelestarian habitat ikan, melalui penghijauan pantai, dan melarang menggunakan alat tangkap ikan yang merusak lingkungan.
- o) Kepariwisata berbasis masyarakat dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi daerah, meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keanekaragaman pesona keindahan alam, budaya dan potensi daerah.
- p) Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak, diarahkan pada memperkuat kelembagaan, pengarusutamaan gender dan anak dalam pembangunan, sehingga terjaminnya keadilan gender dalam berbagai perundangan. Program pembangunan, dan kebijakan publik dimaksudkan untuk memberikan lebih besar peran perempuan di berbagai bidang pembangunan dan menurunkan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan.
- q) Pembangunan seni dan budaya diarahkan pada pelestarian nilai-nilai budaya yang mengakar dari warisan leluhur, ditujukan untuk membentuk nilai-nilai kepribadian masyarakat yang bermartabat. Pelestarian seni dan budaya diharapkan dapat meningkatkan jumlah kegiatan seni budaya daerah serta meningkatnya peminat seni budaya daerah.
- r) Pembangunan kependudukan diarahkan pada pengendalian laju pertumbuhan dan persebaran penduduk serta mewujudkan keluarga sejahtera, sehingga tercipta kondisi kependudukan yang terkendali dan kesejahteraan keluarga meningkat. Pengendalian

jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas, harmonis, dan didukung tertatanya administrasi kependudukan.

- s) Perencanaan pembangunan wilayah diarahkan tidak hanya merencanakan pembangunan fisik semata, tetapi juga merencanakan ruang dimana sumber daya manusia terdapat didalamnya. Rencana tata ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi dan berkelanjutan. Dalam rangka mengoptimalkan penataan ruang perlu ditingkatkan (a) kompetensi sumber daya manusia dan kelembagaan di bidang penataan ruang, (b) kualitas rencana tata ruang, dan (c) efektivitas penerapan dan penegakan hukum dalam perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian pemanfaatan ruang.
- t) Pembangunan perumahan diarahkan pada peningkatan penyediaan perumahan, penyediaan lahan untuk relokasi wilayah rawan bencana, dan lahan masyarakat berpendapatan rendah, beserta peningkatan pemenuhan kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana sehat.
- u) Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal disekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi.
- v) Melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development*) sesuai dengan keseimbangan ekosistem dan tidak menimbulkan dampak yang merusak lingkungan. Pemanfaatan sumber daya harus sesuai dengan daya dukungnya dan

memperhatikan daya regenerasinya, khusus untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable*)

- w) Pembangunan yang ramah lingkungan akan dijalankan melalui pengendalian pencemaran lingkungan, peningkatan partisipasi masyarakat dunia usaha, dan industri dalam memelihara kelestarian lingkungan hidup, melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup, dapat menciptakan SDM yang peduli terhadap isu SDA dan lingkungan hidup, utamanya generasi muda.
- x) Penanganan pelayanan persampahan pada pemukiman, diarahkan pada peningkatan pengelolaan, pelayanan persampahan, serta memberikan ruang yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pelayanan persampahan, tidak hanya dibidang transportasi tapi juga dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
- y) Pembangunan olah raga diarahkan untuk menciptakan dan mengembangkan budaya berolah raga bagi masyarakat, dan peningkatan prestasi melalui pengembangan sarana prasarana olah raga yang memadai. Sedangkan untuk pembangunan pemuda diarahkan pada terwujudnya pengembangan sikap dan perilaku pemuda yang beriman dan bertaqwa, mandiri, inovatif dan kreatif, peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemberdayaan pemuda sebagai subyek pembangunan, melalui pengembangan lembaga kepemudaan yang berwawasan kebangsaan dan cinta tanah air.
- z) Peningkatan ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ajaran agama, mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan beragama. Peningkatan pemahaman nilai-nilai ajaran agama dilaksanakan dengan mengimplementasi ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, dengan mengembangkan rasa saling percaya dan menciptakan harmonisasi antar kelompok umat beragama.

2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang empatik dan bertanggung jawab,

- a) Pembangunan aparatur diarahkan untuk mewujudkan sosok dan kinerja aparatur pemerintah yang profesional dan berkarakter. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mendorong pola pengembangan karir yang menuju pada pengembangan profesionalisme, pengembangan standar kompetensi aparatur, dan peningkatan kesejahteraan aparatur termasuk perangkat desa. Disamping itu, secara bertahap juga dilakukan perubahan terhadap paradigma dan budaya birokrasi agar cepat, tanggap, dan peduli dalam merespon tuntutan, kebutuhan dan perkembangan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
- b) Pengelolaan keuangan daerah akan terus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah, sehingga dapat meningkatkan volume perputaran keuangan di daerah dan terwujudnya optimalisasi fungsi lembaga pengelola keuangan daerah.
- c) Pengembangan kebijakan pemerintah yang disusun berdasarkan pada kajian dan analisis yang mendalam disertai dengan dukungan data dan informasi yang mutakhir, valid dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, pembangunan statistik dilakukan dengan optimalisasi lembaga yang berwenang dengan pemerintah daerah. Kelembagaan statistik daerah diakselerasi, dengan pengembangan pusat data statistik daerah yang terintegrasi dengan pusat, *updating* data secara ketat setiap data dan informasi yang berada pada tingkat sektoral, sehingga bermanfaat bagi perumusan indikator pembangunan daerah yang terimplementasi secara berkelanjutan.
- d) Penegakan hukum yang dilandasi prinsip-prinsip keadilan terutama dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, serta meningkatkan kualitas produk hukum daerah sesuai kewenangan yang dimiliki serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum yang dikeluarkan. Guna menghindari lahirnya produk yang memberatkan masyarakat, maka perlu

diwujudkan peraturan perundangan daerah yang mampu berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan.

- e) Pengembangan sistem Informasi Manajemen Daerah yang memadai melalui pembangunan dan pengembangan beberapa sistem informasi manajemen di masing-masing Satuan Kerja, termasuk Pemerintah Desa yang nantinya akan diintegrasikan melalui jaringan intranet maupun internet
- f) Dalam mencapai kinerja pelayanan publik yang prima berbasis pada partisipasi masyarakat, perlu dilakukan identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan fasilitasi dari pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Sehingga pelayanan fasilitas benar-benar merupakan refleksi dari kebutuhan riil masyarakat atau kebutuhan dasar dan yang merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Disamping itu, perlu pemberdayaan dan perwujudan aparatur pemerintah yang mumpuni dan bersih, serta ditunjang oleh sarana dan prasarana pelayanan secara memadai dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang empatik.
- g) Dalam mencapai kinerja pelayanan perlu dibentuk upaya untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan oleh perangkat-perangkat daerah yang selaras dan sinergis dengan menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan *Standard Operating Procedure* (SOP).
- h) Pengembangan investasi dengan meningkatkan pelayanan kepada pihak swasta yang akan menanamkan modalnya di daerah dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan, memfasilitasi kerjasama usaha, percepatan waktu pelayanan.
- i) Penataan kelembagaan kearsipan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah, pembangunan sistem kearsipan daerah, pengembangan prasarana dan sarana pendukung kearsipan daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kearsipan.

- j) Memelihara kondisi keamanan ketertiban yang cukup kondusif di daerah dengan melakukan antisipasi terhadap kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban, dalam rangka mewujudkan sistem keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang mampu melindungi keseluruhan warga masyarakat dari gangguan ketertiban dan keamanan.
- k) Peningkatan kesadaran masyarakat dan aparat untuk memahami prinsip-prinsip dasar hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui pemasyarakatan dan pendidikan HAM.
- l) Pengembangan pembangunan politik daerah dilakukan melalui peningkatan kesadaran berpolitik, dan menjamin hak-hak politik masyarakat secara proporsional.

BAB IV

TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2006-2025

Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana dimaksud di atas, pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

Setiap sasaran pokok dalam misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat dipergunakan kembali menjadi prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Atas dasar tersebut, tahapan dan skala prioritas dapat disusun sebagai berikut:

4.1 RPJMD ke-1 (2006-2010)

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah pertama (2006-2010) ditekankan pada : **Peningkatan kualitas kehidupan** yang mencakup :

- 1) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan masyarakat serta menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran yang didasarkan pada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Mewujudkan pemerintahan yang demokratis dengan memperkuat basis pemerintahan daerah dan desa.

4.1.1 Arah Kebijakan

4.1.1.1 Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Kabupaten Bantul secara makro yang terbagi dalam dua wilayah. Dengan melihat potensi dan permasalahan wilayah, maka prioritas pengembangannya adalah sebagai berikut:

- **Kawasan Sub Urban Berwawasan Lingkungan:** prioritas penanganan adalah pada wilayah kecamatan yang berbatasan dengan kota Yogya (Kasihan, Sewon, Banguntapan) guna mendukung pengembangan kota Yogya dengan penekanan pada pengembangan perumahan/ permukiman dan kawasan perdagangan dan jasa serta pengaturan permasalahan lintas batas seperti IPAL, sampah, drainage, jalan dan jembatan. Pengaturan dan penataan dititikberatkan pada aspek penataan bangunan, pembangunan pada saluran irigasi, ruang publik, jalur hijau, alih fungsi lahan, pedagang kaki lima, penataan periklanan tepi jalan, penertiban lampu penerangan jalan terutama pada akses utama.
- **Kawasan Rural Modern:** prioritas penanganan adalah pada wilayah kecamatan Srandakan, Sanden, dan Kretek. Prioritas ini diambil dalam rangka pemerataan pengembangan kawasan sehingga menyeimbangkan kecepatan pengembangan wilayah utara dan selatan. Fokus pengembangan adalah pada pembukaan akses jalan untuk meningkatkan akses jalan yang mempermudah akses parangtritis, Samas dan Pandansimo, penambahan mutu dan fasilitas obyek wisata. Pengaturan dan penataan dititikberatkan pada aspek aktivitas kegiatan pada obyek wisata, penambangan pasir laut, investasi sektor wisata dan perikanan, penataan bangunan. Di samping itu perlu dilaksanakan pengelolaan terhadap bahaya banjir. Untuk kawasan lainnya, dititikberatkan pada aspek penyiapan pengembangan yang pelaksanaannya dimulai pada lima tahun kedua.

4.1.1.2 Pengembangan Sektoral

- **Pembangunan Kesejahteraan Industri:** pada lima tahun pertama, pembangunan kesejahteraan industri mendapat fokus perhatian yang lebih besar. Titik berat pembangunan kesejahteraan industri terletak pada penanganan masalah kemiskinan, pengangguran, ketahanan industri keluarga, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia serta penyiapan SDM ketenagakerjaan yang berdaya saing. Oleh karena pentingnya penanganan masalah kemiskinan, maka peran Komite Penanggulangan Kemiskinan perlu dioptimalkan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan berbagai kegiatan investasi dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin dan kegiatan distribusi bantuan.
- **Pembangunan Ekonomi:** pada lima tahun pertama, pembangunan ekonomi ditekankan untuk memperkuat aktivitas ekonomi utama yaitu sektor pertanian, terutama berkaitan dengan peningkatan produksi pertanian dengan proses produksi yang lebih efisien. Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan sarana produksi serta melaksanakan intervensi pasar produk bila dijumpai tanda-tanda adanya kegagalan pasar. Untuk sektor industri, jasa dan perdagangan difokuskan dalam tahap persiapan untuk mencapai tahun investasi pada lima tahun kedua yang berguna dalam menampung tenaga kerja yang telah dipersiapkan pada lima tahun pertama.
- **Pembangunan Fisik Prasarana:** pada lima tahun pertama, pembangunan fisik prasarana ditekankan untuk mendukung pemekaran kota Yogya (kawasan sub urban) dan untuk mendukung pengembangan aktivitas ekonomi terutama sektor pertanian (kawasan rural modern) serta menambah akses pelayanan publik. Pada aspek lingkungan, dalam upaya untuk menjaga kuantitas polutan agar selalu di bawah ambang batas maka perlu dilakukan uji emisi gas buang, penerapan konsep teknologi bersih, pengawasan penggunaan dan peredaran bahan kimia yang dilarang, serta pengelolaan sampah (terutama sampah ilegal) dan limbah yang ditekankan di daerah

perkotaan. Selain itu perlu dilakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kerusakan dan pencemaran tanah dan air.

- **Pembangunan Pemerintahan:** pada lima tahun pertama, pembangunan pemerintahan ditekankan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan desa. Di samping itu, penerapan transparansi mulai dilaksanakan dalam rangka melaksanakan peraturan daerah yang telah ditetapkan.

4.1.2 Strategi

4.1.2.1 Pengembangan Wilayah

- **Kawasan Sub Urban Berwawasan Lingkungan:** untuk mewujudkan arahan kebijakan pembangunan di atas maka strategi yang dipilih adalah melaksanakan pembangunan kawasan perumahan/permukiman, perdagangan dan jasa yang tertata dan menyediakan ruang publik yang memadai serta penataan jalur hijau yang kuat. Penanganan permasalahan lintas batas seperti IPAL, sampah, drainase, jalan dan jembatan melalui Sekber Kartamantul. Dalam rangka menciptakan kawasan yang tertata maka perlu monitoring secara intensif terhadap pendirian bangunan, pembangunan pada saluran irigasi, alih fungsi lahan, pedagang kaki lima, periklanan tepi jalan, lampu penerangan jalan terutama pada akses utama sesuai perangkat hukum yang tersedia. Dalam rangka pelayanan transportasi perlu dibangun sistem transportasi yang sesuai dengan perkembangan wilayah.
- **Kawasan Rural Modern:** untuk mewujudkan arahan kebijakan pembangunan di atas maka strategi yang dipilih adalah pembukaan akses jalan, penambahan kualitas dan jumlah fasilitas obyek wisata dalam rangka meningkatkan jumlah pengunjung, pengendalian aktivitas pariwisata, pengendalian penambangan pasir laut, penyiapan perangkat investasi investasi, penataan bangunan dan pengelolaan terhadap bahaya banjir. Untuk kawasan lain, kegiatan pokoknya

adalah dalam rangka menyiapkan perangkat pengembangan kawasan, dimana pelaksanaan pembangunannya dimulai pada lima tahun kedua.

4.1.2.2 Pengembangan Sektoral

- **Pembangunan Kesejahteraan Industri:** untuk mewujudkan arahan kebijakan pembangunan di atas maka strategi yang dipilih adalah penanganan masalah kemiskinan (koordinasi dibawah Komite Penanggulangan Kemiskinan), pengangguran, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, penanganan penyandang masalah industri serta mendorong terwujudnya pengarusutamaan gender dan meningkatnya ketahanan industri keluarga. Peningkatan pelayanan pendidikan juga dalam rangka mempersiapkan kompetensi ketenagakerjaan yang memiliki pengaruh terhadap peningkatan daya saing tenaga kerja dalam berusaha atau mencari kerja.
- **Pembangunan Ekonomi:** untuk mewujudkan arahan kebijakan pembangunan di atas maka strategi yang dipilih adalah upaya perkuatan sektor pertanian dalam menjaga swasembada pangan dan meningkatkan jumlah dan mutu produk pertanian lainnya. Proses produksi diharapkan menjadi lebih efisien dengan telah menggunakan sentuhan teknologi. Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan sarana produksi mulai dari bibit unggul, pupuk, tenaga penyuluh dan melaksanakan intervensi pasar produk pertanian bila dijumpai tanda-tanda adanya kegagalan pasar. Untuk sektor industri, jasa dan perdagangan kegiatan pokoknya adalah mempersiapkan *software*, *hardware*, dan *brainware* dalam rangka menarik investasi.
- **Pembangunan Fisik Prasarana:** untuk mewujudkan arahan kebijakan pembangunan di atas maka strategi yang dipilih adalah ditekankan untuk mendukung pemekaran kota Yogya (kawasan sub urban) dan untuk mendukung pengembangan aktivitas ekonomi terutama sektor pertanian (kawasan rural modern) serta menambah akses pelayanan

publik dengan penekanan pada jaringan irigasi. Kegiatan lainnya adalah dalam rangka penyiapan sarana transportasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan sarana kesehatan dan pembangunan sarana perdagangan potensial. Pada aspek lingkungan, dalam menjaga kuantitas polutan perlu uji emisi, penerapan industri bersih, pengawasan penggunaan bahan kimia yang dilarang serta pembangunan TPS-TPS pada lokasi dekat dengan pembuangan sampah ilegal di daerah perkotaan.

- **Pembangunan Pemerintahan:** untuk mewujudkan arahan kebijakan pembangunan di atas maka strategi yang dipilih adalah program peningkatan kapasitas pemda dan program pembaharuan tata pemerintahan daerah serta memperkuat basis pemerintahan desa.

4.2 RPJMD ke-2 (2011-2015)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-1 , RPJMD ke-2 diarahkan untuk lebih memantapkan **peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pemanfaatan Sumber Daya Alam, pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian lokal.**

- **Mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin dengan memanfaatkan sumber daya lokal, berwawasan lingkungan, dan menitik beratkan pengurangan risiko bencana, serta berdasarkan pada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui:**
 - 1) Peningkatan kualitas pendidikan, aksesibilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, serta pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu;
 - a) Peningkatan, pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dasar 12 tahun yang bermutu dan terjangkau di semua jenjang pendidikan, peningkatan relevansi daya saing dan pencitraan tata kelola pendidikan.

- b) Peningkatan pemenuhan sekolah berkualitas, melalui penyediaan/ pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional, dan pemenuhan fasilitas pendidikan.
 - c) Pemenuhan sekolah berkualitas di berbagai jenjang pendidikan, peningkatan kuantitas dan kualitas siswa pada sekolah kejuruan untuk memenuhi kebutuhan pasar.
 - d) Pengembangan pendidikan non formal dalam rangka meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pencari kerja sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
 - e) Peningkatan kerja sama antar lembaga pendidikan, lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia usaha, maupun dunia industri dalam peningkatan mutu pendidikan.
- 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan, aksesibilitas, dan partisipasi masyarakat dalam kesehatan, serta meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan.
- a) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, layak dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
 - b) Peningkatan kesadaran masyarakat akan budaya hidup sehat dan prinsip-prinsip pencegahan gangguan kesehatan melalui sosialisasi/ penyuluhan kesehatan masyarakat.
 - c) Peningkatan kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.
 - d) Perwujudan kemandirian terhadap status gizi masyarakat dengan cara menjalankan pola hidup bersih dan sehat melalui upaya promotif dan preventif secara terus menerus terhadap berbagai penyakit dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.
 - e) Pencegahan gangguan kesehatan, baik karena penyakit menular maupun tidak menular.
- 3) Peningkatan perluasan kesempatan kerja, kualitas tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja, dan transmigrasi

- a) Penciptaan peluang kerja dan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat.
 - b) Peningkatan sarana permodalan.
 - c) Peningkatan kerjasama antar daerah di tingkat regional dan antar wilayah termasuk untuk kegiatan transmigrasi
 - d) Peningkatan kerjasama penempatan tenaga kerja terampil didalam maupun luar negeri.
 - e) Pengembangan motivasi dan etos masyarakat berwirausaha dengan dukungan informasi peluang usaha.
 - f) Peningkatan pelatihan ketrampilan.
 - g) Perlindungan dan pengawasan terhadap tenaga kerja dan pengusaha.
 - h) Peningkatan kesehatan pekerja dan pelaksanaan hubungan industri dan pengawasan lingkungan yang kondusif.
- 4) Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan kabupaten maju di Indonesia;
- a) Pengembangan unit-unit usaha industri kecil dan kerajinan rakyat yang potensial
 - b) Peningkatan penyiapan dan penggunaan bahan baku lokal
 - c) Peningkatan inovasi produk dan perluasan jangkauan pemasaran
 - d) Peningkatan kerjasama kemitraan dengan pihak-pihak yang berkompetensi baik dalam negeri maupun luar negeri
 - e) Penerapan sistem industri, dalam lingkup mikro, kecil dan menengah, serta koperasi yang ramah lingkungan dan berbasis keluarga dan teknologi
 - f) Fasilitasi kawasan pengembangan industri kreatif yang memadai
 - g) Peningkatan produktivitas pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis dan agroindustri, guna

- menjamin ketersediaan pangan dan nilai tambah dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
- h) Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keberagaman pesona keindahan alam, budaya dan potensi daerah lainnya.
 - i) Penguatan kelembagaan ekonomi guna menciptakan regulasi dan perizinan yang efisien dan efektif.
 - j) Optimalisasi fungsi pasar tradisional untuk meningkatkan pendapatan pedagang melalui pemberian modal yang mudah dan murah.
- 5) Peningkatan jaringan infrastruktur yang andal guna meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor serta mendukung kegiatan produksi pada kawasan-kawasan pertumbuhan baru/ kawasan strategis
- a) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan dasar di seluruh wilayah dalam rangka kualitas kehidupan yang baik dan kesejahteraan masyarakat.
 - b) Pemeliharaan dan penyediaan fasilitas umum berupa prasarana dan sarana transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah.
 - c) Pemeliharaan dan penyediaan prasarana dan sarana infrastruktur pemukiman.
 - d) Penyediaan prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi guna mendukung aktivitas produksi, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar, melalui konservasi, pengembangan dan pengendalian daya rusak air.
- 6) Perencanaan, Pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan.
- a) Penataan ruang pasca bencana, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), penataan ruang seluruh kecamatan dan penataan ruang kawasan strategis.
 - b) Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

- c) Pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan.
 - d) Peningkatan kualitas penataan ruang melalui pemulihan kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya secara optimal sesuai daya dukung lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan serta pengembangan kawasan prioritas.
- 7) Pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang tercermin oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan industri dan ekonomi secara serasi dan seimbang.
- a) Peningkatan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan penegakan hukum.
 - b) Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui rehabilitasi lahan kritis dan terlantar serta pengembalian fungsi kawasan lindung.
 - c) Peningkatan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta mengurangi dampak bencana alam.
 - d) Identifikasi pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan.
- 8) Pengurangan risiko bencana melalui penataan pemukiman dan merelokasi penduduk dari wilayah rawan bencana.
- a) Pembuatan rencana penataan permukiman berbasis mitigasi bencana
 - b) Sosialisasi dan peningkatan kewaspadaan masyarakat siaga bencana.
 - c) Peningkatan kelembagaan dan kapasitas masyarakat.
- 9) Pengurangan penyandang masalah kesejahteraan sosial, tercapainya penduduk tumbuh seimbang, serta peningkatan peran perempuan dalam pembangunan;

- a) Peningkatan kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan penanganan penduduk usia lanjut melalui peningkatan partisipasi dan kesetiakawanan sosial.
 - b) Pengembangan wawasan dan kesadaran kesetaraan gender dilapisan masyarakat, organisasi, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan.
 - c) Peningkatan dukungan terbentuknya kelompok kegiatan sosial perempuan dan unit-unit usaha ekonomi produktif.
 - d) Peningkatan kemampuan perempuan dan kelompok rentan dalam mengenali dan memenuhi kebutuhan pengembangan diri.
 - e) Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi.
 - f) Peningkatan sarana dan prasarana panti sosial guna menampung penyandang masalah sosial.
- 10) Peningkatan prestasi olah raga dan kualitas generasi muda.
- a) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang olah raga
 - b) Membudayakan olah raga dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat
 - c) Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemberdayaan pemuda sebagai subyek pembangunan, melalui pengembangan lembaga kepemudaan yang berwawasan kebangsaan.
- 11) Peningkatan karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, berkeperibadian Indonesia, berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleransi, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dan dinamis.
- a) Pembentukan suatu tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis, selaras, serasi dan seimbang dalam suatu suasana yang agamis dan demokratis.

- b) Pemantapan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan daerah, membina akhlak mulia dan memupuk etos kerja.
- c) Peningkatan kerukunan hidup beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya, toleransi dan harmonisasi antar kelompok masyarakat.

➤ **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang empatik dan bertanggung jawab**, melalui :

- 1) Peningkatan kapabilitas perangkat daerah dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah secara efisien, efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel;
 - a) Peningkatan kinerja, kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah dan lembaga pemerintah dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan.
 - b) Penerapan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.
 - c) Mewujudkan inventarisasi, pendayagunaan dan manajemen aset-aset daerah secara efektif, efisien dan produktif.
 - d) Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah dan peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan.
 - e) Mewujudkan kepastian, perlindungan, penegakan dan pelayanan hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, teratur, lancar dan berdaya saing global.
 - f) Penerapan etika birokrasi, budaya kerja, pengetahuan dan pemahaman penyelenggara pemerintahan terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang empatik.
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - a) Peningkatan Teknologi informasi dalam pelayanan publik

- b) Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan *Standart Operating Procedure* (SOP) yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.
 - c) Peningkatan sarana dan prasarana publik.
 - d) Peningkatan daya respon terhadap keinginan dan kebutuhan masyarakat.
- 3) Menciptakan ketertiban masyarakat;
- a) Menciptakan kepastian hukum, dan ketertiban masyarakat.
 - b) Memahami manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana
- 4) Peningkatan kesadaran masyarakat dan aparat untuk memahami prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM melalui pemasyarakatan dan pendidikan HAM.

4.3 RPJMD ke-3 (2016-2020)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-2 , RPJMD ke-3 diarahkan untuk lebih memantapkan **Pencapaian daya saing kompetitif daerah yang berlandaskan keunggulan SDM, dan optimalisasi pengelolaan SDA, berbasis IPTEK.**

➤ **Mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin dengan memanfaatkan sumber daya lokal, berwawasan lingkungan, dan menitikberatkan pengurangan risiko bencana, serta berdasarkan pada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.**

- 1) Peningkatan kualitas pendidikan, aksesibilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, serta pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu, melalui
 - a) Peningkatan pendidikan yang bermutu dan terjangkau di semua jenjang, peningkatan relevansi daya saing dan pencitraan tata kelola pendidikan.

- b) Pemenuhan sekolah berkualitas, melalui penyediaan/ pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional, dan pemenuhan fasilitas pendidikan.
 - c) Peningkatan kuantitas dan kualitas siswa pada sekolah kejuruan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dan menciptakan lapangan pekerjaan.
 - d) Pengembangan pendidikan non formal sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
 - e) Peningkatan kerja sama antar lembaga pendidikan, lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia usaha, maupun dunia industri dalam peningkatan mutu pendidikan.
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, aksesibilitas, dan partisipasi masyarakat dalam kesehatan, serta meningkatnya perluasan pelayanan kesehatan
- a) Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, layak dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
 - b) Peningkatan budaya hidup sehat dan bersih.
 - c) Peningkatan kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.
 - d) Peningkatkan status gizi masyarakat dengan cara menjalankan pola hidup bersih dan sehat melalui upaya promotif dan preventif secara terus-menerus terhadap berbagai penyakit dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.
 - e) Peningkatan pencegahan gangguan kesehatan, baik karena penyakit menular maupun tidak menular.
- 3) Peningkatan perluasan kesempatan kerja, kualitas tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja;
- a) Penciptaan peluang kesempatan kerja dan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat.
 - b) Peningkatan sarana permodalan.
 - c) Peningkatan kerjasama antar daerah di tingkat nasional termasuk transmigrasi.

- d) Peningkatan etos masyarakat berwirausaha dengan dukungan informasi peluang usaha.
 - e) Peningkatan pelatihan ketrampilan.
 - f) Perlindungan dan pengawasan terhadap tenaga kerja dan pengusaha.
 - g) Peningkatan kesehatan pekerja dan pelaksanaan hubungan industri dan pengawasan lingkungan yang kondusif.
- 4) Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan guna menghadapi perdagangan bebas negara-negara maju sehingga pendapatan perkapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan kabupaten maju di Indonesia;
- a) Pengembangan unit-unit usaha industri kecil dan kerajinan rakyat yang potensial.
 - b) Peningkatan penyiapan dan penggunaan bahan baku lokal.
 - c) Peningkatan kualitas produk dan jangkauan pemasaran.
 - d) Peningkatan kerjasama kemitraan dengan pihak-pihak yang berkompetensi baik dalam negeri maupun luar negeri.
 - e) Pengembangan sistem industri, dalam lingkup mikro, kecil dan menengah, serta koperasi yang ramah lingkungan dan berbasis keluarga dan teknologi.
 - f) Pengembangan kawasan industri kreatif yang memadai.
 - g) Peningkatan produktivitas pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis dan agroindustri, guna menjamin ketersediaan pangan dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
 - h) Peningkatan kepariwisataan dengan memanfaatkan keberagaman pesona keindahan alam, budaya, dan potensi daerah lainnya.
 - i) Pengembangan kelembagaan ekonomi guna menciptakan regulasi dan perizinan yang efisien dan efektif.

- 5) Terwujudnya jaringan infrastruktur yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru/ kawasan strategis;
 - a) Pemenuhan dan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
 - b) Penyediaan fasilitas umum berupa prasarana dan sarana transportasi, melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan kondisi jalan dan jembatan yang sudah ada untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah.
 - c) Peningkatan prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi guna mendukung aktivitas produksi, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar, melalui konservasi, pengembangan dan pengendalian daya rusak air.
 - d) Pengembangan teknologi informasi ke seluruh wilayah.
- 6) Terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan;
 - a) Penataan ruang kawasan strategis, penyusunan zone regulation dan rencana penataan permukiman (RPP).
 - b) Peningkatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
 - c) Pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan.
 - d) Peningkatan tata ruang melalui pemulihan kawasan lindung, pengembangan kawasan budidaya dan penetapan insentif disinsentif.
- 7) Peningkatan pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang tercermin oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan industri dan ekonomi secara serasi dan seimbang;

- a) Peningkatan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan penegakan hukum lingkungan.
 - b) Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui rehabilitasi lahan kritis dan terlantar serta pengembalian fungsi kawasan lindung.
 - c) Peningkatan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta mengurangi dampak bencana alam.
 - d) Pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan.
- 8) Pengurangan risiko bencana melalui penataan pemukiman dan merelokasi penduduk dari wilayah rawan bencana.
- a) Pembangunan infrastruktur permukiman dan relokasi penduduk dari wilayah rawan bencana.
 - b) Peningkatan kelembagaan masyarakat.
 - c) Peningkatan kemampuan seluruh masyarakat, baik perempuan, anak dan usia lanjut dalam mengenali aspek bencana.
 - d) Peningkatan sarana prasarana sistem peringatan dini bencana.
- 9) Berkurangnya penyandang masalah kesejahteraan sosial, tercapainya penduduk tumbuh seimbang, serta peningkatan peran perempuan dalam pembangunan;
- a) Mewujudkan kesetaraan gender di lapisan masyarakat, organisasi, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan.
 - b) Peningkatan peran kelompok kegiatan sosial perempuan dan unit-unit usaha ekonomi produktif.
 - c) Peningkatan kemampuan perempuan dan kelompok rentan dalam mengenali dan memenuhi kebutuhan pengembangan diri.
 - d) Jaminan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah Kesehatan Reproduksi (kespro) serta kelangsungan hidup ibu anak.
 - e) Peningkatan sarana dan prasarana panti sosial guna menampung penyandang masalah sosial.

- 10) Penanganan olah raga, peningkatan prestasi olah raga dan kualitas generasi muda.
 - a) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang olah raga
 - b) Pengembangan budaya olah raga bagi masyarakat
 - c) Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemberdayaan pemuda sebagai subyek pembangunan, melalui pengembangan lembaga kepemudaan yang berwawasan kebangsaan.
 - 11) Mantapnya karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, berkeperibadian Indonesia dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleransi, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dan dinamis;
 - a) Pembentukan suatu tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis, selaras, serasi dan seimbang dalam suatu suasana yang agamis dan demokratis.
 - b) Pemantapan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan daerah, membina akhlak mulia dan memupuk etos kerja.
 - c) Peningkatan kerukunan hidup beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya, toleransi dan harmonisasi antar kelompok masyarakat.
- **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang empatik dan bertanggung jawab**, melalui :
- 1) Peningkatan kapasitas perangkat daerah dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah secara efisien, efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel.
 - a) Peningkatan kinerja, kapasitas dan profesionalisme aparatur serta lembaga pemerintah.
 - b) Penerapan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.

- c) Mewujudkan inventarisasi, pendayagunaan dan manajemen aset-aset daerah secara efektif, efisien dan produktif.
 - d) Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah dan peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan menuju kemandirian daerah.
 - e) Mewujudkan kepastian, perlindungan, penegakan dan pelayanan hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, teratur, lancar dan berdaya saing global.
 - f) Pemantapan tata kelola pemerintahan yang empatik.
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
 - a) Penerapan Teknologi informasi sampai tingkat desa dalam pelayanan publik.
 - b) Pemantapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga tercipta kepuasan masyarakat.
 - c) Peningkatan mutu sarana dan prasarana publik.
 - 3) Peningkatan ketertiban masyarakat.
 - a) Pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan.
 - b) Pemantapan manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana dalam kehidupan bermasyarakat.
 - 4) Pemantapan kesadaran masyarakat dan aparat, membudayakan prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM melalui pemasyarakatan dan pendidikan HAM.

4.4 RPJMD ke-4 (2020-2025)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-3, RPJMD ke-4 diarahkan untuk mewujudkan **Pencapaian struktur perekonomian yang semakin kokoh, berlandaskan keunggulan kompetitif lokal di Kabupaten Bantul yang didukung SDM berkualitas, berdaya saing, dengan penerapan IPTEK yang terus meningkat.**

- **Mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin dengan memanfaatkan sumber daya lokal, berwawasan lingkungan, dan menitik beratkan pengurangan risiko bencana, serta didasarkan pada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa**
- 1) Peningkatan kualitas pendidikan, aksesibilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, serta pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu, melalui :
 - a) Perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan terjangkau di semua jenis, peningkatan relevansi daya saing dan pencitraan tata kelola pendidikan.
 - b) Pemenuhan sekolah berkualitas, melalui peningkatan fasilitas pendidikan.
 - c) Pemenuhan kuantitas dan kualitas sekolah kejuruan untuk menciptakan lapangan pekerjaan.
 - d) Pengembangan pendidikan non formal dalam rangka meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pencari kerja sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
 - e) Peningkatan kerja sama antar lembaga pendidikan, lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia usaha, maupun dunia industri dalam peningkatan mutu pendidikan;
 - 2) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, aksesibilitas, dan partisipasi masyarakat dalam kesehatan, serta meningkatnya perluasan pelayanan kesehatan;
 - a) Pemantapan mutu sarana dan prasarana kesehatan, yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
 - b) Penerapan budaya hidup sehat dan bersih.
 - c) Pemenuhan kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.
 - d) Pemenuhan status gizi masyarakat yang baik dan bermutu.
 - e) Pencegahan gangguan kesehatan, baik karena penyakit menular maupun tidak menular dapat terwujud dalam kehidupan bermasyarakat.
 - f) Peningkatan manajemen kesehatan.

- g) Peningkatan pemakaian obat tradisional.
- 3) Peningkatan perluasan kesempatan kerja, kualitas tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja;
 - a) Penciptaan wira usaha baru.
 - b) Pemantapan sistem rekrutmen tenaga kerja.
 - c) Peningkatan sarana dan cakupan permodalan.
 - d) Pemantapan kerjasama antar daerah termasuk transmigrasi di tingkat nasional dan kerjasama di tingkat internasional.
 - e) Peningkatan tenaga terampil dan produktif.
 - f) Perlindungan dan pengawasan terhadap tenaga kerja dan pengusaha.
 - g) Terpenuhinya kesehatan pekerja dan pelaksanaan hubungan industri dan pengawasan lingkungan yg kondusif.
- 4) Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan guna menghadapi pasar bebas dunia sehingga pendapatan perkapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan kabupaten maju di Indonesia.
 - a) Kemandirian unit-unit usaha industri kecil dan kerajinan rakyat.
 - b) Terpenuhinya bahan baku secara mandiri.
 - c) Perluasan jangkauan pemasaran.
 - d) Pemantapan kerjasama kemitraan dengan pihak-pihak yang berkompetensi baik dalam negeri maupun luar negeri.
 - e) Pengembangan sistem industri yang ramah lingkungan, dan kemantapan koperasi.
 - f) Pembentukan kawasan pengembangan industri kreatif yang memadai.
 - g) Terpenuhinya produktivitas pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis dan agroindustri, guna menjamin ketersediaan pangan dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

- h) Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keberagaman pesona keindahan alam, budaya dan potensi daerah lainnya.
 - i) Pengembangan kelembagaan ekonomi guna menciptakan regulasi dan perizinan yang efisien dan efektif.
- 5) Peningkatan jaringan infrastruktur yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru/ kawasan strategis;
- a) Peningkatan dan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
 - b) Pemenuhan penyediaan fasilitas umum berupa prasarana dan sarana transportasi, melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan kondisi jalan dan jembatan yang sudah ada untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah.
 - c) Pemenuhan prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi guna mendukung aktivitas produksi, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar, melalui konservasi, pengembangan dan pengendalian daya rusak air.
 - d) Pemenuhan teknologi informasi keseluruhan wilayah.
 - e) Terbangunnya Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).
- 6) Terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan;
- a) Penataan ruang bagi kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru.
 - b) Peningkatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
 - c) Pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan peraturan yang ada.
- 7) Pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang tercermin oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan industri dan ekonomi secara serasi dan seimbang;

- a) Pemantapan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan penegakan hukum.
 - b) Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui rehabilitasi lahan kritis dan terlantar serta pengembalian fungsi kawasan lindung.
 - c) Terpenuhinya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta mengurangi dampak bencana alam.
 - d) Pengembangan energi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan di seluruh wilayah.
- 8) Pengurangan risiko bencana melalui penataan pemukiman dan merelokasi penduduk dari wilayah rawan bencana;
- a) Penataan dan pembangunan pemukiman berbasis bencana.
 - b) Penguatan kelembagaan dan kemampuan seluruh masyarakat, baik perempuan, anak dan usia lanjut dalam mengenali aspek bencana.
 - c) Penanganan korban bencana alam yang cepat dan responsip.
 - d) Pemenuhan sarana prasarana sistem peringatan dini bencana.
- 9) Berkurangnya penyandang masalah kesejahteraan sosial, tercapainya penduduk tumbuh seimbang, serta peningkatan peran perempuan dalam pembangunan;
- a) Pemantapan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis, selaras, serasi dan seimbang dalam suatu suasana yang agamis dan demokratis.
 - b) Pemantapan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan daerah, membina akhlak mulia dan memupuk etos kerja.
 - c) Pemantapan kerukunan hidup beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya, toleransi dan harmonisasi antar kelompok masyarakat.

- d) Pemantapan jaminan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu dan anak.
 - e) Terpenuhinya sarana dan prasarana panti sosial guna menampung penyandang masalah sosial.
- 10) Peningkatan prestasi olah raga dan kualitas generasi muda;
- a) Terpenuhinya kualitas yang baik, sarana dan prasarana penunjang olah raga.
 - b) Pemantapan budaya olah raga dalam kehidupan di masyarakat.
 - c) Perluasan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemantapan kelembagaan kepemudaan yang berwawasan dan tetap berpegang teguh menjaga negara kesatuan Republik Indonesia.
 - d) Peningkatan dan mempertahankan prestasi olahraga baik tingkat regional, nasional, maupun internasional.
- 11) Mantapnya karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleransi, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dan dinamis.
- a) Pemantapan dan pembudayaan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis, selaras, serasi dan seimbang dalam suatu suasana yang agamis dan demokratis.
 - b) Pemantapan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan daerah, membina akhlak mulia dan memupuk etos kerja.
 - c) Terciptanya manusia-manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan peningkatan kerukunan hidup beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya, toleransi dan harmonisasi antar kelompok masyarakat.

➤ **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang empatik dan bertanggung jawab**, melalui :

- 1) Peningkatkan kapasitas perangkat daerah dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah secara efisien, efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel;
 - a) Aparat pemerintah yang profesional dan lembaga pemerintah yang mantap dengan berdasarkan tata kelola pemerintah yang peduli pada kepentingan rakyat.
 - b) Pemantapan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.
 - c) Pemantapan sistem tata kelola inventarisasi aset daerah.
 - d) Pemantapan manajemen keuangan daerah dan peningkatan kemitraan dengan masyarakat serta dunia usaha.
 - e) Mewujudkan kepastian, perlindungan, penegakan dan pelayanan hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, teratur, lancar dan berdaya saing global.
 - f) Pemantapan etika birokrasi, budaya kerja, pengetahuan dan pemahaman penyelenggara pemerintahan.
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
 - a) Pemantapan teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - b) Pemantapan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.
 - c) Pemenuhan sarana dan prasarana publik yang berkualitas.
- 3) Mewujudkan ketertiban masyarakat.
 - a) Pemantapan kepastian hukum, dan ketertiban masyarakat
 - b) Pemantapan manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana
 - c) Terciptanya kondisi yang aman, tertib, dan terkendali dalam kehidupan bernegara, dan bermasyarakat.

- 4) Menjunjung tinggi hak asasi manusia yang berlandaskan kesadaran menjalankan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

5.1 Ketentuan Umum

Pengertian secara umum Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah suatu kerangka kebijakan dalam rangka mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan selama 20 tahun (2006-2025). Menurut skalanya, RPJPD merupakan perencanaan tingkat makro daerah selama 20 tahun yang perlu dipahami sebagai dokumen bersama (seluruh *stakeholder*) dalam rangka melaksanakan pembangunan. Selanjutnya dokumen RPJPD secara teknis menjadi pedoman dalam rangka menyusun pentahapan pelaksanaan pembangunan dalam skala waktu lima tahunan.

Sesuai dengan skalanya maka RPJPD menyajikan berbagai kebijakan dan strategi lima tahunan yang akan dilaksanakan. Kebijakan dan strategi lima tahunan diambil berdasarkan potensi dan permasalahan pengembangan wilayah secara makro serta menitikberatkan pada kajian perencanaan yang memiliki dampak strategis dalam jangka panjang.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantul berlaku tahun 2006-2025. RPJPD pada hakekatnya merupakan pedoman bagi seluruh komponen masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun demikian, lima tahun pertama telah dijabarkan dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2008, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2006-2010. Untuk itu, diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

- 1) Seluruh komponen masyarakat, dunia usaha dan pemerintah daerah berkewajiban untuk menjabarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 ke dalam kerangka program yang lebih mendetil pada dokumen RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2011-2015, 2016-2020, dan 2021-2025 dengan sebaik-baiknya;
- 2) Apabila dalam perjalanannya terjadi perubahan situasi dari keadaan normal pada saat Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 ini ditetapkan, yang bersifat memperlambat atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran 15 tahun ke depan, maka perubahan situasi tersebut tidak untuk mengubah tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akan tetapi perubahan situasi tersebut hanya dapat memperlambat atau mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran. Implikasinya adalah memungkinkan adanya pergeseran target, tetapi masih dalam kerangka pencapaian tujuan semula.

**MATRIK RPJPD KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2006-2025**

VISI :

BANTUL PROJOTAMANSARI SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN AGAMIS

RPJMD ke II		RPJMD ke III		RPJMD ke IV		
<p align="center">Penekanan pada lima tahun Kedua</p> <p align="center">peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pemanfaatan Sumber Daya Alam, pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian lokal.</p>		<p align="center">Penekanan pada lima tahun Ketiga</p> <p align="center">Pencapaian daya saing kompetitif daerah yang berlandaskan keunggulan SDM, dan optimalisasi pengelolaan SDA, berbasis IPTEK.</p>		<p align="center">Penekanan pada lima tahun Keempat</p> <p align="center">Pencapaian struktur perekonomian yang semakin kokoh, berlandaskan keunggulan kompetitif lokal yang didukung SDM berkualitas, berdaya saing dengan penerapan IPTEK yang terus meningkat.</p>		
MISI	TAHAP II	PRIORITAS TAHAP II	TAHAP III	PRIORITAS TAHAP III	TAHAP IV	PRIORITAS TAHAP IV
<p>Mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin dengan memanfaatkan sumber daya lokal, berwawasan lingkungan dan menitikberatkan pada pengurangan risiko bencana, serta berdasarkan pada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa</p>	<p>Peningkatan kualitas pendidikan, aksesibilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, serta pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan, pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dasar 12 tahun yang bermutu dan terjangkau di semua jenjang pendidikan, peningkatan relevansi daya saing dan pencitraan tata kelola pendidikan. • Peningkatan pemenuhan sekolah berkualitas, melalui penyediaan/ pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional dan pemenuhan fasilitas pendidikan. • Pemenuhan sekolah berkualitas diberbagai jenjang pendidikan, peningkatan kualitas dan kuantitas siswa pada sekolah kejuruan untuk memenuhi kebutuhan pasar. • Pengembangan pendidikan non formal dalam rangka meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pencari kerja sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi • Peningkatan kerja sama antar lembaga pendidikan, lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia usaha, maupun dunia industri dalam peningkatan mutu pendidikan; 	<p>Peningkatan kualitas pendidikan, aksesibilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, serta pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pendidikan yang bermutu dan terjangkau di semua jenjang, peningkatan relevansi daya saing dan pencitraan tata kelola pendidikan. • Peningkatan pemenuhan sekolah berkualitas, melalui penyediaan/pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional dan pemenuhan fasilitas pendidikan. • Peningkatan kuantitas dan kualitas siswa pada sekolah kejuruan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dan menciptakan lapangan pekerjaan. • Pengembangan pendidikan non formal sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. • Peningkatan kerja sama antar lembaga pendidikan, lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia usaha, maupun dunia industri dalam peningkatan mutu pendidikan; 	<p>Peningkatan kualitas pendidikan, aksesibilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, serta pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan terjangkau di semua jenis, peningkatan relevansi daya saing dan pencitraan tata kelola pendidikan. • Pemenuhan sekolah berkualitas melalui peningkatan fasilitas pendidikan. • Pemenuhan kuantitas dan kualitas sekolah kejuruan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. • Pengembangan pendidikan non formal dalam rangka meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pencari kerja sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. • Peningkatan kerja sama antar lembaga pendidikan, lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia usaha, maupun dunia industri dalam peningkatan mutu pendidikan;

	<p>Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan, aksesibilitas, dan partisipasi masyarakat dalam kesehatan, serta meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, layak dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. • Peningkatan kesadaran masyarakat akan budaya hidup sehat dan prinsip-prinsip pencegahan gangguan kesehatan melalui sosialisasi/ penyuluhan kesehatan masyarakat. • Peningkatan kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak. • Perwujudan kemandirian terhadap status gizi masyarakat dengan cara menjalankan pola hidup bersih dan sehat melalui upaya promotif dan preventif secara terus menerus terhadap berbagai penyakit, dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat • Pencegahan gangguan kesehatan baik karena penyakit menular maupun tidak menular. 	<p>Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, aksesibilitas, dan partisipasi masyarakat dalam kesehatan, serta meningkatnya perluasan pelayanan kesehatan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, layak dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. • Peningkatan budaya hidup sehat dan bersih. • Peningkatan kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak. • Peningkatkan status gizi masyarakat dengan cara menjalankan pola hidup bersih dan sehat melalui upaya promotif dan preventif secara terus menerus terhadap berbagai penyakit dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. • Peningkatan pencegahan gangguan kesehatan, baik karena penyakit menular maupun tidak menular. 	<p>Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, aksesibilitas, dan partisipasi masyarakat dalam kesehatan, serta meningkatnya perluasan pelayanan kesehatan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan mutu sarana dan prasarana kesehatan yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. • Penerapan budaya hidup sehat dan bersih. • Pemenuhan kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak. • Pemenuhan status gizi masyarakat yang baik dan bermutu. • Pencegahan gangguan kesehatan, baik karena penyakit menular maupun tidak menular dapat terwujud dalam kehidupan bermasyarakat. • Peningkatan manajemen kesehatan. • Peningkatan pemakaian obat tradisional.
	<p>Peningkatan perluasan kesempatan kerja, kualitas tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja dan transmigrasi;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan peluang kerja dan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat. • Peningkatan sarana permodalan • Peningkatan kerjasama antar daerah ditingkat regional termasuk transmigrasi. • Peningkatan kerjasama penempatan tenaga kerja trampil didalam maupun luar negeri • Pengembangan motivasi dan etos masyarakat berwirausaha dengan dukungan informasi peluang usaha • Peningkatan pelatihan ketrampilan • Perlindungan dan pengawasan terhadap tenaga kerja dan pengusaha 	<p>Peningkatan perluasan kesempatan kerja, kualitas tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja dan transmigrasi;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan peluang kesempatan kerja dan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat. • Peningkatan sarana permodalan • Peningkatan kerjasama antar daerah di tingkat nasional termasuk transmigrasi. • Peningkatan etos masyarakat berwirausaha dengan dukungan informasi peluang usaha • Peningkatan pelatihan ketrampilan • Perlindungan dan pengawasan terhadap tenaga kerja dan pengusaha. • Peningkatan kesejahteraan pekerja dan pelaksanaan hubungan industri dan 	<p>Peningkatan perluasan kesempatan kerja, kualitas tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja dan transmigrasi;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan wirausaha baru. • Pemantapan system rekrutmen tenaga kerja. • Peningkatan sarana dan cakupan permodalan • Pemantapan kerjasama antar daerah di tingkat nasional termasuk transmigrasi dan kerjasama di tingkat internasional. • Peningkatan tenaga trampil dan produktif. • Perlindungan dan pengawasan terhadap tenaga kerja dan pengusaha. • Terpenuhinya kesehatan pekerja dan pelaksanaan hubungan industri dan pengawasan lingkungan yang kondusif.

		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesehatan pekerja, dan pelaksanaan hubungan industri dan pengawasan lingkungan yang kondusif. 		<p>pengawasan lingkungan yang kondusif.</p>		
	<p>Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan kabupaten maju di Indonesia;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan unit-unit usaha industri kecil dan kerajinan rakyat yang potensial • Peningkatan penyiapan dan penggunaan bahan baku lokal • Peningkatan inovasi produk dan perluasan jangkauan pemasaran • Peningkatan kerjasama kemitraan dengan pihak-pihak yang berkompetensi baik dalam negeri maupun luar negeri • Penerapan sistem industri, dalam lingkup mikro, kecil dan menengah, serta koperasi yang ramah lingkungan dan berbasis keluarga dan teknologi • Fasilitasi kawasan pengembangan industri kreatif yang memadai • Peningkatan produktivitas pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis dan agroindustri, guna menjamin ketersediaan pangan dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran. • Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keberagaman pesona keindahan alam, budaya dan potensi daerah lainnya. • Penguatan kelembagaan ekonomi guna menciptakan regulasi dan perizinan yang efisien dan efektif. • Optimalisasi fungsi pasar tradisional untuk meningkatkan pendapatan pedagang melalui pemberian modal yang mudah dan murah. 	<p>1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan guna menghadapi perdagangan bebas negara-negara maju sehingga pendapatan perkapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan kabupaten maju di Indonesia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan unit-unit usaha industri kecil dan kerajinan rakyat yang potensial • Peningkatan penyiapan dan penggunaan bahan baku lokal • Peningkatan kualitas produk dan jangkauan pemasaran • Peningkatan kerjasama kemitraan dengan pihak-pihak yang berkompetensi baik dalam negeri maupun luar negeri • Pengembangan sistem industri, dalam lingkup mikro, kecil dan menengah, serta koperasi yang ramah lingkungan dan berbasis keluarga dan teknologi • Pengembangan kawasan industri kreatif yang memadai • Peningkatan produktivitas pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis dan agroindustri, guna menjamin ketersediaan pangan dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran. • Peningkatan kepariwisataan dengan memanfaatkan keberagaman pesona keindahan alam, budaya dan potensi daerah. • Pengembangan kelembagaan ekonomi guna menciptakan regulasi dan perizinan yang efisien dan efektif. 	<p>Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan guna menghadapi pasar bebas dunia sehingga pendapatan perkapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan kabupaten maju di Indonesia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kemandirian unit-unit usaha industri kecil dan kerajinan rakyat. • Terpenuhinya bahan baku secara mandiri. • Perluasan jangkauan pemasaran • Pemantapan kerjasama kemitraan dengan pihak-pihak yang berkompetensi baik dalam negeri maupun luar negeri. • Pengembangan sistem industri, yang ramah lingkungan, dan kemandirian koperasi. • Pembentukan kawasan pengembangan industri kreatif yang memadai. • Terpenuhinya produktivitas pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis dan agroindustri, guna menjamin ketersediaan pangan dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran. • Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan pesona keindahan alam, budaya dan potensi daerah lainnya. • Pengembangan kelembagaan ekonomi guna menciptakan regulasi dan perizinan yang efisien dan efektif.

<p>Peningkatan jaringan infrastruktur yang handal, guna meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung kegiatan produksi pada kawasan-kawasan pertumbuhan baru/kawasan strategis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan dasar diseluruh wilayah dalam rangka kualitas kehidupan yang baik dan kesejahteraan masyarakat. • Pemeliharaan dan penyediaan fasilitas umum berupa sarana dan prasarana transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah. • Pemeliharaan dan penyediaan prasarana dan sarana infrastruktur permukiman • Penyediaan sarana dan prasarana sumber daya air dan irigasi guna mendukung aktifitas produksi, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar melalui konservasi, pengembangan, dan pengendalian daya rusak air. 	<p>Peningkatan jaringan infrastruktur yang handal, guna meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung kegiatan produksi pada kawasan-kawasan pertumbuhan baru/ kawasan strategis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan dan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar diseluruh wilayah dalam rangka kualitas kehidupan yang baik dan kesejahteraan masyarakat. • Penyediaan fasilitas umum berupa prasarana dan sarana transportasi, melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan kondisi jalan dan jembatan yang sudah ada untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah. • Peningkatan prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi guna mendukung aktivitas produksi, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar, melalui konservasi, pengembangan dan pengendalian daya rusak air. • Pengembangan teknologi informasi ke seluruh wilayah. 	<p>Peningkatan jaringan infrastruktur yang handal, guna meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung kegiatan produksi pada kawasan-kawasan pertumbuhan baru/ kawasan strategis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di diseluruh wilayah dalam rangka kualitas kehidupan yang baik dan kesejahteraan masyarakat. • Pemenuhan penyediaan fasilitas umum berupa prasarana dan sarana transportasi, melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan kondisi jalan dan jembatan yang sudah ada untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah. • Pemenuhan prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi guna mendukung aktivitas produksi, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar, melalui konservasi, pengembangan dan pengendalian daya rusak air. • Pemenuhan teknologi informasi ke seluruh wilayah. • Terbangunnya JJLS.
<p>Perencanaan, Pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan ruang pasca bencana, rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bantul (RTRW), penataan ruang seluruh kecamatan dan penataan ruang kawasan strategis. • Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. • Pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan. • Peningkatan kualitas penataan ruang melalui pemulihan kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya secara optimal sesuai daya dukung lingkungan dan 	<p>Terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan ruang kawasan strategis, penyusunan zone regulation dan rencana penataan permukiman (RPP). • Peningkatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. • Pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan. • Peningkatan tata ruang melalui pemulihan kawasan lindung, pengembangan kawasan budidaya dan penetapan insentif disinsentif. 	<p>Terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan ruang bagi kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru. • Peningkatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. • Pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan peraturan yang ada.

		prinsip pembangunan berkelanjutan serta pengembangan kawasan prioritas.				
	Pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang tercermin oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi dan seimbang.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan penegakan hukum lingkungan. • Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui rehabilitasi lahan kritis dan terlantar serta pengembalian fungsi kawasan lindung. • Peningkatan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta mengurangi dampak bencana alam; • Identifikasi pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan. 	Peningkatan pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang tercermin oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan industri dan ekonomi secara serasi dan seimbang.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan penegakan hukum lingkungan. • Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui rehabilitasi lahan kritis dan terlantar serta pengembalian fungsi kawasan lindung. • Peningkatan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta mengurangi dampak bencana alam; • Pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan. 	Pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang tercermin oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi dan seimbang.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan penegakan hukum. • Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui rehabilitasi lahan kritis dan terlantar serta pengembalian fungsi kawasan lindung. • Terpenuhinya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta mengurangi dampak bencana alam; • Pengembangan energi terbarukan yang ramah lingkungan di seluruh wilayah.
	Pengurangan risiko bencana melalui penataan permukiman dan merelokasi penduduk dari wilayah rawan bencana.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan rencana penataan permukiman berbasis mitiasi bencana • Sosialisasi dan peningkatan kewaspadaan masyarakat siaga bencana • Peningkatan kelembagaan dan kapasitas masyarakat 	Pengurangan risiko bencana melalui penataan permukiman dan merelokasi penduduk dari wilayah rawan bencana.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan infrastruktur permukiman dan relokasi penduduk dari wilayah rawan bencana. • Peningkatan kelembagaan masyarakat. • Peningkatan kemampuan seluruh masyarakat, baik perempuan, anak dan usia lanjut dalam mengenali aspek bencana. • Peningkatan sarana prasarana sistem peringatan dini bencana. 	Pengurangan risiko bencana alam melalui penataan permukiman dan merelokasi penduduk dari wilayah rawan bencana.	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan pembangunan permukiman berbasis bencana. • Penguatan kelembagaan dan kemampuan seluruh masyarakat baik perempuan, anak dan usia lanjut dalam mengenali aspek bencana. • Penanganan korban bencana alam yang cepat dan responsif. • Pemenuhan sarana dan prasarana sistem peringatan dini bencana.
	Pengurangan penyandang masalah kesejahteraan sosial, tercapainya penduduk tumbuh seimbang, serta peningkatan peran	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan penanganan penduduk usia lanjut melalui peningkatan partisipasi dan kesetiakawanan 	Berkurangnya penyandang masalah kesejahteraan sosial, tercapainya penduduk tumbuh seimbang, serta peningkatan peran perempuan dalam pembangunan.	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan kesetaraan gender di lapisan masyarakat, organisasi, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. • Peningkatan peran kelompok kegiatan social perempuan 	Berkurangnya penyandang masalah kesejahteraan sosial, tercapainya penduduk tumbuh seimbang, serta peningkatan peran	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis, selaras, serasi dan seimbang dalam suatu suanan yang agamis dan dmokratis.

	perempuan dalam pembangunan.	<ul style="list-style-type: none"> • sosial masyarakat. • Pengembangan wawasan dan kesadaran kesetaraan gender di lapisan masyarakat, organisasi, dan lembaga-kemasyarakatan • Peningkatan dukungan terbentuknya kelompok kegiatan social perempuan dan unit-unit usaha ekonomi produktif • Peningkatan kemampuan perempuan dan kelompok rentan dalam mengenali dan memenuhi kebutuhan pengembangan diri • Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi. • Peningkatan sarana dan prasarana panti social guna menampung penyandang masalah social. 		<ul style="list-style-type: none"> • dan unit-unit usaha ekonomi produktif. • Peningkatan kemampuan perempuan dan kelompok rentan dalam mengenali dan memenuhi kebutuhan pengembangan diri. • Jaminan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsunagn hidup ibu anak. • Peningkatan sarana dan prasarana panti social guna menampung penyandang masalah social. 	perempuan dalam pembangunan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan daerah, membina akhlak yan mulia dan memupuk etos kerja. • Pemantapan kerukunan hidup beragama dengan meingkatkan rasa saling percaya, toleransi dan harmonisasi antar kelompok masyarakat. • Pemantapan jaminan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsunagn hidup ibu anak. • Terpenuhinya sarana dan prasarana panti social guna menampung penyandang masalah social.
	Peningkatan prestasi olah raga dan kualitas generasi muda	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sarana dan prasarana penunjang olah raga. • Membudayakan olah raga dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat • Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemberdayaan pemuda sebagai subyek pembangunan, melalui pengembangan lembaga kepemudaan yang berwawasan kebangsaan. 	Penanganan olah raga, peningkatan prestasi olah raga dan kualitas generasi muda.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sarana dan prasarana penunjang olah raga. • Pengembangan budaya olah raga bagi masyarakat. • Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemberdayaan pemuda sebagai subyek pembangunan, melalui pengembangan lembaga kepemudaan yang berwawasan kebangsaan. 	Peningkatan prestasi olah raga dan kualitas generasi muda	<ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhinya kualitas yang baik, sarana prasarana penunjang olahraga. • Pemantapan budaya olah raga dalam kehidupan di masyarakat. • Perluasan partisipasi pemuda dan pemantapan kelembagaan kepemudaan yang berwawasan dan tetap berpegang teguh menjaga negara kesatuan RI. • Peningkatan dan mempertahankan prestasi olahraga baik tingkat regional, nasional, maupun internasional.
	Peningkatan karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh, kompetitif, berkepribadian Indonesia, berdasarkan falsafah Pancasila yang	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan suatu tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis, selaras, serasi dan seimbang dalam suatu suasana yang agamis dan demokratis. • Pemantapan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral 	Mantapnya karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh, kompetitif, beraklaq mulia, berkepribadian Indonesia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku yang	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan suatu tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis, selaras, serasi dan seimbang dalam suatu suasana yang agamis dan demokratis. • Pemantapan fungsi dan peran 	Mantapnya karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh, kompetitif, beraklaq mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan dan pembudayaan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis, selaras, serasi dan seimbang dalam suatu suasana yang agamis dan demokratis.

	dicirikan dengan watak dan perilaku yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beerbudi luhur, bertoleransi, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dan dinamis	<p>dan etika dalam pembangunan daerah, membina akhlak mulia dan memupuk etos kerja.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kerukunan hidup beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya, toleransi dan harmonisasi antar kelompok masyarakat. 	beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleransi, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dan dinamis	<p>agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan daerah, membina akhlak mulia dan memupuk etos kerja.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kerukunan hidup beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya, toleransi dan harmonisasi antar kelompok masyarakat. 	perilaku yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beerbudi luhur, bertoleransi, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dan dinamis	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan daerah, membina akhlak mulia dan memupuk etos kerja. • Terciptanya manusia-manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang mah Esa dan peningkatan kerukunan hidup beragama dengan meningkatnya rasa saling percaya, toleransi dan harmonis antar kelompok masyarakat.
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang empatik dan bertanggung jawab	Peningkatan kapasitas perangkat daerah dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah secara efisien, efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kinerja, kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah dan lembaga pemerintah dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan. • Penerapan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel. • Mewujudkan inventarisasi, pendayagunaan dan manajemen aset-aset daerah secara efektif, efisien dan produktif. • Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah dan peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan. • Mewujudkan kepastian, perlindungan, penegakan dan pelayanan hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, teratur, lancar dan berdaya saing global. • Penerapan etika birokrasi, budaya kerja, pengetahuan dan penyelenggara pemerintahan terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang empatik. 	Peningkatan kapasitas perangkat daerah dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah secara efisien, efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas perangkat daerah dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah secara efisien, efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel. • Penerapan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel. • Mewujudkan inventarisasi, pendayagunaan dan manajemen aset-aset daerah secara efektif, efisien dan produktif. • Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah dan peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan menuju kemandirian daerah. • Mewujudkan kepastian, perlindungan, penegakan dan pelayanan hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, teratur, lancar dan berdaya saing global. • Pemantapan tata kelola pemerintahan yang empatik. 	Peningkatan kapasitas perangkat daerah dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah secara efisien, efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> • Aparat pemerinah yang profesional dan lembaga pemerintah yang mantap denan berdasarkan tata kelola pememrintah yang peduli pada kepentingan rakyat. • Pemantapan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel. • Pemantapan sistem tata kelola inventarisasi aset daerah. • Pemantapan manajemen keuangan daerah dan peningkatan kemitraan dengan masyarakat serta dunia usaha. • Mewujudkan kepastian perlindungan, penegakkan dan pelayanan hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, teratur, lancar dan berdaya saing global. • Kemantapan etika birokrasi, budaya kerja, pengetahuan dan pemahaman penyelenggara pemerintahan.

Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Teknologi informasi dalam pelayanan public • Peningkatan kualitas pelayanan public sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standart Operating Procedure (SOP) yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat. • Peningkatan sarana dan prasarana publik. • Peningkatan daya respon terhadap keinginan dan kebutuhan masyarakat. 	Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan Teknologi informasi sampai tingkat desa dalam pelayanan public • Pemantapan SPM sehingga tercipta kepuasan masyarakat. • Peningkatan mutu sarana dan prasarana publik. 	Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan teknologi informasi dalam pelayanan public • Pemantapan kualitas pelayanan public sesuai dengan standar mutu pelayanan. • Pemenuhan srana dan prasarana publik yang berkualitas.
Menciptakan ketertiban masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Menciptakan kepastian hukum, ketertiban dan keamanan masyarakat • Memahami manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana. 	Peningkatan ketertiban masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kepastian hukum, ketertiban, perlindungan dan keamanan. • Pemantapan manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana 	Mewujudkan ketertiban masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan kepastian hukum, ketertiban dan keamanan masyarakat • Pemantapan manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana • Terciptanya kondosi yang aman, tertib, dan terkendali dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
Peningkatan kesadaran masyarakat dan aparat untuk memahami prinsip-prinsip dasar HAM melalui pemyarakatan dan pendidikan HAM.	Peningkatan pemahaman prinsip-prinsip dasar HAM melalui pemyarakatan dan pendidikan HAM.	Pemantapan kesadaran masyarakat dan aparat, membudayakan prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM melalui pemyarakatan dan pendidikan hukum dan HAM.	Pemantapan pemahaman prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM melalui pemyarakatan dan pendidikan hukum dan HAM.	Menjujung tinggi HAM yang berlandaskan kesadaran menjalankan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.	Pemantapan pemahaman prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM melalui pemyarakatan dan pendidikan hukum dan HAM.